



Rencana Strategis Antara Universitas Terbuka Tahun 2024-2025

Universitas Terbuka
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

SAMBUTAN REKTOR



Universitas Terbuka kini telah menyoal status Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) sesuai dengan diterbitkannya Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2022 Tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Terbuka. Sejalan dengan perubahan tersebut, Rencana Strategis Bisnis (RSB) UT Tahun 2021-2035 perlu dilakukan penyesuaian dengan berbagai kebijakan PTNBH UT yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Antara Tahun 2024-2025.

Renstra Antara Tahun 2024-2025 merujuk pada Rencana Pengembangan Jangka Panjang (RPJP) UT Tahun 2021-2035 dengan

tiga tahapan strategis, yaitu 1) integrasi jejaring *Cyber University* (2021 – 2025); 2) ekosistem pendidikan digital (2026 – 2030); dan 3) UT didukung oleh ekosistem digital yang kokoh (2031 – 2035). Universitas Terbuka telah menetapkan RSB UT Tahun 2021 – 2025 sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT). Namun, sehubungan RSB UT 2024 – 2025 disusun ketika UT masih sebagai Badan Layanan Umum (BLU) maka Majelis Wali Amanat (MWA) UT memberikan mandat kepada Rektor UT untuk menyusun Rencana Strategis Antara Tahun 2024 – 2025 untuk disahkan oleh Majelis Wali Amanat (MWA) UT.

Rencana Strategis Antara 2024 – 2025 merupakan revisi terhadap Rencana Strategis yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategi Bisnis (RSB) UT Tahun 2021 – 2025 dengan mempertimbangkan evaluasi kinerja dan analisis peningkatan mutu yang diperlukan sesuai dengan perubahan status UT menjadi Perguruan Tinggi Badan Hukum (PTN-BH). Renstra Antara UT Tahun 2024-2025 menguraikan tentang Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Arah Kebijakan dan Strategi yang terdiri dari Kerangka Regulasi, Kerangka Kelembagaan, dan Reformasi Birokrasi, Kondisi Umum UT, Analisis Potensi dan Analisis Permasalahan

berdasarkan Evaluasi Kinerja UT, Ketersediaan SDM, Peningkatan Layanan Akademik dan Non Akademik berbasis *Digital Learning Ecosystem* (DLE), Transformasi Tatakelola UT-PTNBH dan Penguatan Budaya Kerja, Peningkatan Sarana dan Prasarana serta Pemanfaatan Aset sebagai *Revenue Generating*, Peningkatan Inovasi dan Reputasi, Peningkatan Peran Alumni, Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan, dan Target Kinerja serta Kerangka Pendanaan.

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT atas berkat rahmat-Nya, penyusunan Renstra Antara Tahun 2024 – 2025 dapat diselesaikan. Semoga Renstra Antara 2024 – 2025 dapat menjadi pedoman penyelenggaraan kegiatan tahunan UT sehingga lebih terarah dan akuntabel sehingga mampu merealisasikan pembangunan UT untuk mencapai integrasi jejaring *cyber university* pada 2025 serta semakin meningkatkan kualitas pendidikan dan layanan kepada masyarakat.

Tangerang Selatan, Desember 2023
Rektor,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized 'O' followed by a series of loops and a trailing line.

Prof. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D

DAFTAR ISI

SAMBUTAN REKTOR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR GRAFIK	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Kondisi Umum Universitas Terbuka	2
1.2 Potensi dan Permasalahan	10
a. Analisis Potensi	10
c. Analisis Lingkungan Eksternal dan Internal	28
BAB II VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS	34
2.1 Visi.....	34
2.2 Misi.....	34
2.3 Tujuan.....	35
2.4 Sasaran Strategis	35
BAB III ARAH KEBIJAKAN STRATEGIS, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	37
3.1 Arah Kebijakan Strategis.....	37
3.2 Kerangka Regulasi	41
3.3 Kerangka Kelembagaan	48
3.4 Reformasi Birokrasi	49
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	52
4.1 Target Kinerja	52
4.2 Kerangka Pendanaan	60
BAB V PENUTUP	64
LAMPIRAN	65

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Komposisi SDM UT	4
Tabel 1.2 Komposisi Dosen Berdasarkan Tingkat Pendidikan	5
Tabel 1.3 Komposisi Dosen Berdasarkan Jabatan Fungsional Dosen.....	6
Tabel 1.4 Komposisi PNS yang Memasuki Masa Pensiun Mulai 2019-2025	7
Tabel 1.5 Jumlah Lulusan Mahasiswa Triwulan III Tahun 2023	8
Tabel 1.6 Data IPK Mahasiswa Lulusan Triwulan Tahun 2023	9
Tabel 1.7 Total Dokumen Kerja Sama UT	26
Tabel 1.8 Analisis Internal Strategis.....	28
Tabel 1.9 Analisis Lingkungan Eksternal Strategis.....	29
Tabel 1.10 Analisis Kekuatan dan Kelemahan Faktor-faktor Strategis Internal	29
Tabel 2.1 Tujuan UT dan Tujuan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.....	35
Tabel 2.2 Tujuan dan Sasaran Strategis serta Indikator Sasaran Strategis Universitas Terbuka	36
Tabel 3.1 Arah Kebijakan Strategis, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Strategis UT... ..	40
Tabel 3.2 Regulasi yang Perlu Disusun dan Direvisi	44
Tabel 3.3 Area Perubahan Reformasi Birokrasi dan Kondisi yang Ingin Dicapai	49
Tabel 4.1 Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) UT	52
Tabel 4.2 Program Strategis dan Indikator Kinerja Program Strategis	54
Tabel 4.3 Indikasi Kebutuhan Pendanaan	60

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Perbandingan Komposisi SDM UT Tahun 2022 dan 2023	5
Gambar 1.2 <i>Culture Roadmap</i> UT 2022-2035	19
Gambar 1.3 Jumlah Lulusan UT Tahun 2018 – 2023	23
Gambar 1.4 Skema Strategi Sustainable Alumni <i>Connection</i>	25
Gambar 1.5 Matriks IE Universitas Terbuka.....	33
Gambar 3.1 Arah Kebijakan Strategis UT : <i>BRIGHT Open University</i>	39

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1 Kepuasan Pemangku Kepentingan	13
--	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pohon Kinerja Universitas Terbuka.....	67
Lampiran 2 Matriks Kinerja dan Pendanaan.....	68
Lampiran 3 Rumus Perhitungan IKSS	79
Lampiran 4 Rumus Perhitungan IKPS	94

BAB I

PENDAHULUAN

Universitas Terbuka (UT) merupakan Perguruan Tinggi Negeri yang menjadi pelopor Pendidikan Tinggi Jarak Jauh (PTJJ) dan memiliki karakteristik yang berbeda dengan pendidikan tinggi konvensional. UT didirikan dengan Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1984. Pada saat diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 4 September 1984, UT mengemban beberapa mandat yang meliputi: (1) menampung calon mahasiswa yang tidak lulus sistem penerimaan mahasiswa baru, (2) meneruskan Proyek Pendidikan Guru melalui belajar jarak jauh, serta (3) memberikan kesempatan lebih luas kepada masyarakat yang telah bekerja untuk meneruskan pendidikan di jenjang pendidikan tinggi.

UT telah diresmikan sebagai PTN-BH berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2022, tertanggal 20 Oktober 2022. Pengelolaan keuangan UT diatur sesuai dengan Peraturan Rektor, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 85 ayat (5) dari peraturan tersebut. Menurut Pasal 94 hingga Pasal 96, UT harus menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan yang sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik, dan menyusun akuntansi serta laporan keuangannya sesuai dengan standar akuntansi keuangan dari asosiasi profesi akuntansi Indonesia. Komite Audit bertugas melakukan pengawasan penyelenggaraan sistem akuntansi, evaluasi sistem pengendalian internal, dan audit atas laporan keuangan. Laporan tahunan UT, yang mencakup aspek akademik dan nonakademik, harus disampaikan oleh Rektor kepada Majelis Wali Amanat dan Menteri dalam waktu tiga bulan setelah akhir tahun buku, sementara laporan keuangan yang diaudit dikirimkan kepada Menteri dan menteri yang bertanggung jawab di bidang keuangan setiap tahun. Audit laporan keuangan tahunan dilakukan oleh akuntan publik yang ditetapkan oleh KA, dan hasilnya diumumkan kepada publik.

1.1 Kondisi Umum Universitas Terbuka

Universitas Terbuka memiliki 4 (empat) Fakultas dan 1 (satu) Sekolah Pascasarjana. Fakultas terdiri dari Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik (FHISIP), Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB), Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), dan Fakultas Sains dan Teknologi (FST). Pada tahun 2023, jumlah mahasiswa aktif UT sebanyak 608.076 mahasiswa yang tersebar di seluruh Indonesia dan 53 negara. Untuk memperluas daya jangkau dan akses layanan, UT memiliki 39 UT daerah, UT Luar Negeri, 73 Sentra Layanan UT (SALUT), serta 869 Kelompok Belajar (Pokjar) yang tersebar di seluruh Indonesia dan 16 Pokjar di luar negeri. Selain itu UT memimpin Konsorsium Pengembangan Lembaga Pendidikan Siber Indonesia (ICE Institute) yang beranggotakan 14 universitas terkemuka di Indonesia, yang saat ini memiliki 55 mitra dan menyediakan 165 pilihan mata kuliah daring berkualitas. UT telah menjalin kerja sama dengan berbagai mitra, seperti perguruan tinggi, non-perguruan tinggi, serta pemerintah pusat dan daerah di 515 kabupaten dan kota di Indonesia. Kondisi ini sejalan dengan misi UT dalam memperluas jangkauan dan meningkatkan kualitas layanan pendidikan di Indonesia.

Untuk mempertahankan perolehan pengakuan kualitas dari berbagai lembaga akreditasi dan sertifikasi, baik nasional maupun internasional, UT memiliki Kantor Penjaminan Mutu (KPM) yang bertugas sebagai pelaksana penjaminan mutu di lingkungan UT. Sistem penjaminan mutu yang diterapkan UT berupa Sistem Manajemen Mutu (SMM) telah memberikan dampak positif terhadap pengelolaan manajemen yang lebih berkualitas. Pengakuan terhadap kualitas UT diperoleh dari lembaga akreditasi nasional maupun internasional, seperti Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT), Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM), *International Organization for Standardization* (ISO), serta perolehan sertifikat sebagai penyelenggara Pendidikan Tinggi Terbuka dan Jarak Jauh (PTTJJ) dari *International Council for Open and Distance Education* (ICDE). Pada tahun 2023 UT memiliki 43 program studi (prodi) dengan jenjang Diploma sebanyak 2 prodi, Sarjana sebanyak 32 prodi, Magister sebanyak 7 prodi, dan 2 Program Doktor. Proporsi program studi yang memperoleh akreditasi A sebanyak 13 prodi (30,2%), B sebanyak 27 Prodi (62,8%), dan C (baik) sebanyak 3 Prodi (7%). Selain itu, UT juga memperoleh Akreditasi Perguruan Tinggi (APT) dengan peringkat B berdasarkan Surat Keputusan BAN-PT Nomor 367/SK/BAN-PT/Akred/PT/VI/2019.

Pada tahun 2019, UT berhasil mendapat kembali sertifikat *surveillance* ISO 9001:2015 lingkup Manajemen Pembelajaran Jarak Jauh (MPJJ) untuk 38 UT Daerah. Selain itu, komitmen dan konsistensi UT dalam meningkatkan kualitas akademik dibuktikan dengan diperolehnya sertifikat *surveillance* ISO 9001:2015 lingkup Manajemen Akademik (MA) untuk 34 program studi pada Maret 2017 serta diperoleh sertifikat ISO 27001:2013 pada Direktorat Sistem Informasi untuk menjamin sistem manajemen keamanan informasi di UT pada tahun 2021.

Pengakuan kualitas layanan pendidikan UT pada lingkup Internasional diperoleh dari ICDE pada tahun 2005, 2010, dan 2016. Untuk mempertahankan pengakuan tersebut, pada 25 Agustus 2020, UT memperoleh *Quality Certificate* dari ICDE untuk keempat kalinya. ICDE melakukan review kualitas terhadap UT dengan tujuan memastikan bahwa standar kualitas dan penyediaan layanan terhadap mahasiswa PTJJ terus dijaga dan ditingkatkan sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat. Diperolehnya sertifikat kualitas dari ICDE ini menunjukkan adanya pengakuan bahwa UT telah menyelenggarakan PTJJ sesuai dengan standar kualitas penyelenggaraan PTJJ di level internasional. Pengakuan lainnya yang diperoleh UT adalah pencapaian peringkat ke-513 di UI *GreenMetric World University Rankings* pada 5 Desember 2023 dan peringkat ke-46 di tingkat nasional pada tahun 2023.

Dalam kancah internasional, UT mendapat kepercayaan dari *Asian Association of Open Universities* (AAOU) dengan terpilihnya Rektor UT, Prof. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D sebagai Presiden AAOU periode 2020-2022 pada Konferensi AAOU ke-33 yang dilaksanakan di Pearl Continental Hotel, Lahore, Pakistan dan Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, Kerja Sama dan Bisnis, Rahmat Budiman, M.Hum., Ph.D. sebagai Sekretaris Jenderal AAOU.

Dalam rangka mengoptimalkan efisiensi dan akurasi dalam proses pengambilan keputusan oleh pimpinan melalui penyediaan laporan eksekutif yang komprehensif, mulai tahun 2022 UT telah mengimplementasikan sistem informasi tata kelola terintegrasi yang disebut Sistem Informasi Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban Keuangan (SIPPP). SIPPP merupakan inovasi dalam pengelolaan dan integrasi sumber daya menggunakan konsep *Enterprise Resource Planning* (ERP) berbasis arsitektur *microservices*. SIPPP mengintegrasikan modul-modul aplikasi seperti 'Panutan' untuk naskah dinas dan administrasi perkantoran, '*e-Budgeting*' untuk penganggaran keuangan, '*e-Procurement*' untuk pengadaan barang dan jasa, serta berbagai sistem lain termasuk '*Executive Information System (EIS)*' untuk sistem informasi pendukung pengambilan keputusan bagi manajemen, 'SI-Akun'

untuk Sistem Informasi Akuntansi berbasis Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK 35), 'e-Asset' untuk Sistem Informasi Penatausahaan Barang Milik UT, 'e-Sign' untuk layanan tandatangan elektronik, 'e-Expenditure' untuk sistem informasi realisasi anggaran dan belanja, dan 'User Management' untuk sistem manajemen aplikasi dan pengguna. Selain itu, sistem ini juga mencakup modul 'E-HR & Payroll' untuk sistem informasi kepegawaian dan penggajian, serta sedang mengembangkan 'E-Revenue', 'e-Manajemen Risiko' untuk sistem informasi manajemen risiko, dan 'E-BPPU' untuk sistem informasi manajemen tata kelola bisnis dan usaha UT. SIPPP dengan pendekatan terintegrasi dan teknologi canggih menjanjikan peningkatan signifikan dalam efisiensi dan efektivitas manajemen di berbagai sektor.

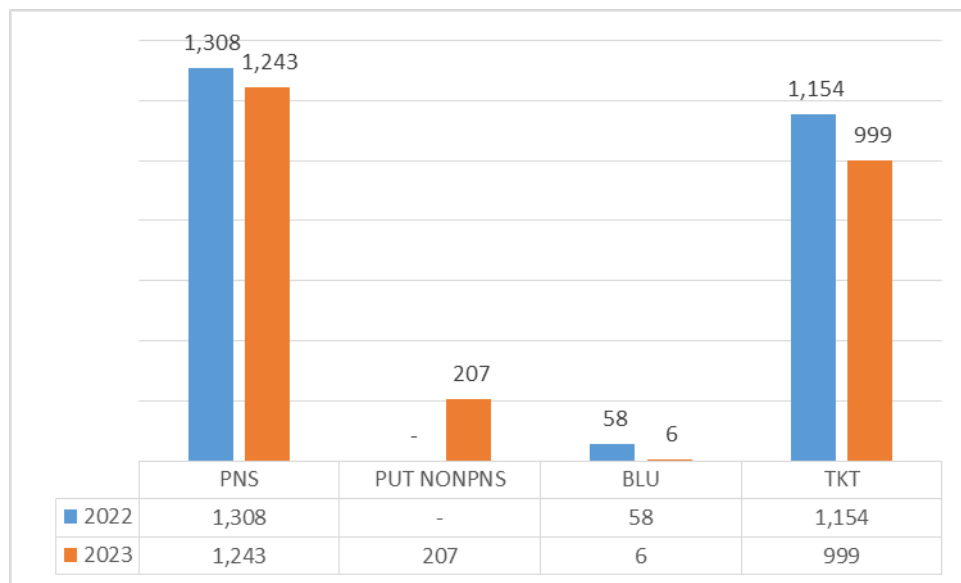
Dalam aspek sumber daya manusia, pegawai UT adalah PNS dan non PNS yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya di UT. PNS di UT terdiri dari dosen dan tenaga kependidikan yang secara keseluruhan jumlah PNS UT sampai dengan 30 September 2023 sebanyak 2.455. Selain tenaga PNS, UT juga memiliki tenaga non PNS yaitu tenaga Badan Layanan Umum (BLU), tenaga Pegawai UT Tetap Non PNS (PUT NONPNS), tenaga Pegawai UT Tetap Perjanjian Kinerja (PUT PK), dan Tenaga Kontrak Tahunan (TKT) Administrasi dan Non Administrasi seperti pengemudi, tenaga kebersihan, dan teknisi bangunan yang tidak dapat dilakukan dengan cara *outsourcing*. Tenaga BLU UT sebanyak 6 orang yang terdiri 1 orang dosen dan 5 tenaga kependidikan. Tenaga PUT NONPNS sebanyak 207 orang yang terdiri dari 6 orang dosen dan 201 orang tenaga kependidikan. Tenaga kontrak yang terdiri dari PUT PK dan TKT sebanyak 999 orang yakni tenaga pendidik 37 orang dan tenaga administrasi 475 orang, serta TKT Non Administrasi sebanyak 487 orang. Adapun komposisi Sumber Daya Manusia UT tampak pada tabel berikut.

Tabel 1.1 Komposisi SDM UT

Lokasi Kerja	PNS		PUT NONPNS		PUT PK		BLU		TKT			Jumlah
	Dosen	Adm	Dosen	Adm	Dosen	Adm	Dosen	Adm	Dosen	Adm	Non Adm	
Pusat	379	300	5	92	10	10	1	0	26	234	34	1.091
UT Daerah	280	284	1	109	0	8	0	5	1	223	453	1.364
Jumlah	659	584	6	201	10	18	1	5	27	457	487	2.455 (100%)
	1.243 (50,63%)		207 (8,43%)		28 (1,14%)		6 (0,24%)		971 (39,55%)			

Data per 30 September 2023

Perkembangan komposisi SDM UT dibanding kondisi 2022, untuk jumlah PNS mengalami penurunan dari 1.308 orang menjadi 1.243 orang (penurunan sebanyak 65 orang atau 4,97%). Jumlah BLU mengalami penurunan dari 58 orang menjadi 6 orang (penurunan sebanyak 52 orang atau 89,66%). Jumlah TKT mengalami penurunan dari 1.154 orang menjadi 999 orang (penurunan sebanyak 155 orang atau 13,43%). Penurunan PNS dikarenakan terdapat pegawai yang pensiun, meninggal, dan lainnya sementara penurunan BLU dan TKT dikarenakan pada triwulan III tahun 2023 terdapat peralihan status beberapa pegawai menjadi PUT NONPNS.



Gambar 1.1 Perbandingan Komposisi SDM UT Tahun 2022 dan 2023

Dosen UT yang telah bergelar doktor sampai dengan 30 September 2023 sebanyak 181 dosen (25,75%) dari total dosen 703 dosen. Jumlah ini bertambah 12 orang dosen atau 7,10% dibandingkan pada tahun 2022 sebanyak 169 orang dosen. Gambaran dosen UT berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.2 Komposisi Dosen Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Lokasi	Pendidikan Terakhir		Jumlah
	S-3	S-2	
PNS:			
UT Pusat	134	245	379
UT Daerah	25	255	280
Jumlah PNS	159	500	659
BLU:			

Lokasi	Pendidikan Terakhir		Jumlah
	S-3	S-2	
UT Pusat	-	1	1
UT Daerah	-	-	0
Jumlah BLU	0	1	1
PUT NONPNS			
UT Pusat	1	4	5
UT Daerah	1	-	1
Jumlah PUT NONPNS	2	4	6
PUT PK			
UT Pusat	8	2	10
UT Daerah	-	-	0
Jumlah PUT PK	8	2	10
PTNPN:			
UT Pusat	11	15	26
UT Daerah	1	-	1
Jumlah PTNPN	12	15	27
Jumlah	181 (25,75%)	522 (74,25%)	703 (100%)

Data per 30 September 2023

Gambaran dosen UT berdasarkan jabatan fungsional pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.3 Komposisi Dosen Berdasarkan Jabatan Fungsional Dosen

Lokasi	Jabatan Fungsional					Jumlah
	Tenaga Pengajar	Asisten Ahli	Lektor	Lektor Kepala	Profesor	
PNS						
Pusat	6	96	172	86	19	379
UT Daerah	1	50	189	37	3	280
Total PNS	7	146	361	123	22	659
PUT NONPNS						
Pusat	0	3	2	0	0	5
UT Daerah	0	0	0	0	1	1
Total PUT NONPNS	0	3	2	0	1	6
PUT PK						
Pusat	2	0	0	4	4	10
UT Daerah	0	0	0	0	0	0
Total PUT PK	2	0	0	4	4	10
BLU						
Pusat	0	1	0	0	0	1
UT Daerah	0	0	0	0	0	0
Total BLU	0	1	0	0	0	1
PTNPNS						
Pusat	1	12	13	0	0	26

Lokasi	Jabatan Fungsional					Jumlah
	Tenaga Pengajar	Asisten Ahli	Lektor	Lektor Kepala	Profesor	
UT Daerah	1	0	0	0	0	1
Total PTNPNS	2	12	13	0	0	27
Total	11 (1,56%)	162 (23,04%)	376 (53,49%)	127 (18,07%)	27 (3,84%)	703 (100%)

Data per 30 September 2023

Jumlah dosen PNS dengan kualifikasi Lektor Kepala sampai dengan 30 September 2023 sebanyak 127 dosen (18,07%) dari total dosen sebanyak 703 dosen. Terdapat penambah 1 orang dosen (0,79%) dibanding pada tahun 2022 sebanyak 126 dosen. Jumlah Guru Besar (Profesor) sebanyak 27 orang (3,84%) dari total dosen sebanyak 703 dosen, terdapat kenaikan 3 orang dosen (13%) dibanding tahun 2022 sebanyak 24 dosen.

Mulai tahun 2019 jumlah PNS dosen dan tenaga kependidikan yang memasuki masa purna bakti terus bertambah. Data PNS yang memasuki masa pensiun mulai dari tahun 2019–2025 dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 1.4 Komposisi PNS yang Memasuki Masa Pensiun Mulai 2019-2025

STATUS SDM	TAHUN						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
PNS							
Tenaga Pendidik	38	71	78	75	59	48	26
Tenaga Kependidikan	22	29	42	39	46	43	40
Total PNS	60	100	120	114	105	91	66

Data per 30 September 2023

Untuk mengganti PNS yang pensiun dan memenuhi kebutuhan SDM di unit, UT menerima PNS yang pindah dari instansi lain, baik untuk dosen maupun tendik. Pada tahun 2023 UT berencana menambah pegawai dalam rangka mengganti/menjaga kekosongan pegawai PNS UT yang memasuki purnabakti sebanyak 105 orang dengan penambahan sebanyak 164 orang ASN yang terdiri dari 161 orang PNS dan 3 orang PPPK. Selain PNS, BLU Non PNS, PTNPNS dan TKT, UT juga mempekerjakan tenaga harian lepas (THL) dan tenaga *outsourcing* pihak ketiga untuk membantu pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pegawai UT.

Dalam Laporan Keuangan tahun 2022, realisasi pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp1.342 triliun, melampaui target pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp 982 miliar dengan produktivitas 136,68%. Sumber utama pendapatan UT saat ini adalah berasal

dari Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) dari mahasiswa, sehingga UT perlu meningkatkan pendapatan yang bersumber dari non-SPP.

Sebagai upaya pengendalian internal yang dilakukan untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi keuangan, UT mengoptimalkan fungsi dan tugas Kantor Pengawas Internal (KPI) dalam mengaudit keuangan internal UT. KPI telah memanfaatkan Sistem Informasi Audit Internal SPI (SIAIS) dalam melaksanakan tugas pengawasan non akademik yang meliputi manajemen audit, monitoring, dan pengawasan lainnya. Dalam rangka menunjang integrasi sistem dan aplikasi tata kelola di lingkungan UT, pada tahun 2023 telah dilakukan asesmen untuk persiapan integrasi SIAIS dengan aplikasi SIPPP melalui pembentukan modul *e-audit*.

Pada aspek lulusan, UT telah menghasilkan lulusan Program Diploma, Sarjana, Pascasarjana, dan Profesi. Jumlah lulusan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) sebanyak 240,1 ribu alumni, diikuti oleh Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FHISIP) dengan 48,3 ribu alumni, Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) dengan 36,8 ribu alumni, dan Sekolah Pascasarjana (SPs) serta Fakultas Sains dan Teknologi (FST) yang masing-masing sebesar 2,4 ribu alumni. Pada penutupan tahun 2022, jumlah total alumni UT telah mencapai angka 2.000.485 lulusan, dengan proporsi lulusan dari FKIP sebesar 74%.

Pada tahun 2023 Universitas Terbuka meluluskan mahasiswa yang mengikuti program pendidikan Sarjana PGSD dan PGPAUD FKIP, program Diploma dan Sarjana dari FEB, FHISIP, FST dan FKIP, serta program Pascasarjana. Mahasiswa yang dinyatakan lulus berdasarkan dengan SK Yudisium pada triwulan III tahun 2023 sebanyak 37.580 mahasiswa, yang terdiri dari mahasiswa program pendidikan Sarjana PGSD dan PGPAUD FKIP (Pendas), Program Diploma dan Sarjana FE, FHISIP, FST, dan FKIP (Non-Pendas) sebanyak 37.312 serta Program Pascasarjana sebanyak 268 mahasiswa. Rincian jumlah mahasiswa lulusan dan keberhasilan indeks prestasi kumulatif mahasiswa dapat dilihat masing-masing pada Tabel berikut.

Tabel 1.5 Jumlah Lulusan Mahasiswa Triwulan III Tahun 2023

No.	Program Pendidikan	Jumlah Lulusan	Rata-Rata Masa Studi (Tahun)	Rata-Rata IPK
1	Magister (S-2)	268	4,0	3,89
2	Sarjana (S-1)	36.730	4,7	3,29
3	Diploma Empat (D-IV)	122	5,2	3,12
4	Diploma Tiga (D-III)	460	3,3	3,50

No.	Program Pendidikan	Jumlah Lulusan	Rata-Rata Masa Studi (Tahun)	Rata-Rata IPK
5	Diploma Dua (D-II)	-	-	-
	Total	37.580		

Data per 30 September 2023

Tabel 1.6 Data IPK Mahasiswa Lulusan Triwulan Tahun 2023

No.	Data IPK Mahasiswa	Tahun 2023		
		Diploma	Sarjana	Pasca Sarjana
1	≤ 2.50	6 (0,02%)	2.501 (6,66%)	-
2	2.51 - 2.75	7 (0,02%)	1.800 (4,79%)	-
3	2.76 - 3.00	17 (0,05%)	3.135 (8,34%)	-
4	3.01 - 3.50	168 (0,45%)	16.534 (44%)	9 (0,02%)
5	≥ 3.51	262 (0,70%)	12.882 (34,28%)	259 (0,69%)
	Jumlah	460 (1,22%)	36.852 (98,06%)	268 (0,71%)
		37,580 (100%)		

Data per 30 September 2023

Sebagai perguruan tinggi terbuka dan jarak jauh, Universitas Terbuka (UT) memiliki keunikan dalam operasional dan manajemen pendidikannya yang berbeda dari perguruan tinggi tatap muka konvensional. Karakteristik utama dari Perguruan Tinggi Terbuka (PTTJJ) terletak pada pemisahan fisik antara dosen dan mahasiswa selama proses pembelajaran, yang menghasilkan pendekatan manajemen yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini mengakibatkan tantangan yang spesifik dan berbeda dalam pengelolaan operasional, seperti perluasan akses pendidikan, peningkatan kualitas materi pembelajaran, serta adaptasi dengan teknologi informasi yang berubah dengan cepat. Tantangan ini termasuk dalam penyesuaian kurikulum dan metodologi pembelajaran agar sesuai dengan dinamika Revolusi Industri 4.0 dan kebutuhan pasar kerja yang terus berkembang.

Dengan status PTN-BH, UT mendapat kesempatan untuk lebih otonom, responsif dan inovatif dalam menghadapi tantangan tersebut. Namun, hal ini juga memerlukan strategi yang efektif untuk mengatasi berbagai tantangan internal dan eksternal, seperti terpusatnya sumber pendanaan dari SPP dan kebutuhan peningkatan infrastruktur TIK. Dalam menghadapi persaingan dengan lembaga pendidikan lain yang menawarkan PJJ, perubahan kebijakan pendidikan, ancaman keamanan data, dan cepatnya perubahan lingkungan strategis, UT harus

terus berinovasi dan beradaptasi. Keberhasilan UT dalam menanggapi tantangan ini akan menentukan relevansi dan keberlanjutannya dalam menyediakan akses pendidikan tinggi yang berkualitas di Indonesia.

1.2 Potensi dan Permasalahan

a. Analisis Potensi

Capaian kinerja UT diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kemendikbudristek dan RPJP UT Tahun 2021-2035. Capaian kinerja UT mencerminkan relevansi antara target *outcome* saat ini dengan rencana tahap selanjutnya dalam rangka upaya mencapai target Renstra 2024-2025 sebagai masa peralihan UT dari BLU menjadi PTNBH. UT sebagai PTNBH dalam mencapai target perlu memanfaatkan potensi yang ada secara optimal untuk pengembangan dan perbaikan secara berkelanjutan. Beberapa hal yang menjadi perhatian UT adalah bagaimana selalu melakukan peningkatan kualitas dan daya tampung akses pendidikan, karya akademik yang berkualitas dan relevan dalam menyelesaikan masalah dan pembangunan nasional, upaya meningkatkan daya saing global, peningkatan sumber daya, dan tata kelola yang lebih baik. Beberapa potensi UT yang perlu dimanfaatkan lebih lanjut meliputi daya jangkauan pelayanan pendidikan, jejaring mahasiswa dan alumni yang luas, jejaring kerjasama, pengalaman dalam penyelenggaraan pendidikan terbuka dan jarak jauh, kemampuan dalam memenuhi standar global dalam pendidikan jarak jauh, memiliki sumber daya manusia yang mumpuni dan berpengalaman dalam manajemen pendidikan jarak jauh, penggunaan teknologi pembelajaran pada tingkat lanjut, serta memiliki reputasi yang kuat dalam hal penyelenggara pendidikan jarak jauh di tingkat nasional dan internasional.

UT juga memiliki potensi yang kuat dalam upaya meningkatkan akses pendidikan tinggi bagi seluruh lapisan masyarakat dengan daya jangkauan layanan yang terluas di berbagai wilayah Indonesia melalui keberadaan kantor UT Daerah serta didukung SALUT dan Pokjar. Hal ini tentu tidak dimiliki oleh perguruan tinggi manapun di Indonesia dengan pelayanan 39 UT Daerah yang tersebar di berbagai propinsi. Tentunya kantor pelayanan ini juga didukung dengan sumber daya manusia yang memiliki pengalaman dalam penyelenggaraan pendidikan jarak jauh yang sudah dijalankan selama bertahun-tahun.

Untuk memastikan daya saing di pasar global dan kualitas lulusan, UT memiliki potensi pengalaman yang kuat dalam pendidikan terbuka dan jarak jauh dengan memiliki jejaring

global dan berbagai mitra lainnya. Potensi ini masih dapat dikembangkan lebih lanjut dalam memperkuat kompetensi dan kualifikasi sumber daya manusianya untuk mendukung statusnya sebagai *World Class University* sesuai perkembangan yang ada. Dalam memperluas jejaring global, UT juga aktif dalam berbagai forum perguruan tinggi jarak jauh secara Internasional serta keterlibatan pimpinan UT dalam berbagai forum dan organisasi tingkat dunia. Upaya ini sudah memperlihatkan hasil melalui produktivitas karya akademik di bidang pendidikan terbuka jarak jauh untuk kemajuan pendidikan di Indonesia maupun pengembangan keilmuan melalui karya akademik yang berkontribusi pada pembangunan nasional dan mengatasi isu-isu global.

Pengalaman yang panjang dalam melayani pendidikan jarak jauh secara luas dan terbiasa dalam melakukan kerjasama dengan berbagai mitra, UT berpotensi untuk mengembangkan proses pendidikan yang bertujuan dalam menghasilkan lulusan yang tidak hanya kompeten secara akademis tetapi juga memiliki karakter dan keterampilan yang diperlukan untuk bersaing secara global. Pengalaman UT dengan kapabilitas pengembangan kurikulum dan proses pengajaran berbasis ilmu pengetahuan dan penelitian selalu berkembang mengikuti perkembangan zaman dan teknologi, menjadikan UT sebagai perguruan tinggi yang dapat melakukan peningkatan kualitas lulusan secara berkelanjutan bersamaan dengan meningkatnya tata kelola *good university governance*.

Keberadaan UT dengan kondisi yang dijelaskan di atas membuat UT memberanikan diri dalam menetapkan tema sasaran strategis utama pada tahap pengembangan pertamanya, yaitu integrasi *Jejaring Cyber University*. Keberhasilan integrasi jejaring *cyber university* pada bidang pendidikan dapat dilakukan melalui program pendidikan yang berkualitas secara nasional, kurikulum pendidikan yang menggunakan teknologi Revolusi Industri 4.0 dan *Society 5.0* dalam setiap proses pembelajaran dan reanalisis kurikulum serta penyusunan kurikulum baru dengan mempertimbangkan kepentingan dari berbagai *stakeholder*, penyediaan bahan ajar yang interaktif dengan menggunakan teknologi terbaru berfokus pada *student-centered*.

Dalam upaya meningkatkan kualitas dan reputasi institusi, optimalisasi fungsi *alumni capital* menjadi salah satu aspek penting potensi yang bisa digunakan UT dalam berkembang. UT memiliki banyak alumni yang berkarier di berbagai bidang dan posisi penting. Para alumni ini dapat berperan dengan meyakinkan masyarakat luas bahwa lulusan UT merupakan lulusan yang berkualitas. Selain itu alumni UT yang sukses juga dapat menjadi inspirasi untuk

mahasiswa UT yang akan menjadi generasi penerus. Selain berkontribusi dalam membangun reputasi, dukungan proses pembelajaran serta penelitian dan pengabdian masyarakat, tentunya UT juga berharap para alumni bisa berkontribusi dari segi finansial dengan memberikan beasiswa bagi mahasiswa UT.

Potensi lain yang dimiliki UT adalah terkait dengan manajemen mutu yang telah diterapkan mendahului perguruan tinggi lainnya karena keunikan “proses bisnis” dan membutuhkan diberlakukannya standarisasi. Kebijakan institusi menetapkan parameter dan kriteria yang harus dicapai dalam perencanaan, proses, dan standar harus dicapai dan dilanjutkan dengan tindakan pengendalian. Pelaksanaan dan pengendalian standar ini dilakukan melalui proses evaluasi pelaksanaan dan pencapaian standar dengan kegiatan audit mutu internal maupun eksternal. Pengendalian lebih lanjut dilakukan melalui kegiatan tindak lanjut hasil audit yang bertujuan meningkatkan konsistensi penerapan dan capaian standar. Penyelarasan kebijakan ini termasuk meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan serta pengelolaan institusi secara desentralistik dengan kecakapan kelembagaan. Ini juga berkaitan dengan keberhasilan menjalankan *roadmap human capital* dan transformasi digital sistem manajemen infrastruktur.

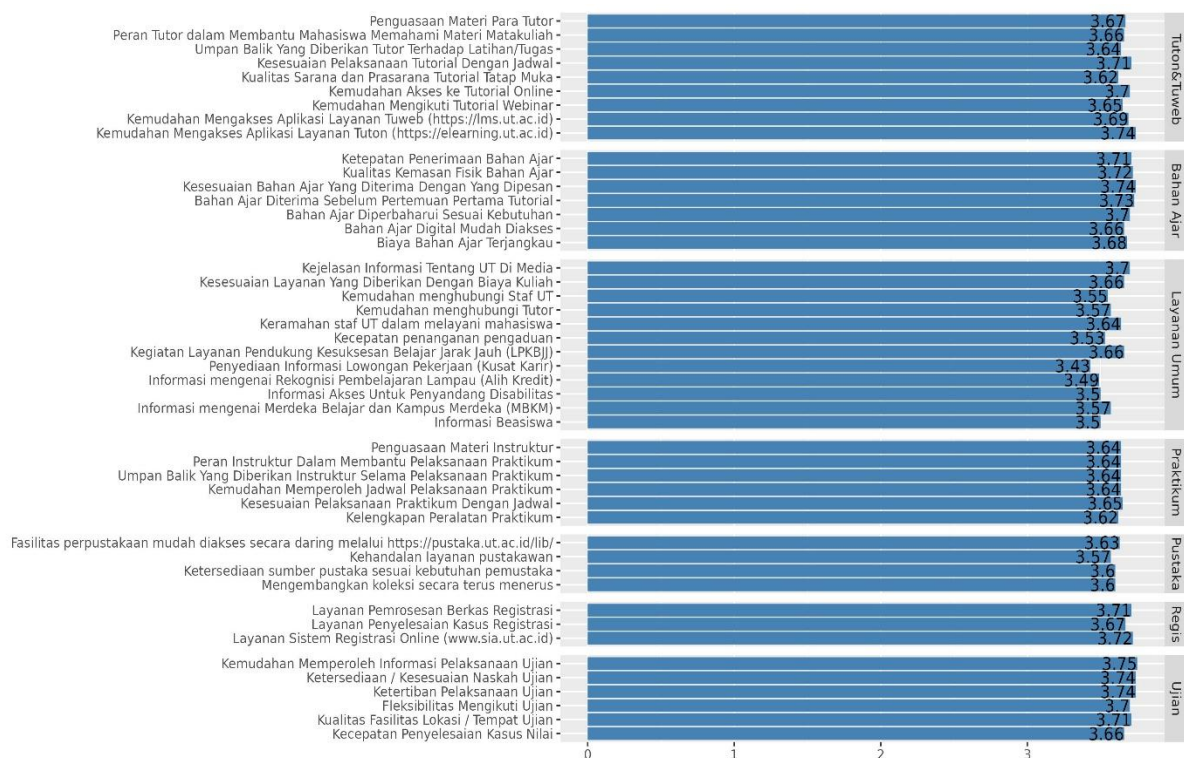
Dalam hal pengelolaan dana, integrasi sistem tata kelola dilakukan dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, serta efektivitas, efisiensi, dan ekonomi (3E). Infrastruktur TIK dikembangkan dan diperkuat secara terintegrasi untuk mendukung tridharma dan *stakeholder*. Riset dan pengembangan infrastruktur TIK menggunakan teknologi terbaru untuk memperkuat posisi UT sebagai *Cyber University*, meningkatkan ketahanan UT, kompetensi dan kualifikasi SDM, serta penguatan ekosistem pendidikan dengan teknologi ramah lingkungan dan responsif gender. Investasi dana juga diperkuat melalui instrumen yang *profitable*, serta diversifikasi pendanaan sektor usaha dan peningkatan jumlah *revenue generating activities* (RGAs). Semua hal tersebut dibangun dalam jangka waktu yang cukup panjang dan sekarang menjadi potensi yang dapat mendukung UT untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya keuangan.

Sejak berdiri UT menjalankan pembinaan sumber daya manusia sesuai dengan karakteristik organisasi UT sebagai perguruan tinggi terbuka jarak jauh. Selain kompetensi, dibutuhkan SDM yang berkomitmen terhadap pencapaian pendidikan berkualitas tinggi yang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat merupakan hal yang mesti dipenuhi. Peningkatan standar didasarkan pada umpan balik dari penerima manfaat layanan dan program yang

diberikan. Kurikulum era digital disesuaikan dengan masukan pemangku kepentingan, dengan desain pembelajaran dan bahan ajar yang interaktif dan inovatif. Perencanaan dan pemenuhan kebutuhan SDM modern menjadi penting, bersama dengan peningkatan kepercayaan terhadap pemangku kepentingan UT, peningkatan publikasi nasional dan internasional, serta penguatan kolaborasi penelitian secara nasional dan internasional. Penguatan sistem pengelolaan penelitian, peningkatan kolaborasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat, dan program pemberdayaan masyarakat berbasis teknologi juga menjadi fokus utama.

Potensi UT di atas sudah menghasilkan beberapa capaian sehingga dapat dirasakan Masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari persepsi masyarakat terhadap keberadaan UT sebagai PTN yang menyelenggarakan pendidikan kepada masyarakat melalui hasil pengukuran kepuasan terhadap UT. Rata-rata kepuasan UT adalah 3,65 dari skala 1-4, yang artinya masyarakat merasa mendapatkan apa yang diharapkan dari proses pembelajaran UT yang pada gilirannya tentu tertarik untuk menempuh pendidikan di UT. Berikut adalah skor kepuasan terhadap pendidikan di UT.

Grafik 1.1 Kepuasan Pemangku Kepentingan



Sumber: Pusat Riset dan Inovasi, 2023

b. Analisis Permasalahan

Berdasarkan evaluasi kinerja UT, terdapat beberapa permasalahan yang menjadi tantangan UT dalam mewujudkan visi menjadi perguruan tinggi jarak jauh yang berkualitas dunia. Permasalahan ini akan dibahas berdasarkan bidang program kerja yang dijalankan UT sebagai berikut.

1) Kualitas Lulusan yang Berkarakter dan Memiliki Daya Saing Global

Pada tahun 2023, UT memiliki mahasiswa aktif sebanyak 608.076 mahasiswa yang tersebar di seluruh Indonesia dan berdomisili di 53 negara di luar negeri. Peningkatan tren jumlah mahasiswa tentunya memerlukan strategi untuk menjaga dan meningkatkan kualitas lulusan yang memiliki daya saing baik di tingkat nasional atau global. Kondisi ini merupakan permasalahan sekaligus tantangan bagi UT karena terjadi peningkatan yang signifikan dalam hal jumlah mahasiswa yang harus dilayani. Selain melakukan pemutakhiran kurikulum secara berkala, UT harus melakukan penyesuaian juga terhadap keragaman karakteristik mahasiswa yang harus terwujud dalam pemutakhiran dan keragaman bahan ajar menyesuaikan pada profil mahasiswa yang diterima. Begitu juga dengan peningkatan kualitas praktik/praktikum dengan sebaran mahasiswa yang lebih luas dibanding sebelumnya. Beban layanan akademik dan layanan bantuan belajar (tutorial) termasuk pemutakhiran kit tutorial, bahan tutorial, dan kualitas tutor menjadi hal yang lebih kompleks dibandingkan sebelumnya. Sistem ujian perlu dikembangkan sehingga dapat mengatasi keterbatasan fasilitas ujian terutama kebutuhan jumlah lokasi ujian dan jumlah pengawas yang semakin banyak yang tidak mudah dalam pengelolaannya.

Selain itu, UT mendukung program dan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam memberikan pendidikan berkualitas yang bersifat inklusif dan menjangkau seluruh tanah air. Pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang terbuka bagi siapa saja, dengan latar belakang berbeda, serta kondisi yang berbeda pula. UT berupaya mewujudkan pemenuhan layanan pendidikan tinggi bagi mahasiswa bagi penyandang disabilitas dan mahasiswa yang berasal dari daerah 3T (Terluar, Terdepan dan Tertinggal). Saat ini jumlah mahasiswa UT dengan disabilitas mencapai 508 mahasiswa yang tersebar di 28 Propinsi. Jenis disabilitas yang paling banyak adalah tunadaksa 220 mahasiswa, tunanetra 119, tunarungu 83, tunagrahita 36, tunawicara 25, tunalaras 19 dan tuna ganda 6. Kebijakan UT untuk mendukung layanan pembelajaran untuk mahasiswa disabilitas diantaranya adalah pengembangan bahan

ajar khusus untuk penyandang disabilitas tunanetra. Permasalahan yang dihadapi oleh UT saat ini belum optimalnya infrastruktur, sarana, dan prasarana untuk melayani semua tipe disabilitas. Begitu juga dengan pelayanan mahasiswa yang berada di wilayah 3T yang tidak memadai dalam hal jaringan teknologi serta akses secara geografis.

2) Ketersediaan SDM

Kebutuhan SDM yang sesuai dengan karakteristik pembelajaran UT menjadi perhatian secara kualitas dan kuantitas. Peningkatan jumlah mahasiswa dan sebaran lokasi mahasiswa masih tetap menjadi permasalahan yang mesti diselesaikan. Kebutuhan SDM ini meliputi tenaga pendidik/dosen dan kependidikan serta ketersediaan tutor untuk menjalankan proses kegiatan tutorial yang jumlah kelasnya semakin meningkat. Untuk kebutuhan dosen, saat ini UT perlu segera memenuhi kebutuhan pada beberapa prodi yang ada serta prodi baru yang akan dibuka. Selain standar strata pendidikan juga diperlukan pengembangan persyaratan jenjang fungsional yang saat ini tentunya tidak mudah untuk dipenuhi. Begitu juga dengan kompetensi dosen untuk menjalankan proses pembelajaran jarak jauh yang tidak bisa didapat dari perguruan tinggi konvensional sehingga memerlukan program pengembangan yang harus dilakukan. Begitu juga dengan kebutuhan tenaga kependidikan yang saat ini sebagian besar dijadikan sebagai tenaga fungsional pada beberapa bidang yang membutuhkan sertifikasi kompetensi tertentu. Beberapa dari kompetensi tersebut perlu dikembangkan program khusus oleh UT karena tidak semua kompetensi tersebut tersedia secara umum.

Peningkatan kebutuhan tutor pada tahap perkembangan UT saat ini akan menjadi permasalahan tersendiri karena sebagian besar tutor yang bertugas merupakan tenaga pendidik yang berasal dari luar UT. Dengan jumlah kelas saat ini UT masih mengalami kesulitan untuk melakukan pemantauan terhadap proses tutorial untuk mengatasi kelemahan yang dimiliki beberapa tutor dalam menjalankan tugasnya. Meski sudah melalui pelatihan, seringkali terdapat kelemahan pelaksanaan tutorial yang dilaksanakan oleh tutor tersebut. Kondisi ini memerlukan peningkatan pola pembinaan dan pengendalian yang tepat.

3) Layanan Akademik dan Non Akademik berbasis *Digital Learning Ecosystem* (DLE)

Dalam rangka mendukung pengembangan UT sebagai *Cyber-University* dan mewujudkan UT sebagai institusi strategis pengembangan inovasi pendidikan tinggi berbasis TIK, langkah penting yang telah dilakukan oleh UT adalah mengintegrasikan visi dan misi UT dengan seluruh bisnis proses layanan pembelajaran, aplikasi, teknologi, dan peta jalan sehingga

pengembangan UT kedepan memiliki dasar dan arah yang kuat, melalui pengembangan *Enterprise Architecture* UT yang disebut dengan *Digital Learning Ecosystem Architecture* UT.

DLE *architecture* merupakan cetak biru organisasi yang menyelaraskan visi dan misi organisasi, serta proses bisnis (*business architecture*) dengan teknologi informasi dalam perspektif data (*data architecture*), aplikasi (*application architecture*) dan teknologi (*technology architecture*). Implementasi DLE *architecture* telah dilakukan pada hampir seluruh unit di UT, beberapa pengembangan sistem dan aplikasi yang telah dilakukan diantaranya adalah pengembangan dan penyempurnaan 1) aplikasi kemahasiswaan (My UT), 2) fitur aplikasi SRS 5G, 3) aplikasi Simpenmas (Penelitian, PkM, seminar, HKI), 4) aplikasi bahan ajar terpadu, 5) aplikasi Ujian, 6) aplikasi pembelajaran, 7) aplikasi Penjaminan Mutu Internal dan Eksternal, dan 8) aplikasi perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban (SIPPP). Mewujudkan semua hal tersebut tentunya memerlukan dukungan infrastruktur, kesiapan organisasi, serta ketersediaan SDM dengan kompetensi yang mumpuni.

Infrastruktur yang harus tersedia agar terwujudnya layanan akademik berbasis DLE adalah memastikan jaringan internet pada semua wilayah dan akses semua mahasiswa dalam layanan tersedia dengan baik. UT perlu mempersiapkan solusi dalam mengatasi kendala yang dihadapi mahasiswa dalam mengakses jaringan, sehingga layanan akademik dan non akademik berbasis DLE dapat dimanfaatkan dengan baik.

Kesiapan organisasi dalam mengimplementasikan layanan akademik dan non akademik berbasis DLE sangat diperlukan baik secara kompetensi, proses bisnis, kemampuan adaptasi, dan penciptaan nilai baru yang selaras dengan penggunaan teknologi. Untuk itu diperlukan program yang terintegrasi dengan pengembangan SDM dan peta jalan pengembangan teknologi UT. Tantangan selanjutnya adalah bagaimana untuk mengembangkan instrumen dan melakukan pengukuran kematangan digital yang sesuai dengan rancangan yang disusun oleh UT.

4) Penguatan Tata Kelola UT-PTNBH dan Budaya Kerja

Saat ini, UT memastikan pelaksanaan tata kelola berstandar tinggi, efektif dan efisien. Struktur PTN-BH dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2022 Tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Terbuka dan Peraturan Rektor UT Nomor 1151 tahun 2022 serta Peraturan Rektor Nomor 1311 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja UT. Secara umum organisasi UT dibentuk untuk membantu Rektor dalam menjalankan fungsinya. Pengembangan organisasi terus dilakukan untuk menghasilkan struktur yang lebih

dinamis dan adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis UT. Struktur organisasi UT dibentuk menggunakan model *slim and flat* yang kaya akan fungsi untuk meningkatkan efisiensi waktu dan koordinasi, biaya akses layanan, serta mengurangi adanya tumpang tindih koordinasi. Meskipun sudah memiliki dasar hukum dan konsep yang jelas dalam mengembangkan tata kelola UT yang mengacu pada strategi yang sedang dan akan dijalankan namun membutuhkan dukungan jalannya struktur organisasi yang tepat serta budaya kerja yang sesuai. Struktur dan budaya ini secara dinamis dan berkelanjutan perlu disesuaikan untuk mengikuti perkembangan lingkungan yang berdampak pada strategi.

Struktur organisasi UT saat ini sudah jalan dalam bentuk yang baru, sebagai salah satu langkah dalam peralihan dari BLU menjadi PTNBH. Perubahan ini tentu membawa persoalan dan masalah bagi manajemen UT seperti penyesuaian terhadap beberapa proses perencanaan, prosedur dan koordinasi kerja, perubahan tim kerja, penyesuaian kompetensi dan perilaku kerja personil yang ditempatkan pada fungsi dan unit berbeda serta aspek implementasi lainnya. Ini perlu menjadi perhatian bagi UT karena perubahan struktur ini bukan saja terjadi saat ini, namun tidak dapat dihindari seandainya setelah peralihan ini akan terdapat berbagai perubahan strategi UT untuk tumbuh. Perubahan strategi dan mengadaptasi perubahan lingkungan ini pada level tertentu tentu akan disusul dengan penyesuaian kembali terhadap struktur UT.

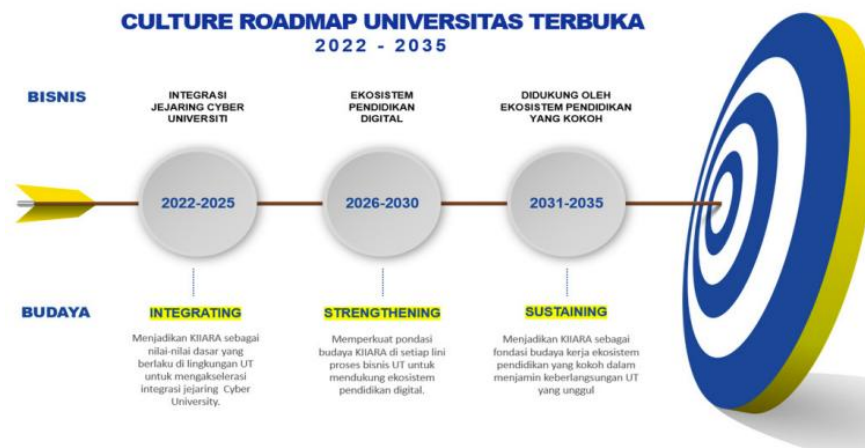
Keberhasilan UT dalam implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) dipengaruhi oleh efektivitas peran dan fungsi struktur organisasi. Prinsip-prinsip GCG yang meliputi transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), tanggung jawab (*responsibility*), independensi (*independency*), kesetaraan dan kewajaran (*fairness*) diimplementasikan pada berbagai kegiatan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan demi mewujudkan visi UT menjadi perguruan tinggi jarak jauh berkualitas dunia. Tentunya hal ini tidak terlepas dari budaya kerja dan nilai nilai yang telah dibangun selama ini. Namun dengan ditetapkannya sebagai PTNBH, maka diperlukan nilai nilai baru yang perlu diinternalisasikan pada sertiap personil UT untuk menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut. Ini tentu akan menjadi masalah jika UT tidak dapat melakukannya dengan baik

Menyambut perubahan status menjadi PTNBH maka UT sudah berupaya menggali nilai-nilai yang perlu dikembangkan mengikuti tantangan yang dihadapi ke depan. Nilai utama yang melandasi semua aspek eksistensi UT disusun atas beberapa nilai yang disingkat dengan sebutan KIIARA. Kualitas, diwujudkan melalui produk dan layanan UT yang menjunjung

tinggi kualitas sehingga mampu memenuhi harapan seluruh pemangku kepentingan. Integritas, terwujud dalam etika dan standar profesionalisme dalam proses penyelenggaraan UT. Inovasi, terwujud melalui komitmen dan berbagai bentuk terobosan untuk meningkatkan kualitas layanan melalui inovasi pada segala bidang kegiatan. Aksesibilitas, UT dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat tanpa terkendala tempat dan waktu, Relevansi, pengembangan seluruh program UT dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara kontekstual. Akuntabilitas, penyelenggaraan seluruh program UT dilakukan dengan efektif dan efisien sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara transparan. Semua nilai-nilai tersebut telah mulai ditanamkan dan diinternalisasi ke dalam semua aktifitas dan personil UT.

Seperti halnya PTN yang lain, UT juga mengalami tantangan dalam perubahan budaya kerja dari budaya birokrasi menuju budaya organisasi korporasi (Budaya PTNBH). Berdasarkan evaluasi diri dapat diketahui bahwa sebagian besar staf UT sudah memiliki budaya kerja yang efektif, namun pertumbuhan organisasi yang membutuhkan personil baru atas tuntutan untuk memenuhi kekurangan atauantisipasi kebutuhan kedepan. Masuknya personil baru dalam jumlah yang cukup banyak ini dapat saja “tarik menarik” nilai antar personil baru karena berasal dari institusi lain yang beragam yang bisa saja memiliki nilai berbeda dengan kebutuhan UT. Oleh karena itu, permasalahan ini perlu diantisipasi dengan memperkuat sistem pengembangan SDM, kepemimpinan yang kuat dan sistem kerja yang tepat serta diikuti dengan penilaian kinerja staf UT mendukung terhadap pelaksanaan strategi UT.

Berhadapan dengan permasalahan dan tantangan tersebut, maka penguatan budaya korporasi (GCG) yang sudah dirancang sebelumnya perlu terus dilakukan. UT melanjutkan implementasi rancangan tersebut melalui tiga tahapan, yaitu: i) proses menyatukan nilai dari masing-masing subkultur menjadi sebuah rumusan budaya organisasi UT PTNBH yang dapat merepresentasikan seluruh *stakeholder*; ii) proses penanaman nilai-nilai UT PTNBH (KIIARA) secara bertahap kepada seluruh pegawai; dan iii) proses penyusunan dokumen pedoman, melakukan penyesuaian peraturan, dan penyusunan *standard operation procedure* (SOP) dengan organisasi tata kelola baru UT PTNBH.



Gambar 1.2 *Culture Roadmap* UT 2022-2035

5) Sarana dan Prasarana dan Pemanfaatan Aset sebagai Sumber Pendapatan

Seiring dengan perubahan status UT menjadi PTN-BH, pengelolaan sarana dan prasarana di lingkungan UT telah diatur oleh Peraturan Rektor UT Nomor 1154 Tahun 2022 yang menjelaskan bahwa Barang Milik UT adalah semua barang selain tanah yang berasal dari kekayaan negara yang telah dipisahkan dan ditetapkan sebagai kekayaan awal dan yang berasal dari perolehan lainnya yang sah dimana Direktorat Manajemen Sarana Prasarana dan Umum adalah unit yang berada di bawah Wakil Rektor Bidang Keuangan, Sumber Daya Manusia, dan Umum yang bertanggung jawab atas penatausahaan, pengelolaan, dan penyusunan laporan serta neraca BMUT.

Pada tahun 2019, UT memiliki tanah, baik yang berada di UT Pusat dan UT Daerah seluas 313,632 m² dengan luas bangunan yaitu 131,637 m². Dalam laporan barang pengguna gabungan intrakomptabel dan ekstrakomptabel pada tahun 2023, tercatat aset peralatan dan mesin yang dimiliki UT adalah sebanyak 101.446 buah, gedung dan bangunan sebanyak 202 unit, jalan dan jembatan sebanyak 1.014 m², irigasi sebanyak 9 unit, jaringan sebanyak 110 unit, aset tetap renovasi sebanyak 4 unit, aset tetap lainnya sebanyak 11.550 buah, dan aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan sebanyak 499 unit yang semuanya bernilai sebesar Rp 1.517.743.356.457,00. Sarana penting lain yang menjadi andalan adalah sistem layanan online yang digunakan untuk layanan pembelajaran dan manajemen. UT juga memiliki beberapa server yang memiliki kemampuan melayani ratusan ribu mahasiswa UT dan mahasiswa PT lain. Dalam menjalankan operasionalnya, UT menerapkan prinsip sharing economy untuk penyediaan infrastruktur seperti untuk ruang-ruang ujian dan ruang tutorial.

Peningkatan sarana dan prasarana untuk pembangunan Learning Center yang mendukung Smart Campus telah dilakukan melalui pengadaan podcast equipment 39 UT Daerah yang digunakan sebagai peralatan penunjang bagi media pembelajaran secara daring. Selain itu, 3 (tiga) UT Daerah telah dilengkapi dengan Taman Pintar bagi mahasiswa, yaitu UPBJJ-UT Medan, Palu dan Mataram. Pembangunan Gedung dan Bangunan juga telah dilakukan pada 5 (lima) daerah yaitu Gedung UT Daerah Denpasar, Gedung UT Daerah Makassar, Gedung UT Daerah Padang, Gedung UT Daerah Bandar Lampung, serta Mushola dan Taman Pintar (UT Daerah Palu). Pembangunan tersebut tentunya mengusung konsep *Green Building* yang memperhatikan hemat energi, ventilasi, pencahayaan, tanaman dalam ruang, roof top, dan material yang aman.

Ketersediaan infrastruktur TIK canggih yang dimiliki oleh UT memungkinkan mahasiswa dapat mengakses materi pembelajaran secara daring dari mana saja dan kapan saja. Maka dari itu, peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan digital harus selalu dilakukan. Pembelajaran UT yang dilakukan dengan daring membuat sarana fisik seperti laboratorium atau fasilitas praktikum belum maksimal, maka dari itu diperlukan kerjasama dengan perguruan tinggi atau instansi lain untuk melaksanakan praktikum di berbagai daerah.

Selain itu, pengembangan bisnis di era UT PTNBH perlu dilakukan dengan memanfaatkan aset yang dimiliki yang menjadi sumber pendapatan alternatif selain dari Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) mahasiswa dan pembelian bahan ajar. UT memiliki sarana dan prasarana dalam jumlah dan kualitas yang memadai dengan jangkauan layanan yang luas di seluruh Indonesia. Maka dari itu, peluang bisnis dan investasi dalam penggunaan sarana dan prasarana yang dimiliki UT sangat terbuka luas.

6) Inovasi dan Reputasi

UT merupakan pelopor perguruan tinggi di Indonesia yang menawarkan pendidikan jarak jauh dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Seiring dengan perkembangan teknologi, UT terus berinovasi mengembangkan berbagai aplikasi untuk mendukung pembelajaran dan tata kelola universitas. Melalui pendekatan ini, UT dapat menawarkan layanan pendidikan yang lebih fleksibel dan mudah diakses bagi mahasiswa dari berbagai lokasi, dan memungkinkan mereka untuk melanjutkan pendidikan tinggi tanpa hambatan geografis. Inovasi inilah yang turut menciptakan reputasi UT sebagai perguruan tinggi pendidikan jarak jauh dengan fleksibilitas tinggi dengan pemanfaatan teknologi.

Keberlanjutan dan inovasi merupakan salah satu faktor penentu kemajuan pendidikan jarak jauh dan tentu akan menjadi permasalahan bagi perguruan tinggi penyelenggaranya. Oleh karena itu berbagai inovasi telah dilakukan UT melalui pengembangan aplikasi-aplikasi pendukung pembelajaran seperti aplikasi BA Digital, MyUT, SUAKA-UT dan ProMISe. Aplikasi BA Digital UT merupakan fasilitas mahasiswa untuk mengakses, mengunduh, dan membaca BMP sesuai mata kuliah yang telah diregistrasikan. Sedangkan aplikasi My UT membantu dalam mengkoneksikan berbagai aplikasi dalam satu wadah untuk memfasilitasi mahasiswa dalam memperoleh segala informasi terkait dengan kegiatan perkuliahan. SUAKA-UT merupakan website yang berisi tentang layanan UT dalam menyediakan materi pembelajaran yang dapat diakses secara gratis oleh masyarakat luas seperti UT-TV, UT Radio, Guru Pintar *Online*, dan materi pengayaan. Dalam bidang manajerial, UT telah mengembangkan sistem ProMISe yang merupakan sebuah sistem pintar terintegrasi berbasis online yang menyimpan dan mengolah informasi data terkait proses aktivitas pengadaan barang jasa di lingkungan UT. Kesemuanya itu perlu dipelihara dan dioptimalkan pemanfaatannya serta dikembangkan kemudahan penggunaan yang akan menjadi permasalahan tersendiri karena banyaknya aplikasi yang mesti digunakan sivitas akademika. Tantangan ini yang mesti dijawab UT kedepan bagaimana semua teknologi tersebut menjadi sesuatu yang mudah diakses dan digunakan dan sangat bersahabat bagi semua pihak yang dilayani UT.

UT juga telah melaksanakan ujian online dengan *online proctoring system*. Layanan ujian online *proctoring* merupakan layanan yang bertujuan untuk memberikan kemudahan mahasiswa untuk melaksanakan ujian tanpa terkendala ruang dan waktu. Dengan berkembangnya teknologi AI, maka ini menjadi permasalahan yang dihadapi oleh UT agar kualitas penyelenggaraan ujian tetap terjaga. Meskipun pada saat ini pengawasan sudah dilakukan dengan baik, maka perkembangan teknologi AI ini perlu diatasi agar tidak memunculkan bias dalam mengukur keberhasilan belajar mahasiswa. Ini merupakan permasalahan kedepan perlu dicarikan solusinya, dimana di satu sisi AI dapat membantu proses pembelajaran mahasiswa yang perlu juga dipertimbangkan untuk diintegrasikan ke dalam proses pembelajaran, namun di satu sisi menjadi sesuatu yang “menggangu” proses pembelajaran dalam hal penugasan, kuis dan ujian mahasiswa.

Proses inovasi yang dilakukan dalam bidang teknologi, UT juga melakukan inovasi dalam bidang akademik dan pembelajaran. Dalam bidang akademik, produk HKI UT

mengalami peningkatan dalam satu dekade terakhir. Pada tahun 2022, UT memiliki memiliki 278 hasil penelitian yang telah didaftarkan sebagai produk HKI (hak cipta). Perolehan ini masih harus dapat ditingkatkan dengan pembinaan penelitian yang lebih baik. Sementara itu, perlu meningkatkan pemanfaatan produk HKI tersebut, baik oleh pihak industri maupun masyarakat. Inovasi ini tentunya perlu untuk disebar luaskan agar dapat dipergunakan oleh berbagai pihak yang ada di dalam masyarakat. Permasalahn yang dihadapi UT saat ini bagaimana semua karya karya ini dapat dijangkau oleh masyarakat luas agar memberi dampak yang signifikan di dalam masyarakat. Semakin banyak Inovasi yang dilakukan serta hasil penelitian yang digunakan maka akan meningkatkan reputasi UT di dalam masyarakat.

Selain melalui inovasi dan karya karya akademik, reputasi UT juga dapat dibangun dengan menjaga mutu pendidikan dan kualitas luaran UT. Perolehan melalui penjaminan mutu dalam bentuk akreditasi PT dan program studi dari Badan Akreditasi Nasional PT dan Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) meruapakan sesuatu terus dijalankan. Saat ini UT telah berhasil mendapat sertifikat surveillance ISO 9001:2015 lingkup Manajemen Pembelajaran Jarak Jauh (MPJJ), sertifikat surveillance ISO 9001:2015 untuk lingkup Manajemen Akademik (MA) untuk seluruh program studi. Selain itu, UT merupakan satu-satunya perguruan tinggi jarak jauh di Asia yang setiap tiga tahun mengundang the *International Council for Open and Distance Education* (ICDE) yang berpusat di Oslo, Norwegia.

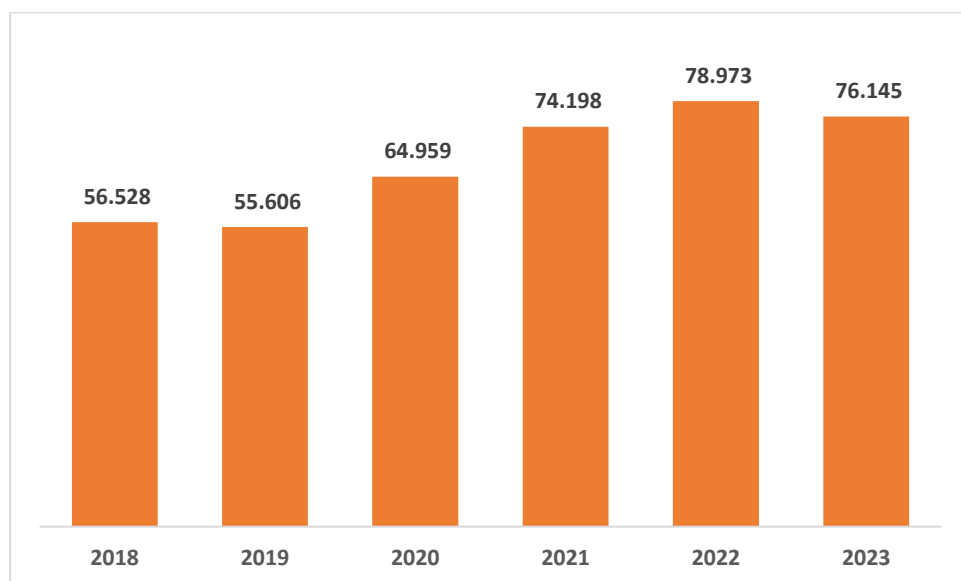
Upaya lainnya yang dilaksanakan UT dalam peningkatan citra dan pengakuan masyarakat yakni dengan ranking perguruan tinggi melalui *webometric*, yaitu suatu sistem pemeringkat yang memberikan penilaian terhadap seluruh perguruan tinggi melalui aktifitasnya di dunia maya atau website perguruan tinggi. Pada saat ini UT sudah dapat menempati peringkat ke-75 meski memiliki peluang yang besar untuk menempati posisi teratas. Permasalahan yang dihadapi UT saat ini adalah bagaimana semua proses, kegiatan dan isi perkuliahan UT yang sebagian besar berada dalam dunia maya dapat tercatat menjadi point dalam meningkatkan peringkat *webometric* tanpa mengganggu kepentingan UT sendiri. Selain itu bagaimana keaktifan mahasiswa yang selalu terhubung dengan aktifitas UT dalam dunia maya menjadi suatu masalah yang perlu ditangani karena keterbatasan akses yang dimiliki mahasiswa pada beberapa wilayah yang dilayani.

Upaya lain untuk meningkatkan rekognisi publik dilakukan dengan menyelenggarakan layanan PJJ sebagai *Cyber University* yang dilaksanakan oleh Unit Pengembangan

Pembelajaran dalam Jaringan Indonesia (UPPDJI) atau disebut ICE Institute. Dalam melaksanakan kegiatan ini, UT berkerja sama (konsorsium) dengan beberapa Perguruan Tinggi dalam dan luar negeri dan dalam konsorsium ICE institute dan sudah melayani 55 mitra pada tahun 2022. Peningkatan citra UT dilakukan juga melalui produk UT seperti Bahan Ajar (BA) Digital yang memiliki 53.456 pengguna. Selain BA Digital, UT terus berupaya meningkatkan jumlah pengguna layanan UT Online (kalender akademik, registrasi online, upload karya ilmiah, toko buku online, layanan belajar online, SUAKA UT, dan Sistem Ujian Online (SUO) yang memiliki pengguna sebanyak 13.437.413 orang. Dalam kancah internasional, UT mendapat kepercayaan dari Asian Association of Open Universities (AAOU).

7) Peran Alumni

Sebagai salah satu perguruan tinggi negeri di Indonesia, UT telah menghasilkan alumni dengan beragam latar belakang, pengalaman, dan cerita sukses mereka sendiri. Banyak dari alumni UT adalah individu yang memiliki komitmen kuat untuk mengejar pendidikan tinggi meskipun memiliki keterbatasan waktu, lokasi, atau keterampilan.



Gambar 1.3 Jumlah Lulusan UT Tahun 2018 – 2023

Sejak tahun 2018 s.d 2023 jumlah alumni UT sebanyak 406.409. Tren perkembangan lulusan dilihat cenderung meningkat setiap tahunnya, namun jumlah lulusan di tahun 2019 sedikit menurun akibat adanya pandemi Covid-19. Dengan telah lulusnya mahasiswa UT

hingga masa registrasi 2022 Genap jumlah lulusan menjadi 2.038.052 lulusan. Angka tersebut di atas merupakan investasi yang luar biasa bagi UT dalam memberikan sumbangan terbaiknya bagi bangsa. Tentunya jumlah alumni ini juga menjadi potensi yang luar biasa bagi UT sebagai kekuatan untuk bisa tumbuh berkembang lebih baik lagi. Permasalahannya adalah, sudah berapa besar potensi ini telah dimanfaatkan bagi kemajuan UT.

Melihat potensi alumni yang cukup besar tersebut maka perlu dibuat kebijakan pengelolaan alumni UT. Alumni memiliki peran yang penting dalam berbagai aspek kehidupan dan perkembangan UT antara lain dapat memberikan dukungan finansial, membangun jejaring kerja sama, pengembangan karir, serta menjadi duta bagi UT yang secara langsung maupun tidak langsung dapat membantu dalam sosialisasi promosi UT. Dalam jangka panjang dengan pengelolaan alumni yang baik dapat memajukan dan mengembangkan UT serta memberikan manfaat bagi masyarakat secara lebih luas. Perlu menjadi perhatian untuk mengaktifkan IKA UT daerah dalam membangun jaringan di setiap wilayah UT Daerah. Hal ini tentu dikelola oleh unit kerja alumni yang menjadi jembatan antara UT dan alumninya.

Pada tahun 2021 telah disusun roadmap alumni dengan visi membangun hubungan alumni yang berkelanjutan. Strategi berkelanjutan untuk membangun *Sustainable Alumni Connection* (SAC) melalui *alumni funding*, *employer reputation*, *alumni engagement* dan klasterisasi alumni gambar dengan rincian sebagai berikut:

a. *Alumni Funding*

Merupakan bentuk partisipasi alumni yang berupa uang maupun bantuan dalam tujuan untuk memberikan kontribusi kepada UT yang dapat disalurkan melalui program beasiswa, riset maupun penyertaan modal untuk anak usaha dalam rangka memberikan dukungan untuk kemandirian finansial.

b. *Alumni Engagement*

Membangun keterikatan alumni dengan Universitas dengan berperan pada pengembangan Universitas antara lain pengembangan kerja sama dengan institusi alumni.

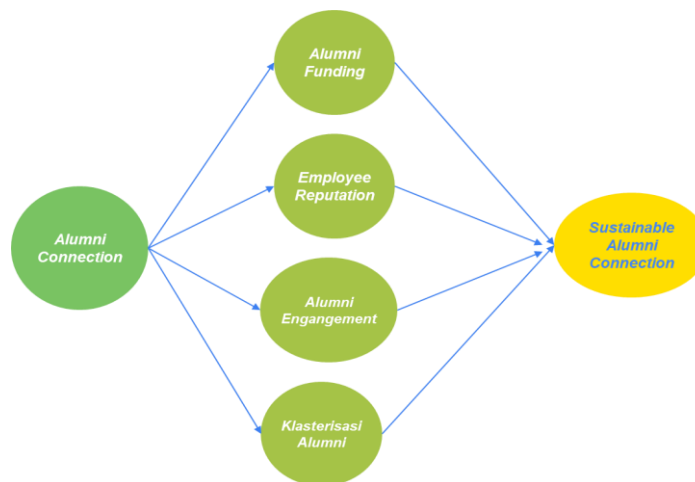
c. Klasterisasi Alumni

Pengelompokan alumni disesuaikan dengan jurusan, pekerjaan, dan lainnya agar dapat saling berkomunikasi antar alumni hingga tercipta komunitas.

d. *Employment Reputation*

UT memiliki sebaran alumni di berbagai negara dengan berbagai pekerjaan. Dengan membangun atau melakukan tracer terhadap alumni tersebut, maka akan dapat mendongkakan ranking UT dalam QS World Rank, karena employer reputation merupakan salah satu penilaian dalam QS ranking.

Dengan pengorganisasian yang baik diharapkan *roadmap* tersebut bisa berjalan sehingga pemberdayaan alumni dalam kemajuan UT dapat tercapai.



Gambar 1.4 Skema Strategi Sustainable Alumni *Connection*
(sumber: Roadmap Alumni UT 2021)

8) Kerja Sama dan Kemitraan

Kemitraan merupakan hal yang penting bagi UT dalam menjalankan proses bisnisnya. UT menyelenggarakan kerja sama dengan berbagai pihak baik dalam penyelenggaraan akademik maupun operasional. Dengan cakupan wilayah operasional yang sangat luas yang mencakup wilayah di seluruh Indonesia bahkan luar negeri, tidak memungkinkan bagi UT bekerja sendirian, namun harus bersinergi dengan pihak lainnya.

Upaya peningkatan kerja sama terus dilakukan, baik dengan cara memaksimalkan kerja sama yang sudah ada, menambah lingkup/bidang kerja sama baru dari mitra lama dan mencari mitra baru. Pada tahun 2022, Nota kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang

masih berlaku dan diinisiasi baru berjumlah 498 dengan rincian MoU sebanyak 231 dan PKS sebanyak 267, dengan rincian sebagai berikut.

Dari 498 dokumen kerja sama, sebanyak 43 Program Studi yang ada di UT telah melakukan kerja sama. Jika dilihat dari jenis mitranya, sebanyak 169 PTN dan 143 PTS dan 100 MoU/PKS adalah mitra dari non Perguruan Tinggi.

Tabel 1.7 Total Dokumen Kerja Sama UT

No.	Mitra	Jenis Dokumen		Jumlah Dokumen
		MoU	PKS	
1.	Perguruan Tinggi Negeri (PTN)	54	115	169
2.	Perguruan Tinggi Swasta (PTS)	89	54	143
3.	Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota	52	38	90
4.	Mitra Luar Negeri	5	5	10
5.	Mitra Lainnya*	31	120	171
Total		231	332	583

Jika dilihat dari Program Studi yang melakukan kerja sama, hampir sebagian besar program studi di UT sudah mempunyai kerja sama dengan Program Studi di Perguruan Tinggi lainnya. Sementara itu, sebanyak 40 Perguruan Tinggi yang memanfaatkan sistem, produk, layanan, dan keahlian UT. Capaian ini melebihi target sebanyak 40 perguruan tinggi. Kunjungan ini dilakukan baik secara langsung maupun secara virtual. Data penjalinan kerja sama program studi tahun 2022

Kerjasama internasional masih dirasakan sedikit dan perlu terus ditingkatkan. Universitas terbuka telah bekerja sama dengan AAOU (Asian Association of Open Universities) yang juga menjadi international partner dari ICDE (International Council for Distance Education). Hal ini menjadi peluang kerja sama Universitas Terbuka di kancah internasional dan menjadikan posisi UT diakui di tingkat internasional. Komunitas ICDE dan AAOU dengan peluang internasionalisasi dan jaringan, menghubungkan anggotanya secara internasional dan melalui kemitraan yang kuat dengan organisasi internasional dan regional lainnya untuk memfasilitasi pertukaran pengetahuan dan peluang kolaboratif internasional. Tergabungnya UT dalam ICDE mempermudah UT menjalin kerjasama dengan universitas terbuka lainnya di beberapa negara yaitu Brazil, Australia, Afrika, Eropa, New Zealand, Norwegia, Prancis, dan Asia.

Kerjasama dengan dunia usaha dan industri (DUDI) juga akan terus ditingkatkan karena akan banyak memberikan manfaat bagi perkembangan perguruan tinggi, perkembangan riset, pemutakhiran kurikulum dan desain pembelajaran, peningkatan kompetensi mahasiswa, dan kualitas lulusan. Kerjasama dengan dunia industri memungkinkan universitas untuk tetap mengikuti perkembangan terbaru dalam industri. Universitas dapat memperbarui kurikulum mereka berdasarkan kebutuhan nyata dunia kerja sehingga lulusan memiliki keterampilan dan pengetahuan yang relevan dan sesuai dengan tuntutan pasar kerja. Kerjasama dengan dunia kerja memungkinkan universitas untuk menyediakan kesempatan magang dan penempatan kerja bagi mahasiswa. Ini memberi kesempatan bagi mahasiswa untuk mengalami lingkungan kerja sebenarnya dan mengembangkan keterampilan praktis yang diperlukan untuk berhasil di dunia kerja.

Kerjasama antara universitas dan dunia industri membuka peluang untuk melakukan riset kolaboratif. Ini dapat membawa solusi inovatif untuk masalah yang dihadapi oleh industri dan memberikan wawasan baru bagi mahasiswa dan staf universitas. Kerjasama dengan dunia industri dapat membantu universitas mendapatkan dukungan finansial, sumber daya, dan fasilitas yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan penelitian. Bantuan finansial dan dukungan dari dunia industri dapat membantu universitas dalam membangun laboratorium, fasilitas pelatihan, dan program-program unggulan. Kerjasama dengan dunia kerja dapat membantu universitas dalam pengembangan keterampilan soft skills seperti kemampuan komunikasi, kepemimpinan, dan kerjasama tim pada mahasiswa. Pengalaman bekerja dengan industri membantu melatih mahasiswa menjadi profesional yang siap dan kompeten di dunia kerja.

Kerjasama dengan dunia industri memberikan kesempatan bagi mahasiswa dan staf universitas untuk memperluas jaringan profesional mereka. Jaringan ini dapat membuka pintu bagi peluang karier dan kolaborasi di masa depan. Melalui kerjasama dengan dunia industri, universitas dapat berkontribusi pada pembangunan ekonomi daerah atau negara. Lulusan yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan industri dapat membantu dalam pertumbuhan dan kemajuan sektor industri.

c. Analisis Lingkungan Eksternal dan Internal

Analisis terhadap lingkungan eksternal dan internal Universitas Terbuka disajikan dalam bentuk tabel analisis SWOT berikut ini.

Tabel 1.8 Analisis Internal Strategis

Faktor-Faktor	Tipe
1. Ketersediaan akses yang sama terhadap pendidikan tinggi bagi seluruh anggota masyarakat	Kekuatan
2. UT memiliki kebijakan manajemen untuk mengimplementasikan ekosistem pembelajaran digital	Kekuatan
3. Sumber daya manusia yang berkualitas dan kompeten	Kekuatan
4. Penciptaan unit bisnis sebagai third party (non operasional)	Kekuatan
5. Pemenuhan service provider untuk layanan PJJ di seluruh Indonesia (PT dan Instansi)	Kekuatan
6. Pengembangan Mata Kuliah Berbasis TIK	Kekuatan
7. Pengembangan digital ecosystem dengan tingkat keamanan yang memadai.	Kekuatan
8. UT memiliki reputasi dan sejarah panjang sebagai pelopor PTJJ di Indonesia.	Kekuatan
9. Sejak pembukaannya, UT memiliki sekitar 50.000 mahasiswa dan terus bertambah hingga mencapai 439.222 mahasiswa pada tahun 2022. Fakta ini menunjukkan kapasitas dan cakupan luas UT dalam melayani masyarakat	Kekuatan
10. UT diakui sebagai salah satu universitas yang masuk dalam Global Mega University Network (GMUnet), yang Menandakan reputasi dan pengakuan internasional.	Kekuatan
11. Kecukupan/kebutuhan SDM	Kelemahan
12. Kuantitas, kualifikasi, dan kompetensi dosen	Kelemahan
13. Ketersediaan sarana dan prasarana yang belum memadai	Kelemahan
14. Budaya kerja yang belum optimal	Kelemahan
15. Reputasi yang masih perlu ditingkatkan	Kelemahan
16. UT masih perlu meningkatkan daya tampung pendidikan tinggi di Indonesia	Kelemahan
17. Banyaknya mahasiswa yang melewati masa studi	Kelemahan
18. Kurangnya tenaga pendidikan sehingga dosen berfokus pada pelayanan administratif dibandingkan melaksanakan tri-dharma Perguruan Tinggi	Kelemahan

Tabel 1.9 Analisis Lingkungan Eksternal Strategis

Faktor-Faktor	Tipe
1. Pada tahun 2024, berlangsung pemilihan umum yang berpotensi merubah arah kebijakan pendidikan.	Peluang
2. Pada tahun 2024, jumlah <i>middle</i> dan <i>upper income class</i> bertambah, namun terdapat juga resiko <i>middle income trap</i>	Peluang
3. UT masih perlu meningkatkan kualitas SDM dan akses pendidikan tinggi di Indonesia	Peluang
4. UT dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk pengembangan mata kuliah berbasis TIK dan pengembangan ekosistem digital.	Peluang
5. Perubahan pola politik, demografi, ekonomi, lingkungan hidup, 29endid-budaya, dan teknologi.	Tantangan
6. Menjaga reputasi dan inovasi dalam dunia 29endidikan terbuka dan jarak jauh dengan menjamurnya berbagai institusi Pendidikan tinggi yang juga menyelenggarakan Pendidikan jarak jauh secara online maupun <i>hybrid</i> yang juga akan menjadi pesaing UT di masa yang akan 29endid.	Tantangan
7. Menghadapi berbagai tantangan global, komunitas internasional, dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).	Tantangan
8. Pencapaian pendidikan yang inklusif dan berkualitas.	Tantangan
9. Tingkat keamanan jaringan IT yang memadai dan ancaman serangan <i>cybersecurity</i> .	Tantangan
10. <i>Artificial intelligence</i> dan <i>machine learning</i> yang akan mengubah pola pelayanan pendidikan	Tantangan

Tabel 1.10 Analisis Kekuatan dan Kelemahan Faktor-faktor Strategis Internal (Matrix IE)

Faktor-Faktor Strategis Internal	Bobot	Skor	Nilai	Keterangan
	(a)	(b)	(axb)	
Kekuatan				
(K-1) Sistem Terbuka dan Jarak Jauh	0.2	4	0.8	Terbuka bagi seluruh lulusan SLTA/ sederajat tanpa membatasi tahun ijazah, dan usia. Fleksibel dalam pemilihan skema layanan dan registrasi

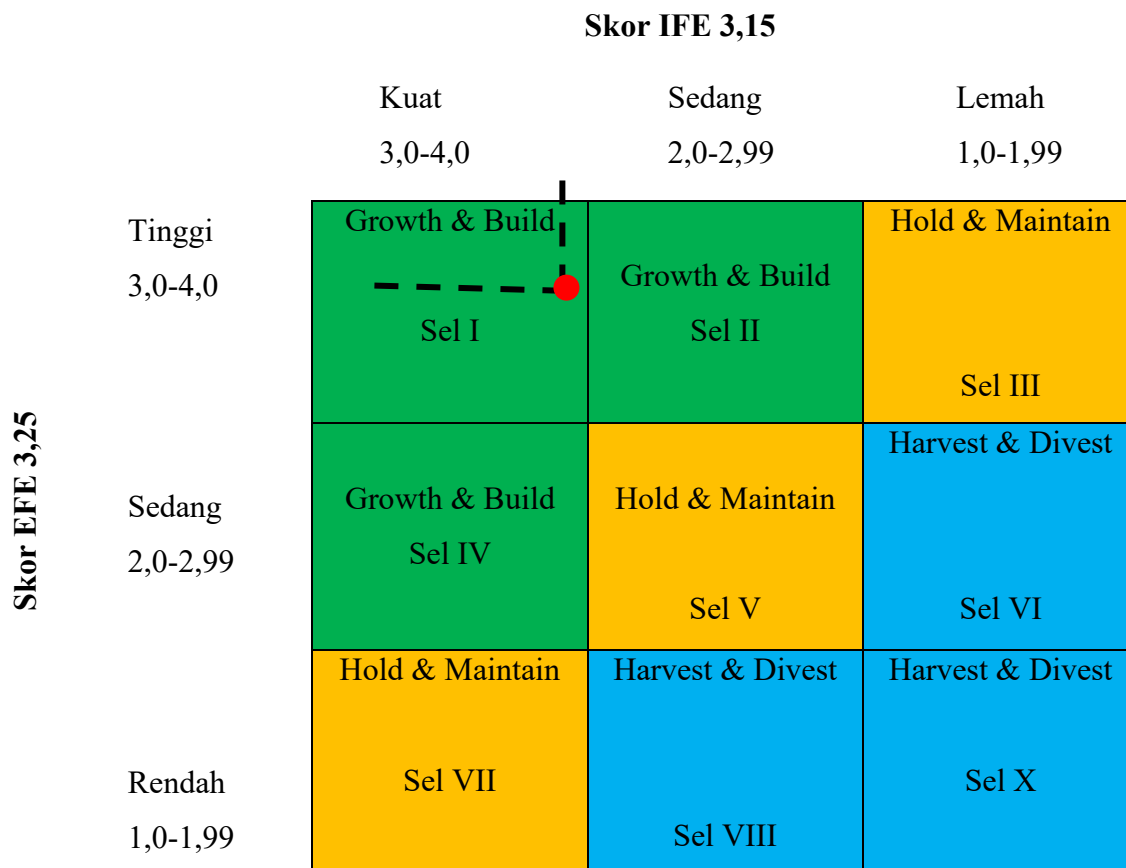
Faktor-Faktor Strategis Internal	Bobot	Skor	Nilai	Keterangan
	(a)	(b)	(axb)	
				Layanan pembelajaran yang beragam, dan fleksibilitas ujian, serta masa penyelesaian studi.
				Keterjangkauan biaya Pendidikan
				Mampu menampung mahasiswa dalam jumlah yang besar.
(K-2) Perangkat pembelajaran	0.1	4	0.4	Kualitas bahan ajar UT terpelihara dan terstandar, serta dilengkapi dengan berbagai jenis multi media (audio, video, dan media berbasis komputer)
				Sistem evaluasi hasil belajar terstandar
				Kualitas bahan ujian terpelihara dan terstandar
				Memiliki sistem bank soal
				Menyediakan layanan ujian online
				Menyediakan beragam pilihan skema dan modus layanan
(K-3) Jejaring nasional dan internasional	0.05	2.5	0.125	PNBP dapat mendukung operasional dan pengembangan UT.
(K-4) Infrastruktur ICT dan non ICT	0.1	3	0.3	Tersedianya sarana TIK yang memadai dan terintegrasi untuk mendukung layanan akademik dan non akademik.
				Pengalaman UT dalam mengelola pendidikan dengan PJJ
(K-5) Budaya Organisasi	0.05	4	0.2	Budaya organisasi UT mendukung penerapan corporate governance dan Total Quality Management (TQM)
				Budaya organisasi berbasis kinerja

Faktor-Faktor Strategis Internal	Bobot	Skor	Nilai	Keterangan
	(a)	(b)	(axb)	
Kelemahan				
(W-1) Sumber Daya Manusia	0.2	3	0.6	Komposisi PNS didominasi oleh kelompok usia di atas 50 tahun.
				Kompetensi sebagian SDM yang kurang sesuai dengan kebutuhan pekerjaan UT dan perubahan
				Jumlah SDM yang terus berkurang
(W-2) Integrasi decision support system	0.1	2.5	0.25	Sistem informasi asset (tangible dan nontangible) belum dimanfaatkan secara optimal
				Integrasi sistem informasi dan pemanfaatannya masih belum optimal
(W-3) Branding (goodwill)	0.05	2	0.1	Brand dan reputasi UT belum kuat
				Kebanggaan alumni dan mahasiswa terhadap branding masih rendah
(W-4) Pemenuhan terhadap standar pendidikan	0.05	3.5	0.175	Baru 13 dari 43 Prodi berakreditasi A,
				Akreditasi PT masih B
(W-5) Kontrol terhadap proses pembelajaran mahasiswa	0.1	2	0.2	Keterlibatan mahasiswa dalam Co dan Ekstra kurikuler masih rendah
(P-1) Jumlah penduduk yang belum menempun pendidikan tinggi besar	1		3.15	
Peluang				
(P-2) Tumbuhnya digital <i>native</i>	0.2	4	0.8	60 % penduduk usia kuliah belum kuliah
				Tuntutan kualifikasi dari pengguna meningkat
(P-3) Kebutuhan pendidikan (mis: vokasi, pelatihan, <i>micro credential</i>) masyarakat	0.15	3.5	0.525	Jumlah anak muda yang melek teknologi digital meningkat

Faktor-Faktor Strategis Internal	Bobot	Skor	Nilai	Keterangan
	(a)	(b)	(axb)	
(P-4) Dukungan Pemerintah				Kebiasaan masyarakat menggunakan media sosial tinggi
	0.13	3	0.39	Kebutuhan pendidikan (mis: vokasi, pelatihan, <i>micro credential</i>) masyarakat
	0.05	3	0.15	Dukungan Pemerintah dalam bentuk kebijakan yang mendukung pengembangan UT
	0.04	3.5	0.14	Kemajuan ICT membuka kemungkinan proses belajar lebih variatif
				Jumlah pengguna ICT meningkat
(T-2) Sumberdaya di luar UT akan semakin sulit diperoleh	0.05	3	0.15	
(T-3) Kebijakan Kemenkeu tentang Sisa Lebih Penggunaan Anggaran	0.04	2.5	0.1	Potensi penarikan SILPA UT oleh Kemenkeu
(T-5) Penyalahgunaan perangkat sarana TIK yang dapat mengganggu layanan dan operasional UT (<i>cyber crime</i>) (4)	0.1	3	0.3	Potensi gangguan ekosistem layanan
	1		3.25	

Sumber: Kompilasi RSB UT, Laporan Rektor 2022, Analisis Internal dan Eksternal UT, dsb. (2022-2023)

Dari *scoring* tersebut diperoleh posisi dari matrix Internal-External (IE) sebagai berikut.



Gambar 1.5 Matriks IE Universitas Terbuka

Setelah dilakukan *scanning* terhadap lingkungan internal dan eksternal langkah selanjutnya adalah mensintesis faktor-faktor internal dan eksternal tersebut ke dalam tabel analisis. Ringkasan analisis faktor internal dan eksternal berisi masing-masing 10 faktor internal dan 10 faktor eksternal yang dianggap paling strategis. Namun demikian menyimpulkan 20 faktor untuk mengembangkan strategi memerlukan analisis yang mendalam, sehingga ke 20 faktor tersebut dapat dikurangi menjadi 10 faktor strategis. Pada kolom total nilai akan tergambar kekuatan UT dibanding dengan PT lain dalam menangkap peluang yang tersedia. Rata-rata total nilai adalah selalu 3,00. Jika total nilai di atas 3,00 artinya organisasi memiliki peluang untuk berkembang dan memenangkan persaingan. Dari hasil analisis internal dan eksternal rata-rata total nilai faktor strategis UT adalah 3,25 artinya dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi peluang UT berada diatas rata rata sebagai perguruan tinggi penyelenggara PJJ.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS

2.1 Visi

Visi UT tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Terbuka (PTNBH UT), yakni: “Menjadi Perguruan Tinggi Jarak Jauh Berkualitas Dunia”. Melalui visi tersebut, UT berkomitmen untuk melayani seluruh lapisan masyarakat melalui pendidikan terbuka dan jarak jauh. Pada PP Nomor 39 Tahun 2022 dijelaskan bahwa sistem terbuka dan jarak jauh mempunyai makna sebagai berikut, terbuka mengacu pada sistem pendidikan yang memiliki 4 (empat) unsur utama, yaitu waktu, tempat, metode instruksional, dan modus akses. Terbuka terhadap waktu, memiliki makna bahwa peserta didik dapat memilih waktu yang tepat untuk belajar, termasuk kecepatan dan masa tempuh belajar. Terbuka terhadap tempat, memiliki makna proses pembelajaran tidak dibatasi oleh sekat-sekat ruang kelas. Peserta didik dapat mengakses pendidikan dari tempat mereka berada karena peserta didik memiliki keterbukaan terhadap tempat dan waktu. Metode instruksional bagi peserta didik bersifat terbuka, artinya peserta didik dapat mengakses materi pembelajaran setiap saat dengan media yang beragam. Terbuka terhadap modus akses, memiliki makna peserta didik dapat mengakses proses pembelajaran dan layanan pendidikan dari berbagai media, seperti bahan tercetak dan noncetak. Sedangkan, yang dimaksud dengan bersifat jarak jauh adalah UT memberikan layanan pendidikan tinggi melalui pendidikan jarak jauh sesuai dengan standar pendidikan nasional.

2.2 Misi

Berdasarkan visi yang ditetapkan, UT memiliki misi untuk:

- a. menyelenggarakan pendidikan berkualitas dunia yang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat;
- b. menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang pendidikan jarak jauh yang berkelanjutan dan berkualitas dunia; dan
- c. menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.

2.3 Tujuan

Visi dan Misi UT dituangkan dalam tujuan UT sebagai berikut:

- a. menghasilkan lulusan yang berkarakter, berkompentensi, dan mampu bersaing secara global;
- b. menghasilkan karya akademik dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi pembangunan nasional dan pemecahan masalah global; dan
- c. menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat dalam penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mewujudkan masyarakat sejahtera dan merespon masalah global.

Visi dan Misi UT yang diturunkan dalam Tujuan UT selaras dengan tujuan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang dapat dilihat tabel berikut.

Tabel 2.1 Tujuan UT dan Tujuan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

Tujuan UT	Tujuan Kemdikbudristek
Menghasilkan lulusan yang berkarakter, berkompentensi, dan mampu bersaing secara global	Perluasan akses pendidikan bermutu bagi peserta didik yang berkeadilan dan inklusif
	Penguatan mutu dan relevansi pendidikan yang berpusat pada perkembangan peserta didik yang berkarakter
Menghasilkan karya akademik dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi pembangunan nasional dan pemecahan masalah global	Peningkatan produktivitas, riset, inovasi, dan ilmu pengetahuan perguruan tinggi
	Penguatan sistem tata kelola pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang partisipatif, transparan, dan akuntabel
Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat dalam penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mewujudkan masyarakat sejahtera dan merespon masalah global	Pelestarian dan pemajuan budaya, bahasa, dan sastra serta pengarusutamaannya dalam pendidikan

2.4 Sasaran Strategis

Dalam upaya mencapai Visi, Misi dan Tujuan tersebut di atas, ditetapkan sasaran strategis Universitas Terbuka yaitu:

1. Meningkatnya kualitas lulusan
2. Meningkatnya tata kelola *good university governance* yang berkelanjutan
3. Meningkatnya akses pendidikan tinggi bagi seluruh lapisan masyarakat
4. Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran
5. Meningkatnya kualifikasi dan kompetensi dosen

6. Meningkatnya jumlah keluaran dosen di bidang penelitian
7. Meningkatnya jumlah keluaran dosen di bidang pengabdian kepada masyarakat

Keselarasan antara tujuan dengan sasaran strategis UT, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.2 Tujuan dan Sasaran Strategis serta Indikator Sasaran Strategis Universitas Terbuka

Tujuan	Sasaran Strategis (SS)	
Menghasilkan lulusan yang berkarakter, berkompentensi, dan mampu bersaing secara global	SS 1	Meningkatnya kualitas lulusan
	SS 2	Meningkatnya tata kelola <i>good university governance</i> yang berkelanjutan
	SS 3	Meningkatnya akses pendidikan tinggi bagi seluruh lapisan masyarakat
Menghasilkan karya akademik dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi pembangunan nasional dan pemecahan masalah global	SS 4	Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran
	SS 5	Meningkatnya kualifikasi dan kompetensi dosen
	SS 6	Meningkatnya jumlah keluaran dosen di bidang penelitian
Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat dalam penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mewujudkan masyarakat sejahtera dan merespon masalah global	SS 7	Meningkatnya jumlah keluaran dosen di bidang pengabdian kepada masyarakat

BAB III

ARAH KEBIJAKAN STRATEGIS, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 Arah Kebijakan Strategis

Tahun 2023 merupakan babak baru dalam transformasi UT dari PTN BLU ke PTN BH. Dengan status UT menjadi PTN BH tersebut, UT memiliki otonomi akademik dan non akademik yang lebih tinggi, sehingga dapat mempercepat pencapaian Visi maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Panjang. Pengembangan UT yang dituangkan dalam RPJP 2021-2035 memiliki tiga tahap yang terbagi dalam tema strategis untuk mencapai visi menjadi perguruan tinggi jarak jauh berkualitas dunia. Adapun tema strategis tersebut yaitu:

1. Pembangunan Tahap 1 (2021-2025): Integrasi Jejaring *Cyber University*
2. Pembangunan Tahap 2 (2026-2030): Ekosistem Pendidikan Digital
3. Pembangunan Tahap 3 (2031-2035): UT Didukung oleh Ekosistem Digital yang Kokoh.

Arah kebijakan strategis UT sampai dengan 2025 diturunkan ke dalam enam pilar utama kebijakan strategis yang terangkum dalam tema strategis “*BRIGHT Open University*”. Adapun keenam pilar tersebut yaitu:

1. *Bring breakthrough solution to community development*

UT memberikan solusi terobosan untuk pengembangan masyarakat melalui inovasi. Peningkatan inovasi dapat berupa diversifikasi program sertifikat dan pengembangan produk layanan di perpustakaan digital untuk dapat diakses dan didistribusikan kepada masyarakat secara luas melalui jejaring internet dan program kemitraan daerah (contoh, lembaga pemerintahan dan program *Corporate Social Responsibility (CSR)* dari *profit company* di daerah seluruh Indonesia).

2. *Resource collaborative and accelerating supporting system*

UT mengembangkan skema kolaborasi sumber daya dengan perguruan tinggi mitra untuk pelaksanaan tridharma perguruan tinggi semakin optimal. Kolaborasi juga dikembangkan melalui program inovasi secara kolektif dengan mengedepankan kebutuhan masyarakat sesuai daerah atau lokasi perguruan tinggi mitra. Melalui pengembangan skema tersebut, UT dapat melakukan percepatan transformasi organisasi dengan fokus inovasi layanan dan cakupan wilayah yang luas. Selain program kolaborasi sumber daya, UT juga mengembangkan akselerasi sistem pendukung untuk mempercepat operasional dan transformasi organisasi. Akselerasi sistem pendukung berupa penguatan diversifikasi pendanaan dari usaha non akademik, hibah masyarakat, dan *alumni funding*.

3. *Innovation and continuous improvement*

Transformasi organisasi dan penguatan integrasi jejaring *cyber university* memerlukan adanya inovasi dan *continuous improvement* dalam bidang IT. Selain pengembangan dalam bidang infrastruktur IT, inovasi dan *continuous improvement*, diperlukan pula kesiapan *human capital* dalam pelaksanaannya.

4. *Good open university governance in serving stakeholder*

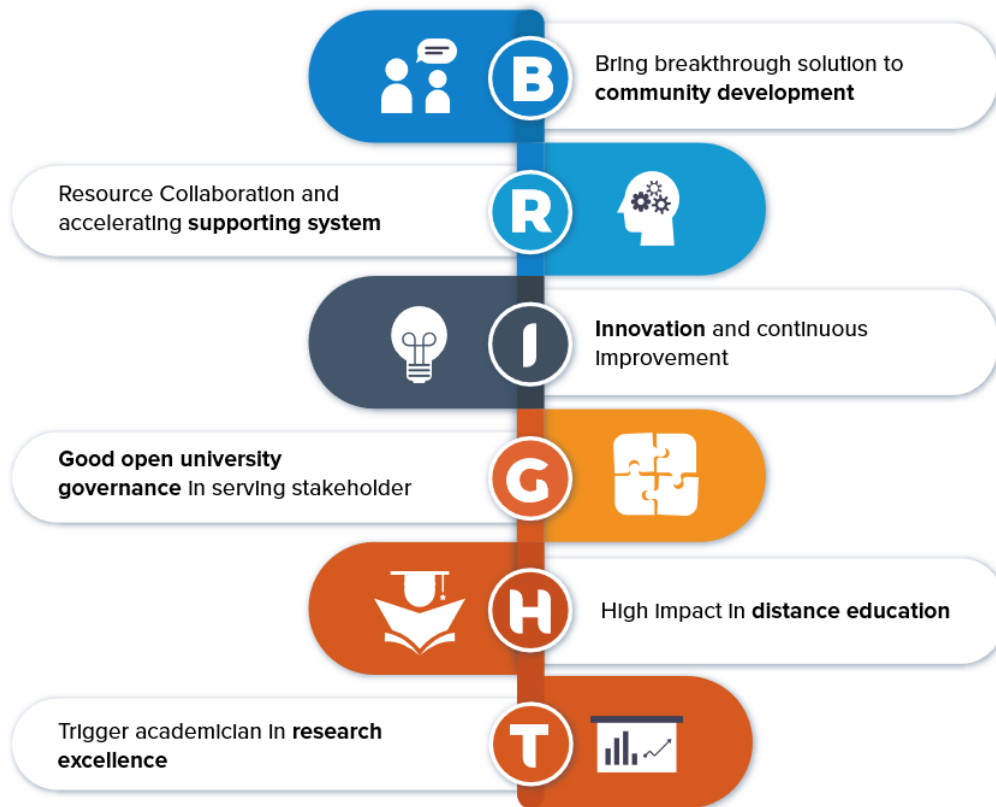
UT menjalankan organisasi berdasarkan prinsip *good open university governance* untuk melayani seluruh stakeholder. Pelaksanaannya didukung dengan adanya tata kelola organisasi, kelembagaan, dan penguatan regulasi atau aturan yang saling mendukung terciptanya transformasi organisasi.

5. *High impact in distance education*

Sesuai dengan tujuan pendirian UT, proses pendidikan jarak jauh menjadi faktor penting sesuai *core business* organisasi. Pendidikan jarak jauh yang berkualitas menjadi prioritas utama dalam setiap perubahan arah organisasi sehingga dalam pengembangan, peningkatan kualitas pendidikan jarak jauh terus ditingkatkan sesuai dengan tema strategis yang ingin dicapai. Sesuai Rencana Pengembangan Jangka Panjang UT, tema strategis yaitu integrasi jejaring *cyber university*, berimplikasi pada peningkatan kualitas pendidikan menggunakan teknologi yang mutakhir.

6. *Trigger academician in research excellence*

UT memfasilitasi pengembangan ilmu pengetahuan melalui penelitian yang memiliki dampak tinggi bagi masyarakat. Sebagai PTJJ, UT memiliki prioritas pengembangan riset sesuai dengan karakteristik PTJJ. Beberapa topik diantaranya adalah kualitas teknologi, kesiapan *human capital* dalam kesuksesan menjalankan *open university* dan peningkatan kualitas *teaching university*.



Gambar 3.1 Arah Kebijakan Strategis UT: BRIGHT Open University

Keenam pilar arah kebijakan strategis *BRIGHT Open University* tersebut diimplementasikan ke dalam 7 Sasaran Strategis (SS) Universitas Terbuka yang meliputi:

- SS 1. Meningkatnya kualitas lulusan.
- SS 2. Meningkatnya tata kelola *good university governance* yang berkelanjutan.
- SS 3. Meningkatnya akses pendidikan tinggi bagi seluruh lapisan masyarakat.
- SS 4. Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran.
- SS 5. Meningkatnya kualifikasi dan kompetensi dosen.
- SS 6. Meningkatnya jumlah keluaran dosen di bidang penelitian.
- SS 7. Meningkatnya jumlah keluaran dosen di bidang pengabdian kepada masyarakat

Keselarasan arah kebijakan strategis UT *BRIGHT Open University* dengan Sasaran Strategis Universitas Terbuka untuk kemudian diukur dengan Indikator Kinerja Strategis digambarkan pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Arah Kebijakan Strategis, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Strategis UT

Arah Kebijakan Strategis		Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis
B	<i>Bring breakthrough solutions to community development.</i>	SS 3. Meningkatnya akses pendidikan tinggi bagi seluruh lapisan masyarakat	Peningkatan Jumlah Mahasiswa UT Menuju 1 Juta Mahasiswa
			Jumlah kerja sama per program studi S1 dan D4/D3/D2/D1.
R	<i>Resource collaborative and accelerating supporting system</i>	SS 7. Meningkatnya jumlah keluaran dosen di bidang pengabdian kepada masyarakat	Jumlah keluaran dosen di bidang pengabdian kepada masyarakat yang diterapkan oleh masyarakat/industri/pemerintah per jumlah dosen.
I	<i>Innovation and continuous improvement</i>	SS 5. Meningkatnya kualifikasi dan kompetensi dosen.	Persentase dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri; atau persentase pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia usaha, atau dunia industri.
			Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi.
G	<i>Good open university governance in serving stakeholder</i>	SS 2. Meningkatnya tata kelola <i>good university governance</i> yang berkelanjutan	Rata-rata predikat SAKIP saker minimal BB
			Meningkatnya tata kelola UT yang baik, kredibel, dan transparan
			Meningkatnya ranking UT masuk dalam 1000 besar dunia versi THE <i>Impact</i> dan 20 besar nasional UI <i>GreenMetric</i>
			Meningkatnya sumber pendapatan UT (non akademik) dengan mengoptimalkan pemanfaatan aset UT
			Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 80
H	<i>High impact in distance education</i>	SS 1. Meningkatnya kualitas lulusan	Persentase lulusan S1 dan D4 / D3 / D2 / D1 yang berhasil: a. memiliki pekerjaan; b. melanjutkan studi; atau c. menjadi wiraswasta.

Arah Kebijakan Strategis		Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis
			Persentase mahasiswa S1 dan D4 / D3 / D2 / D1 yang: a. menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi; atau b. meraih prestasi.
		SS 4. Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran	Persentase program studi S1 dan D4/D3 yang memiliki akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui pemerintah. Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (<i>case method</i>) atau pembelajaran kelompok berbasis <i>project (team-based project)</i> sebagai bagian dari bobot evaluasi.
T	<i>Trigger academician in research excellence</i>	SS 6. Meningkatnya jumlah keluaran dosen di bidang penelitian	Jumlah keluaran dosen yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat/industri/pemerintah per jumlah dosen.

3.2 Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi yang dijalankan oleh UT bertujuan untuk mensukseskan arah kebijakan organisasi. Adapun kerangka regulasi tersebut berkaitan dengan arah kebijakan strategis *BRIGHT Open University*, adalah sebagai berikut:

1. Regulasi dalam bidang pendidikan dan kemahasiswaan bertujuan menyelenggarakan Pendidikan terbuka jarak jauh yang berkualitas dan memberikan dampak peningkatan keilmuan masyarakat melalui kerangka kurikulum Kampus Merdeka - Merdeka Belajar.
2. Regulasi dalam bidang penelitian bertujuan untuk meningkatkan dampak keilmuan kepada masyarakat sesuai kerangka *roadmap* penelitian yang berfokus pada hasil riset untuk peningkatan kualitas *teaching university* berbasis PTJJ.
3. Regulasi dalam bidang pengembangan masyarakat bertujuan untuk memberikan diseminasi keilmuan kepada masyarakat dengan implementasi tata nilai aksesibilitas UT.
4. Regulasi dalam bidang kolaborasi sumber daya dan peningkatan akselerasi sistem pendukung bertujuan untuk percepatan transformasi organisasi melalui kerja sama mitra yang berorientasi pada diversifikasi layanan dan sumber pendanaan.

5. Regulasi dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan organisasi *open university* bertujuan untuk penyelenggaraan organisasi yang akuntabel, transparan, dan berintegritas tinggi.
6. Regulasi dalam bidang inovasi dan *continuous improvement* bertujuan untuk percepatan organisasi dalam melakukan inovasi layanan yang didasarkan pada teknologi mutakhir, serta perbaikan berkelanjutan dengan kesiapan *human capital* yang unggul.

Kerangka regulasi dibutuhkan untuk melaksanakan tugas dan fungsi serta kewenangan organisasi dalam rangka mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran. Kerangka regulasi Universitas Terbuka meliputi Peraturan Pemerintah, Peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Majelis Wali Amanat, Senat Akademik, dan Peraturan-peraturan Rektor yang berlaku. Berikut ini regulasi yang perlu disusun dan direvisi sebagaimana dijelaskan pada tabel 3.2.

Tabel 3.2 Regulasi yang Perlu Disusun dan Direvisi

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
1	Revisi Peraturan Rektor tentang Penerimaan Mahasiswa	Sesuai dengan PP No. 39 Tahun 2022 Pasal 19, Penerimaan mahasiswa WNI, WNA dan UT wajib mencari dan menjaring calon mahasiswa yang memiliki potensi akademik tinggi, tetapi kurang mampu secara ekonomi, calon mahasiswa dari 3T paling sedikit 20% dari seluruh mahasiswa baru dan tersebar dpad semua Program Studi.	Direktorat Administrasi Akademik dan Kelulusan	2024
2	Peraturan Rektor Revisi Pedoman pelaksanaan penyelenggaraan, penyebaran, pemanfaatan, perlindungan penyelenggaraan penelitian	Proses pelaksanaan penyelenggaraan, penyebaran, pemanfaatan, perlindungan penyelenggaraan, perlindungan hasil penelitian perlu menyesuaikan statut UT sebagai PTN Badan Hukum. Peraturan komersialisasi hasil penelitian.	Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	2024
3	Revisi Peraturan Rektor tentang Pelayanan dan Penjaminan Mutu Pendidikan	Perlu menyesuaikan dengan Permendikbud Nomor 53 Tahun 2023	Direktorat Administrasi Akademik dan Kelulusan	2024
4	Revisi Peraturan Rektor tentang Pembukaan Prodi Baru	Perlu menyesuaikan dengan Permendikbud Nomor 53 Tahun 2023	Direktorat Administrasi Akademik dan Kelulusan	2024
5	Revisi Peraturan Pengelolaan Aset PTN Badan Hukum	Sesuai dengan perubahan statuta UT dan PP Nomor 8 Tahun 2020 Pasal 19, Semua Aset yang diperoleh PTN Badan Hukum harus dicatat dalam inventaris barang PTN Badan Hukum. Ketentuan Tata cara pengelolaan Aset diatur dengan peraturan masing-masing pimpinan PTN Badan Hukum. Perlu penyesuaian pedoman Pengelolaan BMUT (Perencanaan, Pengandaan, Pengapusan)	Direktorat Manajemen Sarana, Prasarana, dan Umum	2024
6	Revisi Peraturan Rektor pedoman Pengelolaan Keuangan	Perlu penyesuaian pedoman Pengelolaan Keuangan PTN Badan Hukum	Pusat Pengelolaan Keuangan	2024
7	Revisi Peraturan Rektor Pedoman Perencanaan dan Penganggaran	Perlu penyesuaian Pedoman Perencanaan dan Penganggaran PTN Badan Hukum	Pusat Perencanaan dan Pelaporan	2024
8	Peraturan Rektor Pengelolaan Perpajakan PTNBH UT	Perlunya Pedoman dalam Perpajakan PTN BH UT	Pusat Pengelolaan Keuangan	2024
9	Peraturan Rektor Pangkat, gaji, dan tunjangan	Perlu menyesuaikan Pangkat, gaji, dan tunjangan pegawai disesuaikan dengan PTN Badan Hukum	Pusat Sumber Daya Manusia	2024

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
10	Pangkat, Jenis Kenaikan Pangkat, Kenaikan Pangkat, Gaji, Kenaikan Gaji, Tunjangan Istri/Suami, Tunjangan Anak, Tunjangan Pangan, Tunjangan Umum	Perlu menyesuaikan Pangkat, Jenis Kenaikan Pangkat, Kenaikan Pangkat, Gaji, Kenaikan Gaji, Tunjangan Istri/Suami, Tunjangan Anak, Tunjangan Pangan, Tunjangan Umum pegawai sesuai dengan PTN Badan Hukum	Pusat Sumber Daya Manusia	2024
11	Peraturan Rektor Pengadaan Pegawai	Perlu menyesuaikan peraturan Pengadaan Pegawai dengan PTN Badan Hukum	Pusat Sumber Daya Manusia	2024
12	Penyusunan Kebutuhan, Pelaksanaan, Penetapan Kelulusan, Pengangkatan sebagai Calon, Pengangkatan sebagai Pegawai	Perlu penyesuaian Kebutuhan, Pelaksanaan, Penetapan Kelulusan, Pengangkatan sebagai Calon, Pengangkatan sebagai Pegawai sesuai dengan PTN Badan Hukum	Pusat Sumber Daya Manusia	2024
13	Peraturan Rektor Hari kerja, jam kerja, cuti, sdh selesai draf	Penyesuaian Hari kerja, jam kerja, cuti, sdh selesai draf dengan PTN Badan Hukum	Pusat Sumber Daya Manusia	2024
14	Peraturan Rektor Beban Kerja Dosen	Perlu penyesuaian Beban Kerja Dosen dalam PTN Badan Hukum	Pusat Sumber Daya Manusia	2024
15	Rincian Tugas, Beban Kerja, dan Penilaian Kinerja Dosen	Penyesuaian Rincian Tugas, Beban Kerja, dan Penilaian Kinerja Dosen pada PTN Badan Hukum	Pusat Sumber Daya Manusia	2024
16	Peraturan Rektor Studi Lanjut	Perlu penyesuaian prosedur Studi Lanjut Pegawai dalam PTN Badan Hukum	Pusat Sumber Daya Manusia	2024
17	Jenis tugas belajar, persyaratan, prosedur, hak, kewajiban, sanksi bagi Pegawai Tugas Belajar	Perlunya penyesuaian Jenis tugas belajar, persyaratan, prosedur, hak, kewajiban, sanksi bagi Pegawai Tugas Belajar dalam PTN Badan Hukum	Pusat Sumber Daya Manusia	2024
18	Peraturan Rektor Mutasi (pemindahan) Pegawai	Perlunya penyesuaian Mutasi (pemindahan) Pegawai dalam PTN Badan Hukum	Pusat Sumber Daya Manusia	2024
19	Pertor Insentif kinerja	Petlunya penyesuaian Insentif kinerja pegawai dalam PTN Badan Hukum	Pusat Sumber Daya Manusia	2024
20	Besaran insentif, mulai berlakunya, prosedur dan tata cara pembayaran	Besaran insentif, mulai berlakunya, prosedur dan tata cara pembayaran	Pusat Sumber Daya Manusia	2024

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
21	Peraturan Rektor Pengangkatan PUT Non PNS dalam Jabatan di Lingkungan UT	Pertor Pengangkatan PUT Non PNS dalam Jabatan di Lingkungan UT	Pusat Sumber Daya Manusia	2024
22	Besaran pengangkatan, mulai berlakunya pengangkatan, prosedur di tata cara pembayaran	Perlunya penyesuaian Besaran pengangkatan, mulai berlakunya pengangkatan, prosedur di tata cara pembayaran pegawai dalam PTN Badan Hukum	Pusat Sumber Daya Manusia	2024
23	Peraturan Rektor bantuan hukum	Perlunya pedoman bantuan hukum bagi penagawai du UT	Pusat Sumber Daya Manusia	2024
24	Peraturan Rektor Standar Kompetensi Jabatan	Perlunya penyesuaian Standar Kompetensi Jabatan dalam PTN Badan Hukum	Pusat Sumber Daya Manusia	2024
25	SKJ Jabatan Unsur Pimpinan, Jabatan Fungsional, dan Jabatan Pelaksana	Perlunya penyesuaian SKJ Jabatan Unsur Pimpinan, Jabatan Fungsional, dan Jabatan Pelaksana dalam PTN Badan Hukum	Pusat Sumber Daya Manusia	2024
26	Peraturan Rektor Rincian Tugas	Perlu Penyesuaian Rincian Tugas Pegawai dalam PTN Badan Hukum	Pusat Sumber Daya Manusia	2024
27	Rincian Tugas Jabatan Pelaksana	Perlu penyesuaian Rincian Tugas Jabatan Pelaksana dalam PTN Badan Hukum	Pusat Sumber Daya Manusia	2024
28	Peraturan Rektor Pengangkatan sebagai Plt dan Plh	Perliunya penyesuaian Pengangkatan sebagai Plt dan Plh dalam PTN Badan Hukum	Pusat Sumber Daya Manusia	2024

3.3 Kerangka Kelembagaan

Pencapaian visi dan misi UT mengacu kepada PP No 39 tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Terbuka dan Peraturan Rektor UT nomor 1151 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja UT serta nomor 1311 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor UT nomor 1151 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja UT. Proses pelaksanaan pengelolaan institusi merupakan proses bagaimana organ-organ yang ada bekerja berinteraksi secara sinergi untuk memenuhi kepentingan *stakeholders*. Status PTNBH memungkinkan UT melakukan pengembangan organisasi yang lebih dinamis dan menyesuaikan dengan kebutuhan.

UT menerapkan struktur organisasi *slim and flat* yang kaya akan fungsi untuk meningkatkan efisiensi waktu dan koordinasi, biaya akses layanan, serta mengurangi adanya tumpang tindih koordinasi. Berdasarkan PP No 39 tahun 2022 tentang PTNBH, organ UT terdiri atas Majelis Wali Amanat (MWA), Rektor dan Senat Akademik Universitas (SAU). Rektor sebagai organ yang menjalankan fungsi pengelolaan UT, dimana pada pelaksanaannya, organisasi di bawah Rektor terdiri atas unsur pimpinan; pelaksana akademik; penunjang akademik dan nonakademik; pelaksana penjaminan mutu; pengembang dan pelaksana tugas strategis; pelaksana administrasi; pelaksana pengawasan internal; pengelola usaha; dan unsur lain yang diperlukan.

Kerangka organisasi dan tata kerja UT juga diatur dalam Peraturan Rektor No. 1151 tahun 2022. Pada peraturan Rektor tersebut diatur kedudukan, tugas, dan wewenang; susunan organisasi; wakil rektor; pelaksana akademik; penunjang akademik dan nonakademik; pelaksana penjaminan mutu; pengembang dan pelaksana tugas strategis; pelaksana administrasi; pelaksana pengawasan internal; pengelola usaha; dan unsur lain yang diperlukan.

Pengelolaan sumber daya yang dilakukan di UT berkaitan dengan implementasi *roadmap* sumber daya manusia dan *roadmap ICT architecture* yang mencakup seluruh bidang organisasi seperti integrasi sistem keuangan, pendidikan, dan penjaminan mutu. Implementasi tersebut digunakan untuk meningkatkan transformasi organisasi dan kesiapan dalam percepatan menuju integrasi jejaring *cyber university*.

3.4 Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi di UT merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan tinggi jarak jauh. Proses ini melibatkan serangkaian perubahan sistematis dalam struktur organisasi, metode kerja, serta budaya kerja, dengan tujuan utama meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Reformasi birokrasi oleh UT dilakukan sesuai dengan visi, misi, dan tujuan UT. Visi UT yaitu “Menjadi Perguruan Tinggi Jarak Jauh Berkualitas Dunia.” Merujuk pada visi tersebut, maka perlu dilakukan perubahan pada delapan area. Selain itu *Good University Governance* merupakan capaian ideal yang ditargetkan UT dalam melaksanakan pelayanan publik dan mengelola sumber daya.

Untuk mencapai hal tersebut, reformasi birokrasi merupakan langkah strategis dalam rangka melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan. UT berkomitmen mewujudkan penyelenggaraan birokrasi perguruan tinggi berkelas dunia yang ditunjukkan dengan tata kelola yang efektif dan efisien, cepat dan mudah, bersih dan akuntabel, serta memiliki pelayanan publik berkualitas. Reformasi birokrasi yang dilakukan meliputi delapan area perubahan yaitu manajemen perubahan, deregulasi kebijakan, penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen sumber daya manusia aparatur, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, dan penguatan kualitas pelayanan publik. Berdasarkan kondisi yang sudah dipaparkan, maka secara umum tujuan pelaksanaan reformasi birokrasi di UT adalah terciptanya tata kelola yang profesional dan berintegritas tinggi yang mampu menyelenggarakan pelayanan prima kepada masyarakat secara efektif dan efisien. Kondisi yang ingin dicapai pada tiap-tiap area terlihat dalam tabel 3.3 berikut ini.

Tabel 3.3 Area Perubahan Reformasi Birokrasi dan Kondisi yang Ingin Dicapai

No	Area Perubahan	Kondisi yang Akan Dicapai
1	Manajemen Perubahan	<ol style="list-style-type: none">1. Peningkatan keterlibatan secara konsisten dari pimpinan, dosen, dan staf kependidikan di UT dalam mengimplementasikan reformasi birokrasi.2. Perubahan mindset dan budaya kerja yang lebih progresif di kalangan dosen dan staf kependidikan di UT, terutama dalam menanggapi perkembangan zaman.3. Penurunan tingkat penolakan atau ketidaksiapan terhadap perubahan di UT.4. Peningkatan keberadaan dan penerimaan budaya perubahan di UT yang semakin terintegrasi.5. Peningkatan fakultas/unit kerja yang menerapkan Zona Integritas

No	Area Perubahan	Kondisi yang Akan Dicapai
2	Deregulasi Kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan keselarasan UT dengan aturan-aturan yang berlaku di tingkat yang lebih tinggi. 2. Peningkatan koordinasi kebijakan di UT antar berbagai sektor seperti akademik, administrasi umum, keuangan, kemahasiswaan, dan kerjasama. 3. Peningkatan dalam pembuatan kebijakan di UT yang terstruktur dan sistematis, sesuai dengan prinsip-prinsip penulisan hukum yang baik, prosedural, transparan, dan melibatkan partisipasi. 4. Pembentukan sistem pendokumentasian kebijakan yang terorganisir dan mudah diakses. 5. Peningkatan dalam penyebarluasan informasi mengenai kebijakan UT. 6. Peningkatan kepatuhan dan konsistensi dalam penerapan kebijakan di kalangan civitas akademika UT.
3	Penataan dan Penguatan Organisasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meminimalkan <i>overlap</i> dalam menjalankan tugas dan fungsi dasar setiap unit. 2. Menguatkan kemampuan unit kerja dalam menjalankan tugas dan fungsi utamanya. 3. Pembangunan struktur organisasi yang efektif untuk meningkatkan kinerja. 4. Pengurangan tingkat hierarki organisasi untuk memperbaiki efektivitas dan efisiensi operasional. 5. Penerapan struktur organisasi yang lebih sederhana dan kaya fungsi. 6. Memanfaatkan jaringan dan berbagi sumber daya (kerjasama) dengan universitas mitra, termasuk partisipasi tutor dan staf pendidikan, dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi. 7. Maksimalisasi penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam semua proses akademis dan non-akademis.
4	Penataan Tatalaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membangun dan mengimplementasikan sistem penjaminan kualitas yang komprehensif. 2. Meningkatkan standar pendidikan Perguruan Tinggi Terbuka dan Jarak Jauh (PTTJJ) berdasarkan evaluasi dari <i>International Council for Distance Education (ICDE)</i>. 3. Melakukan proses akreditasi untuk lembaga. 4. Pengembangan dan implementasi <i>e-government</i> secara menyeluruh. 5. Menyempurnakan penggunaan <i>e-procurement</i> dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa. 6. Terus mempergunakan sistem manajemen aset yang didukung oleh Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). 7. Meneruskan dan meningkatkan fungsi dan layanan Informasi dan Dokumentasi.

No	Area Perubahan	Kondisi yang Akan Dicapai
5	Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan strategi pengelolaan sumber daya manusia. 2. Meningkatkan keterampilan dan keahlian sumber daya manusia hingga ke tingkat internasional. 3. Keberhasilan menjalankan <i>roadmap human capital</i> yang melingkupi sistem rekrutmen, pengembangan (<i>talent pool, career path</i>, kompetensi, ketersediaan atau kecukupan jumlah SDM), Rotasi/mutasi Pegawai, Penetapan kinerja individu pegawai, Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai dan <i>retirement</i>. 4. Meningkatkan jumlah kualifikasi dan keahlian untuk posisi fungsional Dosen dan fungsional Tenaga Kependidikan. 5. Meningkatkan penggunaan sistem manajemen SDM berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).
6	Penguatan Akuntabilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memperbaiki dan meningkatkan kualitas perjanjian kinerja. 2. Menyelaraskan Rencana Strategis UT dengan Rencana Strategis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. 3. Pengembangan aplikasi yang menyatukan proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. 4. Menyediakan akses informasi terkait perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan serta anggaran untuk pengguna internal dan eksternal sesuai dengan kebutuhan dan otoritas yang berlaku. 5. Melakukan pelaksanaan dan pelaporan dalam pengelolaan keuangan yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
7	Penguatan Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manajemen dan pengawasan atas penerimaan gratifikasi. 2. Meningkatkan implementasi sistem pengawasan internal. 3. Menerima dan menangani keluhan dari masyarakat. 4. Meningkatkan pelaksanaan sistem pelaporan pelanggaran (<i>whistleblowing</i>). 5. Meningkatkan penanganan benturan kepentingan dalam setiap proses bisnis di UT.
8	Penguatan Kualitas Pelayanan Publik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau) pada setiap unit yang ada di UT. 2. Meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperoleh standarisasi pelayanan nasional pada setiap unit di UT. 3. Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik oleh unit yang ada di UT.

BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi UT, UT menetapkan tujuh sasaran strategis sebagai kondisi keberhasilan dari setiap program yang ditetapkan. Setiap sasaran dan program strategis diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) dan Indikator Kinerja Program Strategis (IKPS). Adapun Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) UT dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.1 Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) UT

Kode	Sasaran Strategis	Kode	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Satuan	Target 2024	Target 2025	Rumus Perhitungan
SS 1	Meningkatnya kualitas lulusan	IKSS 1.1	Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2/D1 yang berhasil: a. memiliki pekerjaan; b. melanjutkan studi; atau c. menjadi wiraswasta.	%	10	10	Lampiran 3
		IKSS 1.2	Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2/D1 yang: a. menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi; atau b. meraih prestasi.	%	25	25	Lampiran 3
SS 2	Meningkatnya tata kelola <i>good university governance</i> yang berkelanjutan	IKSS 2.1	Rata-rata predikat SAKIP satker minimal BB	Bobot	A	AA	Lampiran 3
		IKSS 2.2	Meningkatnya tata kelola UT yang baik, kredibel, dan transparan	Ketepatan Penyampaian Laporan Keuangan dan Opini Auditor	WTP	WTP	Lampiran 3
		IKSS 2.3	Meningkatnya ranking UT masuk dalam 1000 besar dunia versi THE Impact dan 20 besar nasional UI GreenMetric	Rangking	75%	75%	Lampiran 3
		IKSS 2.4	Meningkatnya sumber pendapatan UT (non akademik) dengan mengoptimalkan pemanfaatan aset UT	ROI	7.5	7.5	Lampiran 3
		IKSS 2.5	Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 80	Nilai	90	92	Lampiran 3

Kode	Sasaran Strategis	Kode	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Satuan	Target 2024	Target 2025	Rumus Perhitungan
SS 3	Meningkatnya akses pendidikan tinggi bagi seluruh lapisan masyarakat	IKSS 3.1	Peningkatan Jumlah Mahasiswa UT Menuju 1 Juta Mahasiswa	Mahasiswa	750,000	1,000,000	Lampiran 3
		IKSS 3.2	Jumlah kerjasama per program studi S1 dan D4/D3/D2/D1.	Rasio	0.7	0.7	Lampiran 3
SS 4	Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran	IKSS 4.1	Persentase program studi S1 dan D4/D3 yang memiliki akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui pemerintah.	%	5	5	Lampiran 3
		IKSS 4.2	Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis project (team-based project) sebagai bagian dari bobot evaluasi.	%	50	50	Lampiran 3
SS 5	Meningkatnya kualifikasi dan kompetensi dosen	IKSS 5.1	persentase dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri; atau persentase pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia usaha, atau dunia industri.	%	40	40	Lampiran 3
		IKSS 5.2	Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi.	%	30	30	Lampiran 3
SS 6	Meningkatnya jumlah keluaran dosen di bidang penelitian	IKSS 6.2	Jumlah keluaran penelitian dosen yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat/industri/pemerintah per jumlah dosen.	Rasio	1	1	Lampiran 3
SS 7	Meningkatnya jumlah keluaran dosen di bidang pengabdian kepada masyarakat	IKSS 7.1	Jumlah keluaran dosen di bidang pengabdian kepada masyarakat yang diterapkan oleh masyarakat/industri/pemerintah per jumlah dosen.	Rasio	1	1	Lampiran 3

Dari 7 (Tujuh) Sasaran Strategis (SS) dengan 15 Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS), telah ditetapkan 37 Program Strategis (PS) dengan Indikator Kinerja Program Strategis (IKPS) sebagai berikut:

Tabel 4.2 Program Strategis dan Indikator Kinerja Program Strategis

Kode	Program Strategis	Kode	Indikator Kinerja Program Strategis	Satuan	Target 2024	Target 2025	Rumus Perhitungan
PS 1	Optimalisasi fungsi alumni capital sebagai alternatif pengembangan institusi	IKPS 1.1	Jumlah organisasi alumni di semua provinsi yang berkontribusi dalam sosialisasi promosi UT dan menyediakan beasiswa	%	50	75	Lampiran 4
		IKPS 1.2	Persentase pengembangan <i>platform</i> teknologi informasi dan komunikasi untuk manajemen alumni secara terintegrasi	%	50	100	Lampiran 4
PS 2	Penyediaan program pendukung kesuksesan belajar jarak jauh	IKPS 2.1	Persentase tersedianya program pendukung kesuksesan belajar jarak jauh.	%	100	100	Lampiran 4
PS 3	Peningkatan jumlah mahasiswa yang mengikuti program pembelajaran di luar program studi	IKPS 3.1	Persentase mahasiswa yang mengikuti pembelajaran di luar program studi.	%	25	25	Lampiran 4
PS 4	Peningkatan jumlah mahasiswa berprestasi tingkat nasional dan internasional	IKPS 4.1	Persentase mahasiswa yang berprestasi tingkat provinsi, nasional dan internasional.	%	25	25	Lampiran 4
PS 5	Penyediaan program pengembangan diri mahasiswa (ko dan ekstra kurikuler)	IKPS 5.1	Jumlah kemitraan dengan dunia usaha dan industri	Jumlah Mitra	10	12	Lampiran 4
		IKPS 5.2	Jumlah kemitraan yang diterima masyarakat	% (Prodi)	50	50	Lampiran 4
		IKPS 5.3	Persentase pengembangan pusat karir bagi mahasiswa	%	100	100	Lampiran 4

Kode	Program Strategis	Kode	Indikator Kinerja Program Strategis	Satuan	Target 2024	Target 2025	Rumus Perhitungan
PS 6	Kebijakan yang menetapkan parameter dan kriteria yang harus dicapai, perencanaan proses, serta standar yang harus diterapkan dan cara pengendaliannya	IKPS 6.1	Persentase tersedianya Sistem Penjaminan Mutu UT yang mengintegrasikan SN Dikti dan Karakteristik UT (Simintas 2023)	%	75	100	Lampiran 4
PS 7	Pelaksanaan dan pengendalian standar dilakukan di berbagai proses yang relevan	IKPS 7.1	Persentase tersedianya Dokumen SPMI UT	%	100%	100%	Lampiran 4
PS 8	Evaluasi penerapan dan capaian standar yang dilakukan melalui Audit Mutu baik secara internal maupun eksternal	IKPS 8.1	Persentase Implementasi Audit Mutu Internal berbasis teknologi	%	75	100	Lampiran 4
PS 9	Pengendalian melalui kegiatan tindak lanjut yang diperlukan dari hasil audit untuk meningkatkan konsistensi penerapan dan capaian standar	IKPS 9.1	Predikat akreditasi unit	Predikat	A/Unggul/ Sangat Baik	A/Unggul/ Sangat Baik	Lampiran 4
		IKPS 9.2	Jumlah unit yang memperoleh sertifikasi ISO	Unit	1	1	Lampiran 4
PS 10	Peningkatan kepatuhan terhadap ketentuan dan segala peraturan	IKPS 10.1	Persentase implementasi pedoman Manajemen Risiko oleh unit	%	20	20	Lampiran 4
PS 11	Peningkatan kepercayaan terhadap pemangku kepentingan UT	IKPS 11.1	Persentase pemutakhiran pedoman audit berbasis risiko	%	75	100	Lampiran 4
PS 12	Pelaksanaan pengelolaan institusi secara desentralistik melalui kecakapan kelembagaan	IKPS 12.1	Persentase pengelolaan institusi melalui manajemen data terpadu	%	50	100	Lampiran 4

Kode	Program Strategis	Kode	Indikator Kinerja Program Strategis	Satuan	Target 2024	Target 2025	Rumus Perhitungan
PS 13	Keberhasilan menjalankan <i>roadmap human capital</i>	IKPS 13.1	Persentase implementasi <i>roadmap human capital</i> secara komperhensif	%	50	75	Lampiran 4
PS 14	Tranformasi digital sistem manajemen infrastruktur secara komprehensif	IKPS 14.1	Persentase terintegrasinya sistem digital untuk manajemen sarana dan prasarana dengan memanfaatkan teknologi mutakhir	%	75	100	Lampiran 4
		IKPS 14.2	Persentase implementasi <i>roadmap</i> sarana dan prasarana dengan utilisasi integrasi jejaring cyber university	%	75	100	Lampiran 4
PS 15	Integrasi sistem tata kelola pengelolaan dana dengan prinsip akuntabilitas, tranparansi serta efektif, efisien dan ekonomis (3E)	IKPS 15.1	Persentase integrasi sistem tata kelola pengelolaan dana dengan prinsip akuntabilitas, tranparansi serta efektif, efisien dan ekonomis (3E)	%	75	100	Lampiran 4
PS 16	Pengembangan dan penguatan infrastruktur TIK secara terintegrasi untuk menunjang tridharma dan <i>stakeholder</i>	IKPS 16.1	Persentase penguatan infrastruktur TIK melalui kegiatan peremajaan dan penambahan kapasitas untuk mendukung tridharma dan stakeholder perguruan tinggi dan memastikan ketersediaan layanan infratraktur TIK berdasarkan kebutuhan strategis UT	%	50	75	Lampiran 4
		IKPS 16.2	Persentase pengembangan dan implementasi standar tata Kelola TIK (Sistem dan Jaringan) berstandar industri TIK serta mendapat pengakuan dari lembaga penjamin mutu internasional	%	50	60	Lampiran 4
PS 17	Riset dan pengembangan sistem dan infrastruktur TIK menggunakan teknologi terbaru untuk memperkuat	IKPS 17.1	Persentase implementasi digital sistem layanan TIK berdasarkan DLE UT yang mengutamakan integrasi antar sistem, automasi dan sistem cerdas	%	30	50	Lampiran 4

Kode	Program Strategis	Kode	Indikator Kinerja Program Strategis	Satuan	Target 2024	Target 2025	Rumus Perhitungan
	posisi UT sebagai <i>Cyber University</i>						
PS 18	Peningkatan ketahanan UT	IKPS 18.1	Persentase tercapainya maturitas manajemen UT berbasis risiko pada tingkat "Risk Defined"	%	20	30	Lampiran 4
PS 19	Penguatan infrastruktur ekosistem pendidikan yang unggul dengan menggunakan teknologi ramah lingkungan dan responsif <i>gender</i>	IKPS 19.1	Persentase tersedianya sarana dan prasarana berbasis digital untuk mendukung UT sebagai <i>cyber university</i> dengan memperhatikan teknologi ramah lingkungan dan responsif <i>gender</i>	%	75	80	Lampiran 4
PS 20	Penguatan investasi dana melalui instrumen yang <i>profitable</i>	IKPS 20.1	Persentase penguatan investasi dana melalui instrumen yang <i>profitable</i>	%	1	2	Lampiran 4
PS 21	Peningkatan diversifikasi pendanaan sektor usaha dan jumlah <i>revenue generating activities</i> (RGAs)	IKPS 21.1	Persentase peningkatan diversifikasi pendanaan yang bersumber dari sektor usaha dan penunjang komersil lainnya	%	0,5	0.6	Lampiran 4
PS 22	Pemberian dasar yang kuat dalam pengambilan keputusan	IKPS 22.1	Persentase tersedia peta risiko di tingkat universitas dan unit	%	70	100	Lampiran 4
PS 23	Peningkatan jumlah mahasiswa yang melakukan admisi dan registrasi mata kuliah	IKPS 23.1	Persentase kenaikan jumlah mahasiswa pertahun berdasarkan target	%	100	100	Lampiran 4
		IKPS 23.2	Persentase perluasan daya jangkau layanan	%	50	100	Lampiran 4
PS 24	Peningkatan jumlah retensi mahasiswa	IKPS 24.1	Persentase peningkatan jumlah retensi mahasiswa	%	60	70	Lampiran 4
PS 25	Penguatan sistem layanan terintegrasi yang memfasilitasi pemangku kepentingan	IKPS 25.1	Persentase pengembangan sistem layanan terpadu yang sudah terintegrasi di wilayah Indonesia	%	80	100	Lampiran 4
		IKPS 25.2	Persentase mahasiswa yang menggunakan akses internet gratis	%	20	25	Lampiran 4
		IKPS 25.3	Persentase kepuasan stakeholders	%	95%	90%	Lampiran 4

Kode	Program Strategis	Kode	Indikator Kinerja Program Strategis	Satuan	Target 2024	Target 2025	Rumus Perhitungan
PS 26	Peningkatan dan penguatan kerja sama antar institusi dengan berfokus pada akademik dan non-akademik	IKPS 26.1	Jumlah kerja sama akademik dengan institusi negeri dan swasta di dalam negeri	Implementasi Kerja sama (IA)	120	160	Lampiran 4
		IKPS 26.2	Jumlah kerja sama akademik dengan perguruan tinggi atau lembaga internasional	Implementasi Kerja sama (IA)	10	15	Lampiran 4
		IKPS 26.3	Jumlah kerja sama pada bidang non akademik di dalam negeri	Implementasi Kerja sama (IA)	150	250	Lampiran 4
		IKPS 26.4	Jumlah kerja sama internasional pada bidang non akademik	Implementasi Kerja sama (IA)	5	7	Lampiran 4
PS 27	Pendidikan berkualitas tinggi yang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat	IKPS 27.1	Jumlah program studi akreditasi A/Unggul	Prodi	15	15	Lampiran 4
		IKPS 27.2	Jumlah program studi baru sesuai kebutuhan masyarakat	Prodi	10	5	Lampiran 4
		IKPS 27.3	UT memperoleh predikat A (Unggul) untuk Akreditasi Perguruan Tinggi	Predikat	A (Unggul)	A (Unggul)	Lampiran 4
		IKPS 27.4	Jumlah program sertifikat yang mendukung kompetensi dan daya saing lulusan di tingkat nasional dan global	Program	4	4	Lampiran 4
		IKPS 27.5	Persentase kualitas sarana dan prasarana yang layak digunakan untuk mendukung kualitas pendidikan	%	100	100	Lampiran 4
PS 28	Peningkatan Standar berdasarkan umpan balik dari berbagai pihak penerima manfaat dari layanan dan program yang diberikan	IKPS 28.1	Persentase Program Studi Diploma/S1 yang memperoleh peringkat akreditasi internasional	%	5	5	Lampiran 4
PS 29	Kurikulum era digital dan mengakomodir masukan pemangku kepentingan (<i>stakeholder</i>)	IKPS 29.1	Jumlah program studi yang memiliki kurikulum berbasis luaran (OBE) dan mengakomodasi layanan <i>multi entry multi exit</i> (MEME).	Prodi	1	2	Lampiran 4
		IKPS 29.2	Jumlah mata kuliah bersama dan/atau bahan ajar bersama.	Jumlah Mata Kuliah Bersama	300	500	Lampiran 4

Kode	Program Strategis	Kode	Indikator Kinerja Program Strategis	Satuan	Target 2024	Target 2025	Rumus Perhitungan
		IKPS 29.3	Jumlah program studi Diploma/Sarjana dengan kurikulum yang mengakomodasi pembelajaran di luar program studi.	Prodi	35	38	Lampiran 4
PS 30	Desain pembelajaran dan bahan ajar yang interaktif dan inovatif	IKPS 30.1	Persentase pengembangan dan implementasi bahan pembelajaran berbasis kasus (<i>case method</i>), <i>project based model</i> , dan teknologi media	%	50	50	Lampiran 4
		IKPS 30.2	Persentase tutor yang berasal dari profesional dan industri	%	20	20	Lampiran 4
		IKPS 30.3	Persentase layanan pembelajaran termasuk praktik dan praktikum yang terintegrasi dengan teknologi digital	%	80	85	Lampiran 4
PS 31	Peningkatan kompetensi dan kualifikasi SDM yang mendukung <i>World Class University</i>	IKPS 31.1	Persentase peningkatan kompetensi dan kualifikasi SDM yang mendukung <i>World Class University</i>	%	50	75	Lampiran 4
PS 32	Peningkatan kolaborasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat	IKPS 32.1	Jumlah program PkM kolaborasi dengan mitra luar negeri	Program	10	10	Lampiran 4
		IKPS 32.2	Persentase program PkM yang melibatkan mahasiswa dan/atau alumni	%	100	100	Lampiran 4
		IKPS 32.3	Jumlah PkM mahasiswa	Program	20	30	Lampiran 4
PS 33	Peningkatan jumlah publikasi nasional dan internasional	IKPS 33.1	Jumlah publikasi di jurnal nasional dan internasional, baik melalui skema mandiri maupun kerja sama dengan PT ternama di dalam dan luar negeri.	Artikel	100	125	Lampiran 4
PS 34	Penguatan kolaborasi penelitian secara nasional dan internasional	IKPS 34.1	Jumlah penelitian kolaborasi dengan mitra di dalam negeri termasuk DUDI	Judul	10	15	Lampiran 4
		IKPS 34.2	Jumlah kerjasama penelitian dengan perguruan tinggi atau lembaga internasional	Judul	10	15	Lampiran 4
		IKPS 34.3	Jumlah penelitian yang melibatkan mahasiswa	Judul	150	200	Lampiran 4

Kode	Program Strategis	Kode	Indikator Kinerja Program Strategis	Satuan	Target 2024	Target 2025	Rumus Perhitungan
PS 35	Penguatan sistem pengelolaan penelitian secara suportif	IKPS 35.1	Jumlah inovasi yang digunakan oleh masyarakat dan/atau pemerintah	Inovasi	5	10	Lampiran 4
		IKPS 35.2	Jumlah inovasi/rekacipta hilirisasi DUDI	Jumlah inovasi/rekacipta	1	2	Lampiran 4
		IKPS 35.3	Jumlah jurnal UT	Jurnal	15	20	Lampiran 4
		IKPS 35.4	Jumlah jurnal UT yang bereputasi Nasional	Jurnal	9	11	Lampiran 4
PS 36	Peningkatan program pemberdayaan masyarakat berbasis teknologi	IKPS 36.1	Jumlah PkM berbasis teknologi	Program	2	4	Lampiran 4
		IKPS 36.2	Jumlah publikasi hasil program pengabdian masyarakat	Artikel	100	125	Lampiran 4
PS 37	Peningkatan diversifikasi program pengabdian kepada masyarakat	IKPS 37.1	Jumlah program pendidikan yang berkelanjutan/Sertifikat	Program	4	5	Lampiran 4
		IKPS 37.2	Jumlah program MOOCs	Program	50	55	Lampiran 4

Melalui pencapaian target IKSS tersebut diharapkan dapat mendukung pencapaian kinerja UT yang tertuang dalam Sasaran Strategis (SS) UT.

4.2 Kerangka Pendanaan

Pencapaian Sasaran Strategis (SS) UT memerlukan dukungan berbagai macam sumber daya, diantaranya sumber pendanaan yang memadai. Sehubungan dengan dukungan pendanaan tersebut, berikut ini adalah indikasi kebutuhan pendanaan tahun 2024 dan 2025 yang dikelompokkan berdasarkan Program Strategis (PS) UT.

Tabel 4.3 Indikasi Kebutuhan Pendanaan

No	Program Strategis	Alokasi Anggaran 2024 (Rp)	Alokasi Anggaran 2025 (Rp)
1	Optimalisasi fungsi alumni capital sebagai alternatif pengembangan institusi.	629.994.000	856.791.000
2	Penyediaan program pendukung kesuksesan belajar jarak jauh.	91.148.166.000	123.961.505.000
3	Peningkatan jumlah mahasiswa yang mengikuti program pembelajaran di luar program studi.	50.000.000	68.000.000

No	Program Strategis	Alokasi Anggaran 2024 (Rp)	Alokasi Anggaran 2025 (Rp)
4	Peningkatan jumlah mahasiswa berprestasi tingkat nasional dan internasional.	9.726.856.000	13.228.524.000
5	Penyediaan program pengembangan diri mahasiswa (ko dan ekstra kurikuler).	165.524.000	225.112.000
6	Kebijakan yang menetapkan parameter dan kriteria yang harus dicapai, perencanaan proses, serta standar yang harus diterapkan dan cara pengendaliannya.	487.334.000	662.774.000
7	Pelaksanaan dan pengendalian standar dilakukan di berbagai proses yang relevan.	728.692.000	991.021.000
8	Evaluasi penerapan dan capaian standar yang dilakukan melalui Audit Mutu baik secara internal maupun eksternal.	1.845.166.000	2.509.425.000
9	Pengendalian melalui kegiatan tindak lanjut yang diperlukan dari hasil audit untuk meningkatkan konsistensi penerapan dan capaian standar.	1.179.334.000	1.603.894.000
10	Peningkatan kepatuhan terhadap ketentuan dan segala peraturan;	832.640.000	1.132.390.000
11	Peningkatan kepercayaan terhadap pemangku kepentingan UT;	8.440.799.000	11.479.486.000
12	Pelaksanaan pengelolaan institusi secara desentralistik melalui kecakapan kelembagaan.	2.362.579.000	3.213.107.000
13	Keberhasilan menjalankan <i>roadmap human capital</i> .	681.936.233.000	927.433.276.000
14	Transformasi digital sistem manajemen infrastruktur secara komprehensif.	52.820.415.000	71.835.764.000
15	Integrasi sistem tata kelola pengelolaan dana dengan prinsip akuntabilitas, transparansi serta efektif, efisien dan ekonomis (3E).	45.080.647.000	61.309.679.000
16	Pengembangan dan penguatan infrastruktur TIK secara terintegrasi untuk menunjang tridharma dan <i>stakeholder</i> .	161.578.000	219.746.000
17	Riset dan pengembangan sistem dan infrastruktur TIK menggunakan teknologi terbaru untuk memperkuat posisi UT sebagai <i>Cyber University</i>	5.992.275.000	8.149.494.000
18	Peningkatan ketahanan UT.	498.589.000	678.081.000

No	Program Strategis	Alokasi Anggaran 2024 (Rp)	Alokasi Anggaran 2025 (Rp)
19	Penguatan infrastruktur ekosistem pendidikan yang unggul dengan menggunakan teknologi ramah lingkungan dan responsif gender.	630.325.548.000	857.242.745.000
20	Penguatan investasi dana melalui instrumen yang <i>profitable</i> .	506.104.000	688.301.000
21	Peningkatan diversifikasi pendanaan sektor usaha dan jumlah <i>revenue generating activities</i> (RGAs).	12.587.727.000	17.119.308.000
22	Pemberian dasar yang kuat dalam pengambilan keputusan;	469.808.000	638.938.000
23	Peningkatan jumlah mahasiswa yang melakukan admisi dan registrasi mata kuliah.	4.328.015.000	5.886.100.000
24	Peningkatan jumlah retensi mahasiswa.	1.311.228.000	1.783.270.000
25	Penguatan sistem layanan terintegrasi yang memfasilitasi pemangku kepentingan.	70.464.036.000	95.831.088.000
26	Peningkatan dan penguatan kerja sama antar institusi dengan berfokus pada akademik dan non-akademik.	2.032.544.000	2.764.259.000
27	Pendidikan berkualitas tinggi yang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.	231.979.453.000	315.492.056.000
28	Peningkatan Standar berdasarkan umpan balik dari berbagai pihak penerima manfaat dari layanan dan program yang diberikan.	35.833.580.000	48.733.668.000
29	Kurikulum era digital dan mengakomodir masukan pemangku kepentingan (<i>stakeholder</i>).	279.818.569.000	380.553.253.000
30	Desain pembelajaran dan bahan ajar yang interaktif dan inovatif.	320.128.203.000	435.374.356.000
31	Peningkatan kompetensi dan kualifikasi SDM yang mendukung <i>World Class University</i> .	8.151.302.000	11.085.770.000
32	Peningkatan kolaborasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat;	28.856.460.000	39.244.785.000
33	Peningkatan jumlah publikasi nasional dan internasional.	6.269.169.000	8.526.069.000
34	Penguatan kolaborasi penelitian secara nasional dan internasional.	73.120.000	99.443.000
35	Penguatan sistem pengelolaan penelitian secara suportif.	33.451.804.000	45.494.453.000
36	Peningkatan program pemberdayaan masyarakat berbasis teknologi	24.557.291.000	33.397.915.000
37	Peningkatan diversifikasi program pengabdian kepada masyarakat;	1.000.108.000	1.360.164.000

No	Program Strategis	Alokasi Anggaran 2024 (Rp)	Alokasi Anggaran 2025 (Rp)
	Total Indikasi Anggaran	2.596.230.890.000	3.530.874.010.000

Cascading antara Visi, Misi, Tujuan yang diturunkan pada Sasaran Strategis (SS) dan Program Strategis (PS) dapat dilihat pada Lampiran 1 tentang Pohon Kinerja UT. Adapun kaitan antara Program Strategis (PS), Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS), Program Strategis (SS), Indikator Kinerja Program Strategis (IKPS) dengan pendanaan dapat dilihat pada Lampiran 2 tentang Matrik Kinerja dan Pendanaan.

BAB V

PENUTUP

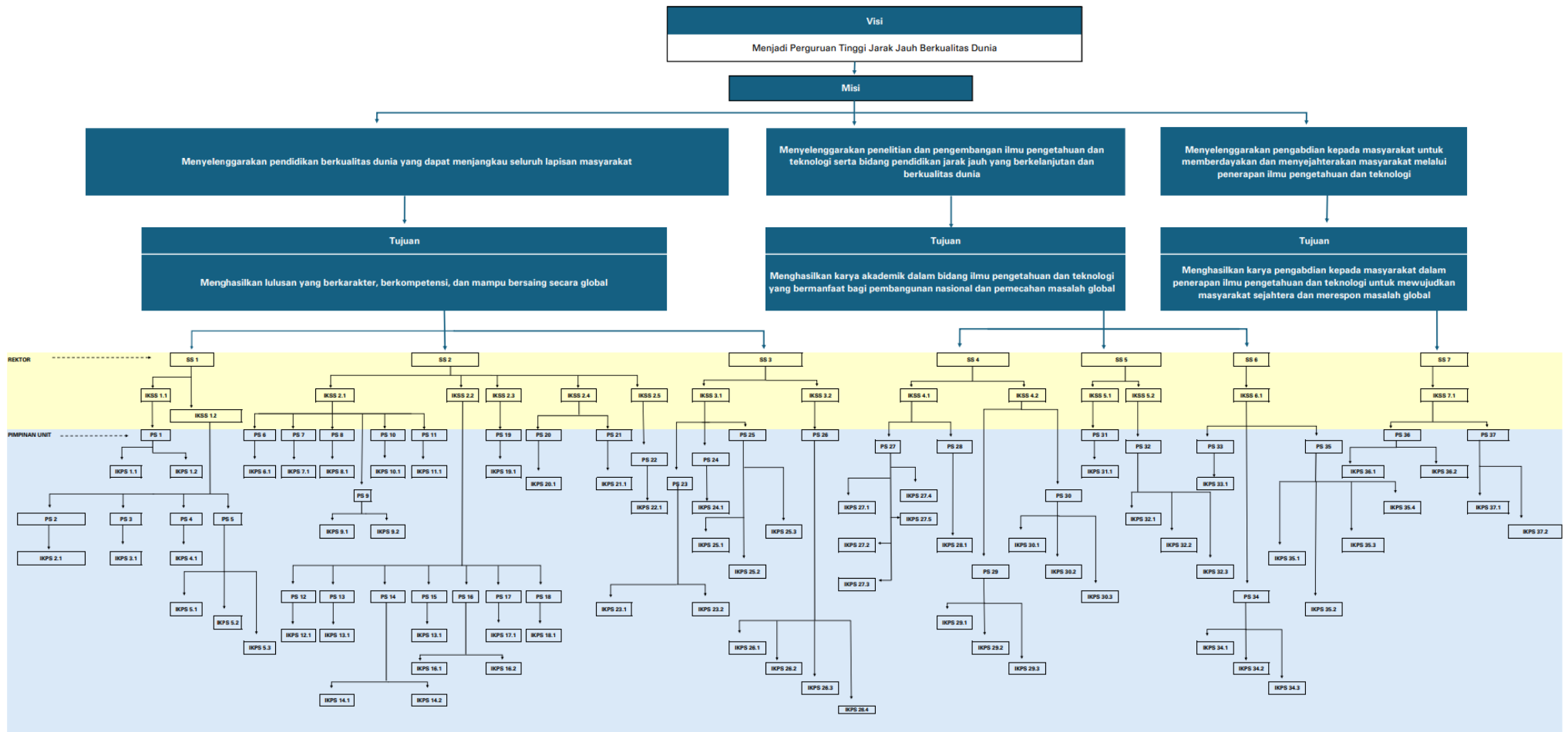
Sebagai perguruan tinggi negeri yang telah berbadan hukum, UT selalu adaptif dan mengikuti dinamika yang terjadi. Tren peningkatan minat masyarakat terhadap penyelenggaraan perguruan tinggi non-tatap muka, yang itu ditandai dengan semakin meningkatnya jumlah mahasiswa, menjadikan UT selalu menjaga layanan kualitas pembelajaran yang diberikan. Kemudahan aksesibilitas dalam berbagai penyelenggaraan layanan menjadi suatu keharusan.

Penyusunan Rencana Strategis Antara UT Tahun 2024-2025 ini menjadi sebuah komitmen yang dijadikan rujukan bagi semua sivitas akademika dalam menjalankan proses bisnis UT. Strategis Antara UT Tahun 2024-2025 ini menjadi salah satu dokumen penting yang diharapkan menjadi pemicu dan pemacu segala aktivitas dan tujuan yang diharapkan dicapai. Semua SDM di UT, di bawah pimpinan Rektor, bergerak bersama mewujudkan visi-misi dengan melandaskan pandangan pada dokumen ini.

Berbagai gambaran umum tentang visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi, kondisi umum UT, analisis potensi dan analisis permasalahan berdasarkan evaluasi kinerja UT, ketersediaan SDM, layanan akademik dan non akademik berbasis *digital learning ecosystem* (DLE), penguatan tatakelola UT-PTNBH dan budaya kerja, peningkatan sarana dan prasarana serta pemanfaatan aset sebagai *revenue generating*, inovasi dan reputasi, peran alumni, kerja sama dan kemitraan, dan target kinerja serta kerangka pendanaan telah disajikan dalam dokumen ini. Demikian juga perencanaan strategik yang harus ditempuh UT dalam berbagai bidang. Semoga Rencana Strategis Antara UT Tahun 2024-2025 ini mampu menjadi navigasi utama dalam memaksimalkan fungsi dan peran Rektor dalam memimpin UT sebagai perguruan tinggi berbadan hukum dengan selalu menjaga sinergitas dengan MWA dan Senat Akademik UT.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Pohon Kinerja Universitas Terbuka



Lampiran 2 Matriks Kinerja dan Pendanaan

Pejabat/Kode		SS/ IKSS/PS/IKPS	Satuan	Target 2024	Target 2025	Alokasi Anggaran 2024	Alokasi Anggaran 2025	Unit Pelaksana
Rektor	Pimpinan Unit							
SS 1	Meningkatnya kualitas lulusan							
IKSS 1.1	Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2/D1 yang berhasil: a. memiliki pekerjaan; b. melanjutkan studi; atau c. menjadi wiraswasta.		%	10	10			
	PS 1	Optimalisasi fungsi alumni capital sebagai alternatif pengembangan institusi.			629.994.000	856.791.000	LPPM, SPs	
	IKPS 1.1	Jumlah organisasi alumni di semua provinsi yang berkontribusi dalam sosialisasi promosi UT dan menyediakan beasiswa	%	50	75			
	IKPS 1.2	Persentase pengembangan <i>platform</i> teknologi informasi dan komunikasi untuk manajemen alumni secara terintegrasi	%	50	100			
IKSS 1.2	Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2/D1 yang: a. menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi; atau b. meraih prestasi.		%	25	25			
	PS 2	Penyediaan program pendukung kesuksesan belajar jarak jauh.			91.148.166.000	123.961.505.000	Fakultas, SPs, LPPM, PPK, UT Daerah, DAAK, DPKS, P2BAM, PPPb	
	IKPS 2.1	Persentase tersedianya program pendukung kesuksesan belajar jarak jauh.	%	100	100			
	PS 3	Peningkatan jumlah mahasiswa yang mengikuti program pembelajaran di luar program studi.			50.000.000	68.000.000	Fakultas	
	IKPS 3.1	Persentase mahasiswa yang mengikuti pembelajaran di luar program studi.	%	25	25			
	PS 4	Peningkatan jumlah mahasiswa berprestasi tingkat nasional dan internasional.			9.726.856.000	13.228.524.000		

Pejabat/Kode		SS/ IKSS/PS/IKPS	Satuan	Target 2024	Target 2025	Alokasi Anggaran 2024	Alokasi Anggaran 2025	Unit Pelaksana
Rektor	Pimpinan Unit							
	IKPS 4.1	Persentase mahasiswa yang berprestasi tingkat provinsi, nasional dan internasional.	%	25	25			Fakultas, SPs, SRUH
	PS 5	Penyediaan program pengembangan diri mahasiswa (ko dan ekstra kurikuler).				165.524.000	225.112.000	DAAK, Fakultas, UT Luar Negeri, UT Daerah
	IKPS 5.1	Jumlah kemitraan dengan dunia usaha dan industri	Jumlah Mitra	10	12			
	IKPS 5.2	Jumlah kemitraan yang diterima masyarakat	% (Prodi)	50	50			
	IKPS 5.3	Persentase pengembangan pusat karir bagi mahasiswa	%	100	100			
SS 2	Meningkatnya tata kelola <i>good university governance</i> yang berkelanjutan							
IKSS	Rata-rata predikat SAKIP satker minimal BB		Bobot	A	AA			
2.1	PS 6	Kebijakan yang menetapkan parameter dan kriteria yang harus dicapai, perencanaan proses, serta standar yang harus diterapkan dan cara pengendaliannya.				487.334.000	662.774.000	KPI, KPM, SRUH, UT Daerah
	IKPS 6.1	Persentase tersedianya Sistem Penjaminan Mutu UT yang mengintegrasikan SN Dikti dan Karakteristik UT (Simintas 2023)	%	75	100			
	PS 7	Pelaksanaan dan pengendalian standar dilakukan di berbagai proses yang relevan.				728.692.000	991.021.000	KPM, KPI, SRUH, Semua Unit
	IKPS 7.1	Persentase tersedianya Dokumen SPMI UT	%	100	100			
	PS 8	Evaluasi penerapan dan capaian standar yang dilakukan melalui Audit Mutu baik secara internal maupun eksternal.				1.845.166.000	2.509.425.000	KPM, KPI, SRUH, Semua Unit
	IKPS 8.1	Persentase Implementasi Audit Mutu Internal berbasis teknologi	%	75	100			
	PS 9	Pengendalian melalui kegiatan tindak lanjut yang diperlukan dari hasil audit untuk meningkatkan konsistensi penerapan dan capaian standar.				1.179.334.000	1.603.894.000	KPM, KPI, SRUH, Semua Unit

Pejabat/Kode		SS/ IKSS/PS/IKPS	Satuan	Target 2024	Target 2025	Alokasi Anggaran 2024	Alokasi Anggaran 2025	Unit Pelaksana
Rektor	Pimpinan Unit							
	IKPS 9.1	Predikat akreditasi unit	Predikat	A/Unggul/ Sangat Baik	A/Unggul/ Sangat Baik			
	IKPS 9.2	Jumlah unit yang memperoleh sertifikasi ISO	Unit	1	1			
	PS 10	Peningkatan kepatuhan terhadap ketentuan dan segala peraturan;				832.640.000	1.132.390.000	DMA PBJ, KPI, PPK, SRUH
	IKPS 10.1	Persentase implementasi pedoman Manajemen Risiko oleh unit	%	20	20			
	PS 11	Peningkatan kepercayaan terhadap pemangku kepentingan UT;				8.440.799.000	11.479.486.000	DMA PBJ, KPI, PPK, SRUH
	IKPS 11.1	Persentase pemutakhiran pedoman audit berbasis risiko	%	75	100			
IKSS 2.2	Meningkatnya tata kelola UT yang baik, kredibel, dan transparan	Ketepatan Penyampaian Laporan Keuangan dan Opini Auditor		WTP	WTP			
	PS 12	Pelaksanaan pengelolaan institusi secara desentralistik melalui kecakapan kelembagaan.				2.362.579.000	3.213.107.000	DSI, KPM, P2BAM, SRUH, PPK, UT Daerah
	IKPS 12.1	Persentase pengelolaan institusi melalui manajemen data terpadu	%	50	100			
	PS 13	Keberhasilan menjalankan <i>roadmap human capital</i> .				681.936.233.000	927.433.276.000	Semua Unit
	IKPS 13.1	Persentase implementasi <i>roadmap human capital</i> secara komprehensif	%	50	75			
	PS 14	Transformasi digital sistem manajemen infrastruktur secara komprehensif.				52.820.415.000	71.835.764.000	Pusat Pengelolaan Pembelajaran, UT Daerah, DMA PBJ, DSI, Pusrenpor
	IKPS 14.1	Persentase terintegrasinya sistem digital untuk manajemen sarana dan prasarana dengan memanfaatkan teknologi mutakhir	%	75	100			

Pejabat/Kode		SS/ IKSS/PS/IKPS	Satuan	Target 2024	Target 2025	Alokasi Anggaran 2024	Alokasi Anggaran 2025	Unit Pelaksana
Rektor	Pimpinan Unit							
	IKPS 14.2	Persentase implementasi roadmap sarana dan prasarana dengan utilisasi integrasi jejaring cyber university	%	75	100			
	PS 15	Integrasi sistem tata kelola pengelolaan dana dengan prinsip akuntabilitas, tranparansi serta efektif, efisien dan ekonomis (3E).				45.080.647.000	61.309.679.000	Semua Unit
	IKPS 15.1	Persentase integrasi sistem tata kelola pengelolaan dana dengan prinsip akuntabilitas, tranparansi serta efektif, efisien dan ekonomis (3E)	%	75	100			
	PS 16	Pengembangan dan penguatan infrastruktur TIK secara terintegrasi untuk menunjang tridharma dan <i>stakeholder</i> .				161.578.000	219.746.000	KPM, DAAK
	IKPS 16.1	Persentase penguatan infrastruktur TIK melalui kegiatan peremajaan dan penambahan kapasitas untuk mendukung tridharma dan stakeholder perguruan tinggi dan memastikan ketersediaan layanan infratraktur TIK berdasarkan kebutuhan strategis UT	%	50	75			
	IKPS 16.2	Persentase pengembangan dan implementasi standar tata Kelola TIK (Sistem dan Jaringan) berstandar industri TIK serta mendapat pengakuan dari lembaga penjamin mutu internasional	%	50	60			
	PS 17	Pengembangan sistem dan infrastruktur TIK menggunakan teknologi terbaru untuk memperkuat posisi UT sebagai <i>Cyber University</i>				5.992.275.000	8.149.494.000	DAAK, DSI, PSDM

Pejabat/Kode		SS/ IKSS/PS/IKPS	Satuan	Target 2024	Target 2025	Alokasi Anggaran 2024	Alokasi Anggaran 2025	Unit Pelaksana
Rektor	Pimpinan Unit							
	IKPS 17.1	Persentase implementasi digital sistem layanan TIK berdasarkan DLE UT yang mengutamakan integrasi antar sistem, automasi dan sistem cerdas	%	30	50			
	PS 18	Peningkatan ketahanan UT.				498.589.000	678.081.000	DMA PBJ, KPI, PPK, SRUH
	IKPS 18.1	Persentase tercapainya maturitas manajemen UT berbasis risiko pada tingkat “ <i>Risk Defined</i> ”	%	20	30			
IKSS 2.3	Meningkatnya ranking UT masuk dalam 1000 besar dunia versi THE Impact dan 20 besar nasional UI GreenMetric		Rangking	75%	75%			
	PS 19	Penguatan infrastruktur ekosistem pendidikan yang unggul dengan menggunakan teknologi ramah lingkungan dan responsif gender.				630.325.548.000	857.242.745.000	DMA PBJ, KPI, PPBI, Pusrenpor
	IKPS 19.1	Persentase tersedianya sarana dan prasarana berbasis digital untuk mendukung UT sebagai <i>cyber university</i> dengan memperhatikan teknologi ramah lingkungan dan responsif gender.	%	75	80			
IKSS 2.4	Meningkatnya sumber pendapatan UT (non akademik) dengan mengoptimalkan pemanfaatan aset UT		ROI	7,5	7,5			
	PS 20	Penguatan investasi dana melalui instrumen yang <i>profitable</i> .				506.104.000	688.301.000	PPBI, SRUH
	IKPS 20.1	Persentase penguatan investasi dana melalui instrumen yang <i>profitable</i>	%	1	2			
	PS 21	Peningkatan diversifikasi pendanaan sektor usaha dan jumlah <i>revenue generating activities</i> (RGAs).				12.587.727.000	17.119.308.000	PPBI
	IKPS 21.1	Persentase peningkatan diversifikasi pendanaan yang bersumber dari sektor usaha dan penunjang komersil lainnya	%	0,5	0,6			

Pejabat/Kode		SS/ IKSS/PS/IKPS	Satuan	Target 2024	Target 2025	Alokasi Anggaran 2024	Alokasi Anggaran 2025	Unit Pelaksana
Rektor	Pimpinan Unit							
IKSS 2.5	Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 80		Nilai	90	92			
	PS 22	Pemberian dasar yang kuat dalam pengambilan keputusan;				469.808.000	638.938.000	Pusrenpor, SRUH
	IKPS 22.1	Persentase tersedia peta risiko di tingkat universitas dan unit	%	70	100			
SS 3	Meningkatnya akses pendidikan tinggi bagi seluruh lapisan masyarakat							
IKSS 3.1	Peningkatan Jumlah Mahasiswa UT Menuju 1 Juta Mahasiswa		Mahasiswa	750.000	1.000.000			
	PS 23	Peningkatan jumlah mahasiswa yang melakukan admisi dan registrasi mata kuliah.				4.328.015.000	5.886.100.000	DPKS, SRUH, Fakultas, SPs, PPK
	IKPS 23.1	Persentase kenaikan jumlah mahasiswa pertahun berdasarkan target	%	100	100			
	IKPS 23.2	Persentase perluasan daya jangkau layanan	%	50	100			
	PS 24	Peningkatan jumlah retensi mahasiswa.				1.311.228.000	1.783.270.000	Fakultas
	IKPS 24.1	Persentase peningkatan jumlah retensi mahasiswa	%	60	70			
	PS 25	Penguatan sistem layanan terintegrasi yang memfasilitasi pemangku kepentingan.				70.464.036.000	95.831.088.000	DAAK, SRUH, Fakultas, DPKS, PLBA, KPM, DSI
	IKPS 25.1	Persentase pengembangan sistem layanan terpadu yang sudah terintegrasi di wilayah Indonesia	%	80	100			
	IKPS 25.2	Persentase mahasiswa yang menggunakan akses internet gratis	%	20	25			
IKPS 25.3	Persentase kepuasan stakeholders	%	95	90				
IKSS 3.2	Jumlah kerjasama per program studi S1 dan D4/D3/D2/D1.		Rasio	0,7	0,7			

Pejabat/Kode		SS/ IKSS/PS/IKPS	Satuan	Target 2024	Target 2025	Alokasi Anggaran 2024	Alokasi Anggaran 2025	Unit Pelaksana
Rektor	Pimpinan Unit							
	PS 26	Peningkatan dan penguatan kerja sama antar institusi dengan berfokus pada akademik dan non-akademik.				2.032.544.000	2.764.259.000	DPKS, LPPM, PPBI, SRUH, KPM
	IKPS 26.1	Jumlah kerja sama akademik dengan institusi negeri dan swasta di dalam negeri	Implementasi Kerja sama (IA)	120	160			
	IKPS 26.2	Jumlah kerja sama akademik dengan perguruan tinggi atau lembaga internasional	Implementasi Kerja sama (IA)	10	15			
	IKPS 26.3	Jumlah kerja sama pada bidang non akademik di dalam negeri	Implementasi Kerja sama (IA)	150	250			
	IKPS 26.4	Jumlah kerja sama internasional pada bidang non akademik	Implementasi Kerja sama (IA)	5	7			
SS 4	Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran							
IKSS 4.1	Persentase program studi S1 dan D4/D3 yang memiliki akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui pemerintah.		%	5	5			
	PS 27	Pendidikan berkualitas tinggi yang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.				231.979.453.000	315.492.056.000	DAAK, KPM, Fakultas, SPs, Pusat Pengelolaan Pengujian, SRUH, UT Daerah, LPPM, Pusat Pengolahan Pengujian
	IKPS 27.1	Jumlah program studi akreditasi A/Unggul	Prodi	15	15			
	IKPS 27.2	Jumlah program studi baru sesuai kebutuhan masyarakat	Prodi	10	5			
	IKPS 27.3	UT memperoleh predikat A (Unggul) untuk Akreditasi Perguruan Tinggi	Predikat	A (Unggul)	A (Unggul)			
	IKPS 27.4	Jumlah program sertifikat yang mendukung kompetensi dan daya saing lulusan di tingkat nasional dan global	Program	4	4			

Pejabat/Kode		SS/ IKSS/PS/IKPS	Satuan	Target 2024	Target 2025	Alokasi Anggaran 2024	Alokasi Anggaran 2025	Unit Pelaksana
Rektor	Pimpinan Unit							
	IKPS 27.5	Persentase kualitas sarana dan prasarana yang layak digunakan untuk mendukung kualitas pendidikan	%	100	100			
	PS 28	Peningkatan Standar berdasarkan umpan balik dari berbagai pihak penerima manfaat dari layanan dan program yang diberikan.				35.833.580.000	48.733.668.000	DPKS, UT Daerah, Fakultas
	IKPS 28.1	Persentase Program Studi Diploma/S1 yang memperoleh peringkat akreditasi internasional	%	5	5			
IKSS 4.2	Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis project (team-based project) sebagai bagian dari bobot evaluasi.		%	50	50			
	PS 29	Kurikulum era digital dan mengakomodir masukan pemangku kepentingan (<i>stakeholder</i>).				279.818.569.000	380.553.253.000	DAAK, Fakultas, SRUH
	IKPS 29.1	Jumlah program studi yang memiliki kurikulum berbasis luaran (OBE) dan mengakomodasi layanan <i>multi entry multi exit</i> (MEME).	Prodi	1	2			
	IKPS 29.2	Jumlah mata kuliah bersama dan/atau bahan ajar bersama.	Jumlah Mata Kuliah Bersama	300	500			
	IKPS 29.3	Jumlah program studi Diploma/Sarjana dengan kurikulum yang mengakomodasi pembelajaran di luar program studi.	Prodi	33	33			
	PS 30	Desain pembelajaran dan bahan ajar yang interaktif dan inovatif.						
						320.128.203.000	435.374.356.000	

Pejabat/Kode		SS/ IKSS/PS/IKPS	Satuan	Target 2024	Target 2025	Alokasi Anggaran 2024	Alokasi Anggaran 2025	Unit Pelaksana
Rektor	Pimpinan Unit							
	IKPS 30.1	Persentase pengembangan dan implementasi bahan pembelajaran berbasis kasus (<i>case method</i>), <i>project based model</i> , dan teknologi media	%	50	50			DPKS, P2BAM, SRUH, Fakultas, PSDM, PPK, Pusat Pengelolaan Pembelajaran,
	IKPS 30.2	Persentase tutor yang berasal dari profesional dan industri	%	20	20			
	IKPS 30.3	Persentase layanan pembelajaran termasuk praktik dan praktikum yang terintegrasi dengan teknologi digital	%	80	85			
SS 5	Meningkatnya kualifikasi dan kompetensi dosen							
IKSS 5.1	persentase dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri; atau persentase pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia usaha, atau dunia industri.		%	40	40			
	PS 31	Peningkatan kompetensi dan kualifikasi SDM yang mendukung <i>World Class University</i> .				8.151.302.000	11.085.770.000	Fakultas, LPPM, PSDM, KPM
	IKPS 31.1	Persentase peningkatan kompetensi dan kualifikasi SDM yang mendukung <i>World Class University</i>	%	50	75			
IKSS 5.2	Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi.		%	30	30			
	PS 32	Peningkatan kolaborasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat;				28.856.460.000	39.244.785.000	DPKS, Fakultas, SPs, SRUH, UT Daerah
	IKPS 32.1	Jumlah program PkM kolaborasi dengan mitra luar negeri	Program	10	10			

Pejabat/Kode		SS/ IKSS/PS/IKPS	Satuan	Target 2024	Target 2025	Alokasi Anggaran 2024	Alokasi Anggaran 2025	Unit Pelaksana
Rektor	Pimpinan Unit							
	IKPS 32.2	Persentase program PkM yang melibatkan mahasiswa dan/atau alumni	%	100	100			
	IKPS 32.3	Jumlah PkM mahasiswa	Program	20	30			
SS 6	Meningkatnya jumlah keluaran dosen di bidang penelitian							
IKSS 6.1	Jumlah keluaran penelitian dosen yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat/industri/pemerintah per jumlah dosen.		Rasio	1	1			
	PS 33	Peningkatan jumlah publikasi nasional dan internasional.				6.269.169.000	8.526.069.000	Fakultas, LPPM
	IKPS 33.1	Jumlah publikasi di jurnal nasional dan internasional, baik melalui skema mandiri maupun kerja sama dengan PT ternama di dalam dan luar negeri.	Artikel	100	125			
	PS 34	Penguatan kolaborasi penelitian secara nasional dan internasional.				73.120.000	99.443.000	Fakultas, LPPM
	IKPS 34.1	Jumlah penelitian kolaborasi dengan mitra di dalam negeri termasuk DUDI	Judul	10	15			
	IKPS 34.2	Jumlah kerjasama penelitian dengan perguruan tinggi atau lembaga internasional	Judul	10	15			
	IKPS 34.3	Jumlah penelitian yang melibatkan mahasiswa	Judul	150	200			
	PS 35	Penguatan sistem pengelolaan penelitian secara suportif.				33.451.804.000	45.494.453.000	Fakultas, LPPM
	IKPS 35.1	Jumlah inovasi yang digunakan oleh masyarakat dan/atau pemerintah	Inovasi	5	10			

Pejabat/Kode		SS/ IKSS/PS/IKPS	Satuan	Target 2024	Target 2025	Alokasi Anggaran 2024	Alokasi Anggaran 2025	Unit Pelaksana
Rektor	Pimpinan Unit							
	IKPS 35.2	Jumlah inovasi/rekacipta hilirisasi DUDI	Jumlah inovasi/rekacipta	1	2			
	IKPS 35.3	Jumlah jurnal UT	Jurnal	15	20			
	IKPS 35.4	Jumlah jurnal UT yang bereputasi Nasional	Jurnal	9	11			
SS 7	Meningkatnya jumlah keluaran dosen di bidang pengabdian kepada masyarakat							
IKSS 7.1	Jumlah keluaran dosen di bidang pengabdian kepada masyarakat yang diterapkan oleh masyarakat/industri/pemerintah per jumlah dosen.		Rasio	1	1			
	PS 36	Peningkatan program pemberdayaan masyarakat berbasis teknologi				24.557.291.000	33.397.915.000	Fakultas, LPPM, DPKS, KPM, Puslakeu, SRUH, UPPDJI
	IKPS 36.1	Jumlah PkM berbasis teknologi	Program	2	4			
	IKPS 36.2	Jumlah publikasi hasil program pengabdian masyarakat	Artikel	100	125			
	PS 37	Peningkatan diversifikasi program pengabdian kepada masyarakat;				1.000.108.000	1.360.164.000	DAAK, Fakultas, LPPM, PPBI, SRUH
	IKPS 37.1	Jumlah program pendidikan yang berkelanjutan/Sertifikat	Program	4	5			
	IKPS 37.2	Jumlah program MOOCs	Program	50	55			
Total Indikasi Anggaran						2.596.230.890.000	3.530.874.010.000	

Lampiran 3 Rumus Perhitungan IKSS

Sasaran/ Indikator	Uraian	Definisi Operasional, Kriteria, dan Formula	Satuan
SS 1	Meningkatnya kualitas lulusan		
IKSS 1.1	Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2/D1 yang berhasil: a. memiliki pekerjaan; b. melanjutkan studi; atau c. menjadi wiraswasta.	<p>Definisi Operasional: Persentase Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2/D1 memiliki pekerjaan, melanjutkan studi, atau menjadi wiraswasta dalam jangka waktu tertentu.</p> <p>Kriteria: Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2/D1 yang berhasil:</p> <p>a. Memiliki pekerjaan Kriteria Pekerjaan: Memiliki pekerjaan dalam rentang waktu 12 (dua belas) bulan setelah lulus di:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perusahaan swasta, termasuk perusahaan nasional, perusahaan multinasional, perusahaan rintisan (<i>startup company</i>) Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), dan lain-lain; 2. Organisasi nirlaba; 3. Institusi/organisasi multilateral; 4. Lembaga pemerintah; atau 5. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) <p>b. Melanjutkan studi Kriteria kelanjutan studi: Melanjutkan proses pembelajaran di program studi profesi, S1/D4 terapan, S2/S2terapan, S3/S3 terapan di dalam negeri atau luar negeri dalam rentang waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah lulus.</p> <p>c. Menjadi wiraswasta Kriteria kewiraswastaan: Memiliki pekerjaan dalam rentang waktu 12 (dua belas) bulan setelah lulus sebagai:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendiri (<i>founder</i>) atau pasangan pendiri (<i>co-founder</i>) perusahaan; atau 2. Pekerja lepas (<i>freelancer</i>). <p>Formula:</p> $\frac{\sum_i n_i k_i}{t} \times 100$ <p>n = responden yang merupakan lulusan S1 dan D4/D3/D2/D1 yang berhasil mendapat pekerjaan, melanjutkan studi, atau menjadi wiraswasta. t = total jumlah responden lulusan S1 dan D4/D3 /D2/D1 yang berhasil dikumpulkan (terdapat batas minimum persentase responden yang dikumpulkan). k = konstanta bobot (bobot penuh diberikan kepada responden dengan gaji 1,2 (satu koma dua) kali Upah Minimum Provinsi (UMP) tempat lulusan bekerja dan mendapatkan pekerjaan dengan waktu tunggu kurang dari 6 (enam bulan).</p>	%

Sasaran/ Indikator	Uraian	Definisi Operasional, Kriteria, dan Formula	Satuan
IKSS 1.2	<p>Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2/D1 yang:</p> <p>a. menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi; atau b. meraih prestasi.</p>	<p>Definisi Operasional: Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi berdasarkan ketentuan yang berlaku.</p> <p>Kriteria:</p> <p>a. Kriteria kegiatan pembelajaran di luar program studi Mahasiswa S1/D4/D3/D2/D1 yang menghabiskan sampai dengan 20 (dua puluh) sks per semester di luar program studi. Batas minimal yang dapat dihitung adalah paling sedikit 10 (sepuluh) sks untuk mahasiswa S1/D4/D3 dan 5 (lima) sks untuk mahasiswa D1 dan D2. Kegiatan boleh dikombinasikan dan dihitung kumulatif:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Magang atau praktik kerja: Kegiatan magang di sebuah perusahaan, organisasi nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, ataupun perusahaan rintisan (<i>startup company</i>). 2) Proyek di desa: Proyek sosial/pengabdian kepada masyarakat untuk pemberdayaan masyarakat di pedesaan atau daerah terpencil dalam membangun ekonomi rakyat, infrastruktur, dan lain-lain. 3) Mengajar di sekolah: Kegiatan mengajar di sekolah dasar dan menengah. Sekolah dapat berlokasi di kota, desa, ataupun daerah terpencil. 4) Pertukaran pelajar: Mengambil kelas atau semester di perguruan tinggi lain, baik di luar negeri maupun di dalam negeri. Pertukaran pelajar juga menghitung aktivitas mahasiswa yang dilakukan antar program studi pada perguruan tinggi yang sama dan mahasiswa inbound yang diterima perguruan tinggi dalam program pertukaran mahasiswa. 5) Penelitian atau riset: Kegiatan riset akademik, baik sains maupun sosial humaniora yang dilakukan di bawah pengawasan dosen atau peneliti. 6) Kegiatan wirausaha: Mahasiswa mengembangkan kegiatan kewirausahaan secara mandiri ataupun bersama-sama dengan mahasiswa lain. 7) Studi atau proyek independen: Mahasiswa dapat mengembangkan sebuah proyek yang diinisiasi secara mandiri (untuk mengikuti lomba tingkat internasional yang relevan dengan keilmuannya, proyek teknologi, maupun rekayasa sosial) yang pengerjaannya dapat dilakukan secara mandiri ataupun bersama-sama dengan mahasiswa lain. 8) Proyek kemanusiaan: Kegiatan sosial/pengabdian kepada masyarakat yang merupakan program perguruan tinggi atau untuk sebuah yayasan atau organisasi kemanusiaan, baik di dalam maupun luar negeri (seperti penanganan bencana alam, 	%

Sasaran/ Indikator	Uraian	Definisi Operasional, Kriteria, dan Formula	Satuan
		<p>pemberdayaan masyarakat, penyelamatan lingkungan, palang merah, <i>peace corps</i>, dan seterusnya).</p> <p>9) Bela negara: Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka memberikal pendidikan dan/atau pelatihan kepada mahasiswa guna menumbuh kembangkan sikap dan perilaku serta menanamkan nilai dasar Bela Negara dan cinta tanah air (contoh: Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN), komponen cadalgal, dan seterusnya). Kegiatan diselenggarakan oleh:</p> <p>a) Perguruan tinggi bekerja sama dengan Kementerian Pertahanan dan/atau kementeriaa/ lembaga lain terkait; dan/ atau</p> <p>b) Kementerian Pertahanan dan/atau kementerian/lembaga lain terkait.</p> <p>b. Kriteria prestasi Mahasiswa S1 dan D4/D3/D2/D1 yang berhasil:</p> <p>1) Berprestasi dalam kompetisi atau lomba pada peringkat juara I sampai dengan juara III pada kompetisi:</p> <p>a) Tingkat internasional; b) tingkat nasional; atau c) tingkat provinsi.</p> <p>2) Memiliki karya yang digunakan dunia usaha, dunia industri, dan masyarakat.</p> <p>3) Mendapatkan sertifikasi kompetensi internasional.</p> <p>Formula:</p> <p>Perguruan Tinggi Negeri Akademik</p> $\left(\frac{\sum_1^n a_n k_n}{x} \times 50\right) + \left(\frac{\sum_1^n b_n k_n}{x} \times 20\right) + \left(\frac{\sum_1^n c_n k_n}{y} \times 30\right)$ <p>a = jumlah mahasiswa yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi sesuai kriteria minimal. b = jumlah mahasiswa <i>inbound</i> yang diterima dalam program pertukaran mahasiswa sesuai kriteria minimal. c = jumlah prestasi oleh mahasiswa. x = jumlah mahasiswa yang memenuhi syarat menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi. y = total jumlah mahasiswa aktif. k = konstanta bobot (pembobotan mempertimbangkan kuantitas konversi sks, tingkat wilayah kompetisi, dan peringkat kejuaraan, dan sebagainya).</p>	
IKSS 2.1	Rata-rata predikat SAKIP satker minimal BB	<p>Definisi Operasional:</p> <p>Evaluasi SAKIP (Evaluasi AKIP) adalah evaluasi terhadap pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dilakukan setiap tahun oleh Kemendikbudristek dengan merujuk pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.</p>	Bobot

Sasaran/ Indikator	Uraian	Definisi Operasional, Kriteria, dan Formula	Satuan										
		<p>Hasil Evaluasi AKIP akan diterbitkan dalam bentuk Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja dengan menampilkan Nilai Akuntabilitas Kinerja dan Predikat yang diperoleh.</p> <p>Kriteria/Komponen Penilaian AKIP:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Perencanaan Kinerja (30%) 2) Pengukuran Kinerja (30%) 3) Pelaporan Kinerja (15%) 4) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (25%) <p>Kategorisasi predikat hasil evaluasi SAKIP merujuk pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dapat dilihat pada tabel berikut.</p> <table border="1" data-bbox="639 808 1294 1951"> <thead> <tr> <th data-bbox="639 808 874 842">Predikat</th> <th data-bbox="874 808 1294 842">Interpretasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="639 842 874 1122">AA (Nilai > 90 – 100)</td> <td data-bbox="874 842 1294 1122">Sangat Memuaskan Telah terwujud Good Governance. Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang yang dinamis, adaptif, dan efisien (Reform). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="639 1122 874 1402">A (Nilai > 80 – 90)</td> <td data-bbox="874 1122 1294 1402">Memuaskan Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="639 1402 874 1827">BB (Nilai > 70 – 80)</td> <td data-bbox="874 1402 1294 1827">Sangat Baik Terdapat gambaran bahwa SAKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="639 1827 874 1951">B (Nilai > 60 – 70)</td> <td data-bbox="874 1827 1294 1951">Baik Terdapat gambaran bahwa SAKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama.</td> </tr> </tbody> </table>	Predikat	Interpretasi	AA (Nilai > 90 – 100)	Sangat Memuaskan Telah terwujud Good Governance. Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang yang dinamis, adaptif, dan efisien (Reform). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.	A (Nilai > 80 – 90)	Memuaskan Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.	BB (Nilai > 70 – 80)	Sangat Baik Terdapat gambaran bahwa SAKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.	B (Nilai > 60 – 70)	Baik Terdapat gambaran bahwa SAKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama.	
Predikat	Interpretasi												
AA (Nilai > 90 – 100)	Sangat Memuaskan Telah terwujud Good Governance. Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang yang dinamis, adaptif, dan efisien (Reform). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.												
A (Nilai > 80 – 90)	Memuaskan Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.												
BB (Nilai > 70 – 80)	Sangat Baik Terdapat gambaran bahwa SAKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.												
B (Nilai > 60 – 70)	Baik Terdapat gambaran bahwa SAKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama.												

Sasaran/ Indikator	Uraian	Definisi Operasional, Kriteria, dan Formula		Satuan
			Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.	
		CC (Nilai > 50 – 60)	Cukup (Memadai) Terdapat gambaran bahwa SAKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.	
		C (Nilai > 30 – 50)	Kurang Sistem dan tatanan dalam SAKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.	
		D (Nilai > 0 - 30)	Sangat Kurang Sistem dan tatanan dalam SAKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.	
		<p>Formula:</p> $\text{Nilai} = a + b + c + d$ <p>a = Perencanaan Kinerja (Nilai Angka x 30%) b = Pengukuran Kinerja (Nilai Angka x 30%) c = Pelaporan Kinerja (Nilai Angka x 15%) d = Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (Nilai Angka x 25%)</p> <p>Hasil penilaian dikonversi ke Bobot/Predikat</p>		
IKSS 2.2	Meningkatnya tata kelola UT yang baik, kredibel, dan transparan	<p>Definisi Operasional: Sistem pengelolaan keuangan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggung jawaban anggaran yang tertib, ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan tepat waktu dalam pelaporan</p> <p>Kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> Laporan keuangan dan laporan keuangan konsolidasi unit bisnis disampaikan oleh Rektor kepada MWA paling lambat 1 bulan setelah tahun buku berakhir setelah di audit oleh kantor Akuntan Publik. Laporan keuangan memenuhi syarat WTP (sesuai standar akuntansi pemerintah, efektifitas penilaian unit pengawas internal, kecukupan pengungkapan informasi, dan 		Ketepatan Penyampaian Laporan Keuangan dan Opini Auditor

Sasaran/ Indikator	Uraian	Definisi Operasional, Kriteria, dan Formula	Satuan
		<p>kepatuhan pada peraturan perundangan) setelah di audit oleh kantor Akuntan Publik.</p> <p>Formula: Penilaian ketepatan pelaporan keuangan: <1 bulan = 20 poin tepat 1 bulan = 10 poin >1 - 3 bulan = 5 poin >3 - 6 bulan = 1 poin</p> <p>Penilaian WTP: Memenuhi WTP = 100% Tidak memenuhi = 0%</p>	
IKSS 2.3	Meningkatnya ranking UT masuk dalam 1000 besar dunia versi THE Impact dan 20 besar nasional UI GreenMetric	<p>Definisi Operasional: Pengukuran dilakukan merujuk pada lembaga pemeringkatan internasional versi THE Impact dan UI Green Matric. THE Impact adalah lembaga pemeringkatan universitas yang menilai universitas berdasarkan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). UI Green Matric adalah salah satu penilaian dan pemeringkatan universitas berdasarkan komitmen dan tindakan universitas terhadap penghijauan dan berkelanjutan lingkungan.</p> <p>Kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan peringkat UT dalam THE Impact secara periodik 2. Peningkatan peringkat UT dalam UI Green Matric secara periodik <p>Formula: Bobot penilaian THE Impact berdasarkan peringkat (n1): $\leq 1000 = 9$ $1001 - 1100 = 8$ $1101 - 1200 = 7$</p> <p>Bobot penilaian UI Green Matric berdasarkan peringkat (n2): $251 - 500 = 1$ $101 - 250 = 2$ $51 - 100 = 3$ $21 - 50 = 4$ $1 - 20 = 5$</p>	Rangking
IKSS 2.4	Meningkatnya sumber pendapatan UT (non akademik) dengan mengoptimalkan pemanfaatan aset UT	<p>Definisi Operasional: Keuntungan yang diperoleh dari deviden/bunga/<i>capital gain</i>/penjualan atau sewa aset/hasil usaha.</p> <p>Kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Presentase pendapatan terhadap nilai investasi (<i>return on investment</i>) 2. Dapat diukur dalam satuan mata uang dan digabung dengan butir 1 	ROI

Sasaran/ Indikator	Uraian	Definisi Operasional, Kriteria, dan Formula	Satuan
		<p>Formula:</p> $\frac{\text{Pendapatan}}{\text{total investasi}} \times 100$ <p>Bobot berdasarkan tipologi benefit:</p> <p>fasilitasi magang (n1) = 6 karir alumni (n2) = 5 dosen tamu (n3) = 4 sponsorship penelitian (n4) = 3 fasilitas lab (n5) = 2 branding UT (n6) = 1</p> $\frac{\sum_{n=1}^6 (\text{volume kegiatan}_n \times \text{harga} \times \text{bobot}_n)}{\sum \text{bobot} (21)} \times 100\%$	
IKSS 2.5	Rata-rata Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 80	<p>Definisi Operasional: Nilai Kinerja Anggaran dibentuk dari nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)</p> <p>Kriteria: NKA terdiri dari proporsi nilai EKA yakni 60% dan proporsi nilai IKPA yakni 40%.</p> <p>Formula:</p> <p>Nilai EKA = $(P \times W_p) + (K \times W_k) + (COP \times W_{COP} \text{ atau } CRO \times W_{CRO}) + (NE \times W_E)$</p> <p>Keterangan:</p> <p>NKI : Nilai Kinerja atas aspek Implementasi P : Penyerapan anggaran K : Konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan COP : Capaian Output Program CRO : Capaian RO NE : Nilai efisiensi unit eselon I atau satuan kerja Wp : Bobot penyerapan anggaran Wk : bobot konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan Wear : bobot capaian Output Program WcRo : bobot capaian RO WE : bobot efisiensi</p> <p>Bobot masing-masing variabel aspek implementasi sebagai berikut:</p> <p>Wp : 9,7% Wk : 18,2% WcoP = WcRo : 43,5% WE : 28,6%</p> <p>Nilai IKPA =</p>	Nilai

Sasaran/ Indikator	Uraian	Definisi Operasional, Kriteria, dan Formula	Satuan
		$\text{Nilai IKPA} = \sum_{n=1}^8 (\text{Nilai Indikator}_n \times \text{Bobot Indikator}_n) : \text{Konversi Bobot}^*)$ <ol style="list-style-type: none"> Konversi bobot bernilai 100 persen apabila K/L/unit Eselon I/ Satker memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai. Konversi bobot bernilai di bawah 100 persen apabila pada K/L/unit Eselon I/Satker tidak terdapat data transaksi untuk indikator tertentu. 	
IKSS 3.1	Peningkatan Jumlah Mahasiswa UT Menuju 1 Juta Mahasiswa	<p>Definisi Operasional: Jumlah mahasiswa yang melakukan registrasi mata kuliah di UT pada tahun berjalan.</p> <p>Kriteria: Peningkatan Jumlah Mahasiswa UT Menuju 1 Juta Mahasiswa melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> Implementasi digital marketing Peningkatan jumlah kerja sama dengan mitra Pembukaan program studi baru Perluasan daya jangkau atau perluasan wilayah kerja UT Daerah Peningkatan kapasitas bandwidth infrastruktur teknologi informasi <p>Formula: Jumlah mahasiswa yang melakukan registrasi mata kuliah di UT pada tahun berjalan.</p>	Mahasiswa
IKSS 3.2	Jumlah kerjasama per program studi S1 dan D4/D3/D2/D1.	<p>Definisi Operasional: Kemitraan program studi: Jumlah kerjasama per program studi S1 dan D4/D3/D2/D1.</p> <ol style="list-style-type: none"> pengembangan kurikulum bersama (merencanakan hasil output) pembelajaran, konten, dan metode pembelajaran); menyediakan kesempatan pembelajaran berbasis project (PBL); menyediakan program magang paling sedikit 1(satu) semester penuh; menyediakan kesempatan kerja bagi lulusan; mengisi kegiatan pembelajaran dengan dosen tamu praktisi; menyediakan pelatihan (<i>upskilling</i> dan <i>reskilling</i>) bagi dosen maupun instruktur; menyediakan <i>resource sharing</i> sarana dan prasarana; menyelenggarakan <i>teaching factory</i> (TEFA) di kampus; menyelenggarakan program <i>double degree</i> atau <i>joint degree</i>; dan/atau melakukan kemitraan penelitian. <p>Kriteria mitra:</p> <ol style="list-style-type: none"> perusahaan multinasional; perusahaan nasional berstandar tinggi; perusahaan teknologi global; 	Rasio

Sasaran/ Indikator	Uraian	Definisi Operasional, Kriteria, dan Formula	Satuan
		<p>4. perusahaan rintisan (<i>startup company</i>) teknologi 5. organisasi nirlaba kelas dunia 6. institusi/organisasi multilateral 7. perguruan tinggi yang masuk dalam daftar QS200 berdasarkan 8. bidang ilmu (QS200 by subject) 9. perguruan tinggi, fakultas, atau program studi dalam bidang yang relevan 10. instansi pemerintah, BUMN, dan/atau BUMD 11. rumah sakit; 12. UMKM 13. lembaga riset pemerintah, swasta, nasional, maupun internasional; atau 14. lembaga kebudayaan berskala nasional/bereputasi</p> <p>Formula:</p> $\frac{\sum_i n_i k_i}{t} \times 100$ <p>n= jumlah kerja sama pada program studi S1 dan D4/D3/D2/D1 yang memenuhi kriteria. t = jumlah program studi S1 dan D4/D3/D2/D1. k= konstanta bobot (pembobotan mempertimbangkan reputasi mitra).</p>	
IKSS 4.1	Persentase program studi S1 dan D4/D3 yang memiliki akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui pemerintah.	<p>Definisi Operasional: Akreditasi Internasional: Persentase program studi S1 dan D4/D3 yang memiliki akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui pemerintah.</p> <p>Kriteria akreditasi dan sertifikasi: Lembaga akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.</p> <p>Formula:</p> $\frac{n}{t} \times 100$ <p>n = jumlah program studi S1 dan D4/D3 yang memiliki akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui pemerintah. t = jumlah program studi S1 dan D4/D3 yang telah meluluskan minimal 1 (kali).</p>	%
IKSS 4.2	Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (<i>case method</i>) atau pembelajaran kelompok berbasis project (<i>team-</i>	<p>Definisi Operasional: Pembelajaran dalam kelas: Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (<i>case method</i>) atau pembelajaran kelompok berbasis project (<i>team-based project</i>) sebagai sebagian bobot evaluasi.</p>	%

Sasaran/ Indikator	Uraian	Definisi Operasional, Kriteria, dan Formula	Satuan
	<p><i>based project</i>) sebagai bagian dari bobot evaluasi.</p>	<p>Kriteria:</p> <p>a. Kriteria metode pembelajaran Metode pembelajaran di dalam kelas harus menggunakan salah satu atau kombinasi dari metode pembelajaran pemecahan kasus (<i>case method</i>) atau pembelajaran kelompok berbasis project (<i>team-based project</i>)</p> <p>1) Pemecahan kasus/<i>case method</i></p> <ol style="list-style-type: none"> mahasiswa berperan sebagai 'protagonis' yang berusaha untuk memecahkan sebuah kasus; mahasiswa melakukan analisis terhadap kasus untuk membangun rekomendasi solusi, dibantu dengan diskusi kelompok untuk menguji dan mengembangkan rancangan solusi; atau kelas berdiskusi secara aktif, dengan mayoritas dari percakapan dilakukan oleh mahasiswa, sedangkan dosen hanya memfasilitasi dengan cara mengarahkan diskusi, memberikan pertanyaan, dan observasi. <p>2) Pembelajaran kelompok berbasis project (<i>team-based project</i>):</p> <ol style="list-style-type: none"> kelas dibagi menjadi kelompok lebih dari 1 (satu) mahasiswa untuk mengerjakan tugas bersama selama jangka waktu yang ditentukan; kelompok diberikan masalah nyata yang terjadi di masyarakat atau pertanyaan kompleks, lalu diberikan ruang untuk membuat rencana kerja dan model kolaborasi; setiap kelompok mempersiapkan presentasi/karya akhir yang ditampilkan di depan dosen, kelas, atau audiens lainnya yang dapat memberikan umpan balik yang konstruktif; dosen membina setiap kelompok selama periode pekerjaan proyek dan mendorong mahasiswa untuk berpikir kritis dan kreatif dalam kolaborasi; atau kelompok diberikan project dan dunia usaha industri. <p>b. Kriteria evaluasi 50% (lima puluh persen) dari bobot nilai akhir harus berdasarkan kualitas partisipasi diskusi kelas (<i>case method</i>) dan/atau presentasi akhir pembelajaran kelompok berbasis project (<i>team-based project</i>).</p> <p>Formula:</p> $\frac{n}{t} \times 100$ <p>n = jumlah mata kuliah yang menggunakan <i>case method</i> atau <i>team-based project</i> sebagai metode pembelajaran dan bagian dari bobot evaluasi. t = total jumlah mata kuliah yang kelasnya diselenggarakan pada tahun berjalan.</p>	

Sasaran/ Indikator	Uraian	Definisi Operasional, Kriteria, dan Formula	Satuan
IKSS 5.1	<p>Persentase dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri; atau persentase pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia usaha, atau dunia industri.</p>	<p>Definisi Operasional: Persentase dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri atau persentase pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia usaha, atau dunia industri sesuai kriteria.</p> <p>Kriteria: Kualifikasi dosen/pengajar: a. Persentase dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri</p> <p>Kriteria sertifikat kompetensi/profesi Dosen yang memiliki sertifikasi dari lembaga berikut: 1. Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) nasional dengan lisensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) aktif; 2. Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK) yang diakui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; 3. Lembaga atau asosiasi profesi atau sertifikasi internasional; 4. Perusahaan Fortune 500; atau 5. Dunia usaha dunia industri.</p> <p>b. Persentase pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia usaha, atau dunia industri.</p> <p>Praktisi mengajar di kelas sesuai dengan ketentuan minimal waktu per semester yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Praktisi berpengalaman kerja penuh waktu melalui: 1. Bekerja di: a. perusahaan multinasional; b. perusahaan swasta berskala menengah ke atas; c. perusahaan teknologi global; d. perusahaan rintisan (<i>startup company</i>) teknologi; e. organisasi nirlaba nasional dan internasional; f. finstitusi/organisasi multilateral; g. lembaga pemerintah; atau h. BUMN/BUMD.</p> 2. Menjadi wiraswasta pendiri (<i>founder</i>) atau pasangan pendiri (<i>co-founder</i>) di: a. perusahaan multinasional; b. perusahaan swasta berskala kecil ke atas; c. perusahaan teknologi global; d. perusahaan rintisan (<i>startup company</i>) teknologi; atau e. organisasi nirlaba nasional dan internasional. 3. Menjadi pekerja lepas (<i>freelancer</i>). 4. Khusus untuk praktisi mengajar di Program Studi Seni Budaya dan bidang industry kreatif dapat juga berpengalaman: a. berkreasi independen atau menampilkan karya; b. menjadi juri, kurator, atau panitia acara seni budaya tingkat nasional; atau	%

Sasaran/ Indikator	Uraian	Definisi Operasional, Kriteria, dan Formula	Satuan
		<p>c. menjadi pendiri (<i>founder</i>) atau pasangan pendiri (<i>co-founder</i>) sanggar.</p> <p>Formula:</p> $\left(\frac{a}{x+y} \times 60\right) + \left(\frac{b}{x+y+z} \times 40\right)$ <p>a = jumlah dosen dengan NIDN atau NomorInduk Dosen Khusus (NIDK) yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi. b= jumlah pengajar yang berasal darikalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja. x= jumlah dosen dengan NIDN. y= jumlah dosen dengan NIDK. z= jumlah dosen dengan Nomor UrutPendidik (NUP).</p>	
IKSS 5.2	Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi.	<p>Definisi Operasional: Dosen di luar kampus: Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi.</p> <p>Kriteria:</p> <p>a. Syarat pelaporan ke pimpinan perguruan tinggi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kegiatan harus sepengetahuan institusi atau pimpinan perguruan tinggi, minimal dengan persetujuan tingkat ketua departemen atau dekan; 2. format kegiatan dapat berupa kebijakan cuti meninggalkan tugas akademik dan administratif dalam 1 (satu) kurun waktu tertentu untuk kepentingan riset atau menulis karya akademik dengaa tetap mendapatkan penghasilan dari institusi tempatnya bekerja (<i>sabbatical leave</i>) atau paruh waktu (<i>part time</i>); 3. kegiatan harus disertai kontrak, surat tugas, atau surat keputusan di antara dosen dan organisasi luar kampus; dan 4. dosen dapat diberikan keringanan beban kerja atau jumlah sks yang harus dicapai selama sedang berkegiatan tridharma di luar kampus. <p>b. Kriteria kegiatan tridharma di perguruan tinggi lain Dosen yang melakukan kegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, baik di dalam maupun di luar negeri, dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir. Daftar kegiatan dapat mengacu pada rubrik kegiatan beban kerja dosen. Beberapa contoh kegiatan, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan: menjadi pengajar, pembimbing, penilai mahasiswa, membina kegiatan mahasiswa, mengembangkan program studi atau rencana kuliah, dan sebagainya. 2. Penelitian: memulai penelitian baru, membantu penelitian dosen di kampus lain, membuat rancangan dan karya teknologi yang dipatenkan, dan sebagainya. 	

Sasaran/ Indikator	Uraian	Definisi Operasional, Kriteria, dan Formula	Satuan
		<p>3. Pengabdian kepada masyarakat: fasilitasi pembelajaran pengabdian masyarakat, fasilitasi kuliah kerja nyata, memberi latihan kepada masyarakat, dan sebagainya.</p> <p>c. Kriteria membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi. Dosen yang membimbing mahasiswa dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mendampingi mahasiswa melakukan kegiatan pembelajaran diluar program studi; 2. Membimbing mahasiswa berkompetisi yang berprestasi dalam kompetisi atau lomba pada peringkat juara I sampai dengan juara III pada kompetisi: <ol style="list-style-type: none"> a. tingkat internasional; b. tingkat nasional; atau c. tingkat provinsi. 3. Mendampingi mahasiswa mengembangkan produk yang digunakan dunia usaha, industri dan masyarakat. 4. Membimbing mahasiswa untuk sertifikasi kompetensi internasional. <p>Formula:</p> $\frac{\sum_i^i n_i k_i}{t} \times 100$ <p>n = jumlah dosen dengan (Nomor Induk Dosen Nasional) NIDN yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi. t = jumlah dosen dengan NIDN k = konstanta bobot (pembobotan mempertimbangkan reputasi perguruan tinggi tempat pelaksanaan kegiatan tridharma, jenis kegiatan membimbing, tingkat prestasi mahasiswa dan sebagainya).</p>	
IKSS 6.1	Jumlah keluaran penelitian dosen yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat/industri/pemerintah per jumlah dosen.	<p>Definisi Operasional: Penerapan karya dosen: Jumlah keluaran dosen yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat/ industri/ pemerintah per jumlah dosen.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Artikel ilmiah, buku akademik, dan bab (<i>chapter</i>) dalam buku akademik; 2. Karya rujukan: buku saku (<i>handbook</i>), pedoman (<i>guidelines</i>), manual, 3. buku teks (<i>textbook</i>), monograf, ensiklopedia, kamus; 4. Studi kasus; dan/atau 5. Laporan penelitian untuk mitra. <p>Kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Karya tulis ilmiah, terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> 1. Produk fisik, digital, dan algoritme (termasuk prototipe); dan/atau 2. Pengembangan invensi dengan mitra. 	Rasio

Sasaran/ Indikator	Uraian	Definisi Operasional, Kriteria, dan Formula	Satuan
		<p>b. Karya terapan, terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Visual, audio, audio-visual, pertunjukan (performance); 2. Desain konsep, desain produk, desain komunikasi visual, desain arsitektur, desain kriya; 4. Karya tulis novel, sajak, puisi, notasi musik; dan/atau 5. Karya preservasi (contoh: modernisasi seni tari daerah). <p>Formula:</p> $\frac{\sum_i^i n_i k_i}{t} \times 100$ <p>n = jumlah karya dosen dengan NIDN/NIDK yang mendapat rekognisi internasional atau digunakan oleh masyarakat/industri/pemerintah. t = jumlah dosen dengan NIDN/NIDK. k = konstanta bobot (pembobotan mempertimbangkan tingkat rekognisi internasional atau penerapan oleh masyarakat/industri/pemerintah ataskarya).</p>	
IKSS 7.1	Jumlah keluaran dosen di bidang pengabdian kepada masyarakat yang diterapkan oleh masyarakat/industri/pemerintah per jumlah dosen.	<p>Definisi Operasional: Penerapan karya dosen: Jumlah keluaran dosen yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat/ industri/pemerintah per jumlah dosen.</p> <p>Kriteria:</p> <p>a. Karya tulis ilmiah, terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Artikel ilmiah, buku akademik, dan bab (<i>chapter</i>) dalam buku akademik; 2. Karya rujukan: buku saku (<i>handbook</i>), pedoman (<i>guidelines</i>), manual, buku teks (<i>textbook</i>), monograf, ensiklopedia, kamus; 3. Studi kasus; dan/atau 4. Laporan penelitian untuk mitra. <p>b. Karya terapan, terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Produk fisik, digital, dan algoritma (termasuk prototipe); dan/atau 2. Pengembangan invensi dengan mitra <p>c. Karya seni, terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Visual, audio, audio-visual, pertunjukan (performance); 2. Desain konsep, desain produk, desain komunikasi visual, desain arsitektur, desain kriya; 3. Karya tulis novel, sajak, puisi, notasi musik; dan/atau 4. Karya preservasi (contoh: modernisasi seni tari daerah). <p>Formula:</p> $\frac{\sum_i^i n_i k_i}{t} \times 100$	Rasio

Sasaran/ Indikator	Uraian	Definisi Operasional, Kriteria, dan Formula	Satuan
		<p>n = jumlah karya dosen dengan NIDN/NIDK yang mendapat rekognisi internasional atau digunakan oleh masyarakat/ industri/pemerintah.</p> <p>t = jumlah dosen dengan NIDN/NIDK.</p> <p>k = konstanta bobot (pembobotan mempertimbangkan tingkat rekognisi internasional atau penerapan oleh masyarakat/industri/pemerintah ataskarya).</p>	

Lampiran 4 Rumus Perhitungan IKPS

No	Indikator Kinerja	Definisi Operasional, Kriteria, dan Formula	Satuan
IKPS 1.1	Jumlah organisasi alumni di semua provinsi yang berkontribusi dalam sosialisasi promosi UT dan menyediakan beasiswa	<p>Definisi Operasional: IKA UT memiliki pengurus wilayah di kota/kabupaten di setiap provinsi dan memiliki program kerja yang meliputi sosialisasi promosi UT dan menyediakan beasiswa bagi mahasiswa UT.</p> <p>Kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> sosialisasi promosi UT dibuktikan dengan kegiatan yang diselenggarakan oleh IKA UT dan menyebutkan nama lokasi, target audiens, dan waktu pelaksanaan dan dilaksanakan oleh pengurus minimal 4 kali dalam setahun IKA UT memberikan beasiswa minimal kepada 3 mahasiswa UT dalam satu tahun selama mahasiswa tersebut menempuh kuliah di UT. <p>Formula: Jumlah pengurus IKA UT di setiap provinsi yang memiliki program</p>	Jumlah

No	Indikator Kinerja	Definisi Operasional, Kriteria, dan Formula	Satuan
IKPS 1.2	Persentase pengembangan <i>platform</i> teknologi informasi dan komunikasi untuk manajemen alumni secara terintegrasi	<p>Definisi Operasional UT memiliki portal berupa sistem informasi alumni yang dapat diakses para <i>stakeholder</i> terkait untuk manajemen alumni terintegrasi</p> <p>Kriteria Kriteria portal alumni yang terintegrasi mencakup</p> <ol style="list-style-type: none"> Alumni dapat memperbarui data pribadi dan data pekerjaan/jenjang studi lanjutan/kewirausahaan Alumni dapat mengisi survey alumni dan/atau <i>tracer study</i> Portal dapat menampilkan statistik data alumni Portal dapat menampilkan profil alumni Portal menyediakan layanan administrasi akademik yang dibutuhkan alumni seperti legalisir digital <p>Formula</p> $\sum a + b + c + d + e$ <ol style="list-style-type: none"> Alumni dapat memperbarui data pribadi dan data pekerjaan/jenjang studi lanjutan/kewirausahaan (20%) Alumni dapat mengisi survey alumni dan/atau <i>tracer study</i> (20%) Portal dapat menampilkan statistik data alumni (20%) Portal dapat menampilkan profil alumni (20%) Portal menyediakan layanan administrasi akademik yang dibutuhkan alumni seperti legalisir digital (20%) 	%

No	Indikator Kinerja	Definisi Operasional, Kriteria, dan Formula	Satuan
IKPS 2.1	Persentase tersedianya program pendukung kesuksesan belajar jarak jauh.	<p>Definisi operasional: Program yang disediakan untuk membekali mahasiswa dalam memahami proses pembelajaran jarak jauh (PJJ) di UT dan meraih kesuksesan dalam menempuh studi sehingga mahasiswa memiliki kesiapan dan keberlanjutan selama menempuh studi di UT</p> <p>Kriteria: Minimal tersedia:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. program Orientasi Studi Mahasiswa Baru (OSMB) di UT daerah; 2. program Distance Learning Skill Workshop (Pelatihan Keterampilan Belajar Jarak Jauh - PKBJJ); 3. program Assignment Workshop (Workshop Tugas); 4. program Examination Clinic (Klinik Ujian); <p>Sangat Baik: 100% program pendukung kesuksesan belajar jarak jauh.tersedia Baik: > 75% program pendukung kesuksesan belajar jarak jauh tersedia Cukup: 50-75% program pendukung kesuksesan belajar jarak jauh tersedia Kurang: 0-50% program pendukung kesuksesan belajar jarak jauh tersedia</p> <p>Formula:</p> $\frac{\text{Jumlah Program yang tersedia untuk mahasiswa}}{\text{Jumlah Total Program}} \times 100$	%

No	Indikator Kinerja	Definisi Operasional, Kriteria, dan Formula	Satuan
IKPS 3.1	Persentase mahasiswa yang mengikuti pembelajaran di luar program studi.	<p>Definisi Operasional: Pembelajaran di luar program studi: salah satu program merdeka belajar yang memberikan kebebasan mahasiswa mengambil sks di luar program studi</p> <p>Sks di luar kampus: Sks yang diperoleh dari mata kuliah Kampus Merdeka sepanjang masa pembelajaran</p> <p>Peraturan data pendukung: UT melaporkan jumlah mahasiswa terdaftar yang telah memperoleh minimal 20 sks dari mata kuliah Kampus Merdeka</p> <p>Jumlah dapat dihitung sebagai rata-rata dari jumlah mahasiswa terdaftar yang telah memperoleh minimal 20 sks dari mata kuliah Kampus Merdeka</p> <p>Kriteria kegiatan di luar program studi: Mahasiswa S1/D4/D3/D2ID1 yang menghabiskan sampai dengan 20 (dua puluh) sks per semester di luar program studi. Batas minimal yang dapat dihitung adalah paling</p>	%

No	Indikator Kinerja	Definisi Operasional, Kriteria, dan Formula	Satuan
		<p>sedikit 10 (sepuluh) sks untuk mahasiswa S1/D4/D3 dan 5 (lima) sks untuk mahasiswa D1 dan D2. Kegiatan boleh dikombinasikan dan dihitung kumulatif:</p> <p>Magang atau praktik kerja: Kegiatan magang di sebuah perusahaan, organisasi nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, ataupun perusahaan rintisan (startup company)</p> <p>Proyek di desa: Proyek sosial/pengabdian kepada masyarakat untuk pemberdayaan masyarakat di pedesaan atau daerah terpencil dalam membangun ekonomi rakyat, infrastruktur, dan lain-lain.</p> <p>Mengajar di sekolah: Kegiatan mengajar di sekolah dasar dan menengah. Sekolah dapat berlokasi di kota, desa ataupun daerah terpencil.</p> <p>Pertukaran pelajar: Mengambil kelas atau semester di perguruan tinggi lain, baik di luar negeri maupun di dalam negeri. Pertukaran pelajar juga menghitung aktivitas mahasiswa yang dilakukan antarprogram studi pada perguruan tinggi yang sama dan mahasiswa inbound yang diterima perguruan tinggi dalam program pertukaran mahasiswa.</p> <p>Penelitian atau riset: Kegiatan riset akademik, baik sains maupun sosial humaniora yang dilakukan di bawah pengawasan dosen atau peneliti.</p> <p>Kegiatan wirausaha: Mahasiswa mengembangkan kegiatan kewirausahaan secara mandiri ataupun bersama-sama dengan mahasiswa lain.</p> <p>Studi atau proyek independen: Mahasiswa dapat mengembangkan sebuah proyek yang diinisiasi secara mandiri (untuk mengikuti lomba tingkat internasional yang relevan dengan keilmuannya, proyek teknologi, maupun rekayasa sosial) yang pengerjaannya dapat dilakukan secara mandiri ataupun bersama-sama dengan mahasiswa lain.</p> <p>Proyek kemanusiaan: Kegiatan sosial/pengabdian kepada masyarakat yang merupakan program perguruan tinggi atau untuk sebuah yayasan atau organisasi kemanusiaan, baik di dalam maupun luar negeri (seperti penanggulangan bencana alam, pemberdayaan masyarakat, penyelamatan lingkungan, palang merah, peace corps, dan seterusnya).</p> <p>Bela negara: Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka memberikan pendidikan dan/atau pelatihan kepada mahasiswa guna menumbuhkembangkan sikap dan perilaku serta menanamkan nilai dasar Bela Negara dan cinta tanah air (contoh: Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN), komponen cadangan, dan seterusnya). Kegiatan diselenggarakan oleh: a) perguruan tinggi bekerja sama</p>	

No	Indikator Kinerja	Definisi Operasional, Kriteria, dan Formula	Satuan
		<p>dengan Kementerian Pertahanan dan/atau kementerian/ lembaga lain terkait; dan/ atau b) Kementerian Pertahanan dan/atau kementerian/lembaga lain terkait.</p> <p>Program MBKM yang diikuti mahasiswa merupakan program yang dilaksanakan oleh kemendikbud atau Mandiri (diselenggarakan oleh UT)</p> <p>Mahasiswa dilaporkan dan terdaftar sebagai peserta program MBKM Penetapan mata kuliah dan sks kampus merdeka sesuai dengan yang ditawarkan oleh masing-masing prodi serta prodi melakukan ekuivalensi.</p> <p>Formula:</p> $\frac{\sum_1^n a_n k_n}{x} + \frac{\sum_1^n b_n k_n}{x}$ <p>a = jumlah mahasiswa yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi sesuai kriteria minimal. b = jumlah mahasiswa inbound yang diterima dalam program pertukaran mahasiswa sesuai kriteria minimal. x = jumlah mahasiswa yang memenuhi syarat menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi. k = konstanta bobot (pembobotan mempertimbangkan kuantitas konversi sks, tingkat wilayah kompetisi, dan peringkat kejuaraan, dan sebagainya).</p>	

No	Indikator Kinerja	Definisi Operasional, Kriteria, dan Formula	Satuan
IKPS 4.1	Persentase mahasiswa yang berprestasi tingkat provinsi, nasional dan internasional.	<p>Definisi Operasional: Persentase mahasiswa yang berprestasi tingkat provinsi, nasional dan internasional</p> <p>Kriteria: Kriteria Mahasiswa Berprestasi adalah: Mahasiswa S1 dan D4/D3/D2/D1 yang berhasil: 1) Berprestasi dalam kompetisi atau lomba pada peringkat juara I sampai dengan juara III pada kompetisi a) Tingkat internasional; b) Tingkat nasional; atau c) Tingkat provinsi. 2) Memiliki karya yang digunakan dunia usaha, dunia industri, dan Masyarakat. 3) Mendapatkan sertifikasi kompetensi internasional</p> <p>Formula:</p>	%

No	Indikator Kinerja	Definisi Operasional, Kriteria, dan Formula	Satuan
		$\frac{\sum_1^n c_n k_n}{y} \times 100$ <p>c = jumlah prestasi oleh mahasiswa y = total jumlah mahasiswa aktif k = konstanta bobot (pembobotan mempertimbangkan tingkat wilayah kompetisi, peringkat kejuaraan, dan sebagainya)</p>	

No	Indikator Kinerja	Definisi Operasional, Kriteria, dan Formula	Satuan
IKPS 5.1	Jumlah kemitraan dengan dunia usaha dan industri	<p>Definisi Operasional:</p> <p>Perjanjian kerja sama berbentuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) menyediakan kesempatan pembelajaran berbasis <i>project</i> (PBL); 2) menyediakan program magang paling sedikit 1 (satu) semester penuh; 3) menyediakan kesempatan kerja bagi lulusan; 4) mengisi kegiatan pembelajaran dengan dosen tamu praktisi; 5) menyediakan pelatihan (upskilling dan reskilling) bagi dosen maupun instruktur; 6) menyediakan <i>resource sharing</i> sarana dan prasarana; 7) menyelenggarakan teaching factory (TEFA) di kampus; 8) melakukan kemitraan penelitian <p>Kriteria Mitra:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) perusahaan multinasional; 2) perusahaan nasional berstandar tinggi; 3) perusahaan teknologi global; 4) perusahaan rintisan (startup compang) teknologi; 5) organisasi nirlaba kelas dunia; 6) institusi/organisasi multilateral; 7) instansi pemerintah, BUMN, dan/ atau BUMD; 8) rumah sakit; 9) UMKM <p>Formula:</p> $\frac{\sum_1^i n_i k_i}{t} \times 100$ <p>n = jumlah kerja sama pada program studi S1 dan D4/D3/D2/D1 yang memenuhi kriteria t = jumlah program studi S1 dan D4/D3/D2/D1 k = konstanta bobot (pembobotan mempertimbangkan reputasi mitra)</p>	

No	Indikator Kinerja	Definisi Operasional, Kriteria, dan Formula	Satuan
IKPS 5.3	Persentase pengembangan pusat karir bagi mahasiswa	<p>Definisi Operasional: Pusat Karir adalah program untuk mempersiapkan mahasiswa UT memasuki dunia kerja.</p> <p>Kriteria: Pusat Karir sekurang-kurangnya memiliki program</p> <ol style="list-style-type: none"> Pelatihan bagi mahasiswa untuk meningkatkan softskill Informasi kesempatan kerja Layanan penempatan kerja Penyelenggaraan bursa kerja <p>Setiap program akan berkontribusi 25 persen pada pengembangan pusat karir jika memenuhi kriteria sebagai berikut</p> <ol style="list-style-type: none"> Pelatihan bagi mahasiswa untuk meningkatkan softskill baik luring maupun daring dengan target peserta 1.000 mahasiswa per semester Informasi peluang kerja terupdate setiap bulan Terdapat mahasiswa yang bekerja di mitra UT melalui layanan penempatan kerja yang disediakan UT UT menyelenggarakan bursa kerja baik luring ataupun daring minimal 1 kali setahun <p>Formula:</p> $\sum a + b + c + d$ <ol style="list-style-type: none"> Pelatihan bagi mahasiswa untuk meningkatkan softskill (25%) Informasi peluang kerja (25%) Layanan penempatan kerja (25%) Career Fair (25%) 	%

No	Indikator Kinerja	Definisi Operasional, Kriteria, dan Formula	Satuan
IKPS 6.1	Persentase tersedianya Sistem Penjaminan Mutu UT yang mengintegrasikan SN Dikti dan Karakteristik UT (Simintas 2023)	<p>Definisi Operasional: Simintas UT adalah sistem pengelolaan UT sebagai PTJJ untuk mampu memenuhi kebutuhan dan persyaratan mahasiswa dan penerima manfaat lainnya secara terkendali dan berkelanjutan (SIMINTAS UT 2023).</p> <p>SN Dikti wajib dipenuhi setiap perguruan tinggi untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional</p> <p>Kriteria: Penjaminan mutu internal mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan (PPEPP) standar pendidikan tinggi yang terdiri dari:</p>	%

		<ul style="list-style-type: none"> • Standar Pendidikan, • Standar Penelitian, • Standar Pengabdian kepada Masyarakat • Standar Non-akademik. (Permendikbudristekdikti No 53/2023). Formula: Persentase tersedianya Sistem Penjaminan Mutu dengan menggabungkan bobot dari standar pendidikan tinggi dan data kuantitatif. Rumus yang digunakan adalah: $\text{Indeks Kualitas Sistem Penjaminan Mutu (IKSPM)} = (\text{PSP} \times \text{Bobot Standar Pendidikan}) + (\text{PSPN} \times \text{Bobot Standar Penelitian}) + (\text{PSPM} \times \text{Bobot Standar Pengabdian kepada Masyarakat}) + (\text{PSPNA} \times \text{Bobot Standar Non-akademik})$ Bobot Setiap Komponen: Standar Pendidikan: 30% Standar Penelitian: 25% Standar Pengabdian kepada Masyarakat: 20% Standar Non-akademik: 25%	
--	--	---	--

No	Indikator Kinerja	Definisi Operasional, Kriteria, dan Formula	Satuan
IKPS 7.1	Persentase tersedianya Dokumen SPMI UT	<p>Definisi Operasional: Tersedianya kelengkapan dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang tersusun secara teratur dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi di perguruan tinggi secara otonom meliputi kebijakan, manual, standar dan formulir.</p> <p>Kriteria: Memiliki dokumen formal SPMI dalam semua siklus kegiatan yang meliputi</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penetapan standar b. Pelaksanaan standar c. Evaluasi pemenuhan standar: evaluasi diri dan audit mutu internal d. Pengendalian pelaksanaan standar e. Peningkatan standar <p>Dokumen SPMI meliputi</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Dokumen kebijakan b. Dokumen manual terdiri dari manual penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan dan peningkatan c. Dokumen standar d. Dokumen formulir untuk setiap standar <p>Dengan merujuk pada SN Dikti, Standar PT dalam SPMI terdiri dari serangkaian 24 standar utama dan 5 standar tambahan tentang PTJJ yaitu</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Standar Nasional Pendidikan Tinggi, terdiri atas: <ul style="list-style-type: none"> Standar Kompetensi Lulusan; Standar Isi Pembelajaran; Standar Proses Pembelajaran; Standar Penilaian Pembelajaran; 	%

No	Indikator Kinerja	Definisi Operasional, Kriteria, dan Formula	Satuan
		<p>Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan; Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran; Standar Pengelolaan Pembelajaran; dan Standar Pembiayaan Pembelajaran.</p> <p>b. Standar Penelitian, terdiri atas: Standar Hasil Penelitian Standar Isi Penelitian; Standar Proses Penelitian; Standar Penilaian Penelitian; Standar Peneliti; Standar Sarana Dan Prasarana Penelitian; Standar Pengelolaan Penelitian; dan Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian.</p> <p>c. Standar Pengabdian kepada Masyarakat, terdiri atas: Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat; Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat; Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat; Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat; Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat; Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat; Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat; dan Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat.</p> <p>d. Standar Manajemen Pembelajaran Jarak Jauh, terdiri atas: Standar Kerjasama; Standar Sistem Informasi; Standar Layanan Mahasiswa; Standar Suasana Akademik; Standar Pembimbingan Belajar</p> <p>Formula</p> $\frac{\text{Jumlah Dokumen SPMI yang Tersedia}}{\text{Jumlah Total Dokumen SPMI}} \times 100\%$	

No	Indikator Kinerja	Definisi Operasional, Kriteria, dan Formula	Satuan
IKPS 8.1	Persentase Implementasi Audit Mutu Internal berbasis teknologi	<p>Definisi Operasional: Audit Mutu Internal (AMI) adalah merupakan prosedur untuk melakukan tes dan mengevaluasi semua kegiatan yang dilakukan sebagai bentuk layanan di organisasi. AMI dilakukan untuk mengevaluasi penerapan dan capaian standar UT (SIMINTAS 2023)</p> <p>Kriteria: Kriteria audit adalah kebijakan, prosedur atau persyaratan yang digunakan sebagai referensi. (Permendikbudristekdikti No 53/2023).</p>	%

No	Indikator Kinerja	Definisi Operasional, Kriteria, dan Formula	Satuan
		<p>Formula: Indeks AMI berbasis Teknologi (IAMIBT) diperoleh secara komposit dari jumlah nilai:</p> <p>Indeks AMI berbasis Teknologi (IAMIBT) =</p> $\frac{\text{Total Skor Implementasi AMI berbasis Teknologi}}{\text{Total Maksimal Skor Potensial}} \times 100\%$	

No	Indikator Kinerja	Definisi Operasional, Kriteria, dan Formula	Satuan
IKPS 9.1	Predikat Akreditasi Unit	<p>Definisi Operasional: Akreditasi adalah kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan SN Dikti (Permendikbudristekdikti Nomor 53/2023). Predikat akreditasi unit adalah penilaian kualitas suatu unit di perguruan tinggi yang diberikan oleh lembaga akreditasi berdasarkan evaluasi terhadap standar kualitas pendidikan, sarana, dan fasilitas yang dimiliki oleh unit tersebut.</p> <p>Kriteria: a. terakreditasi; atau b. tidak terakreditasi. (Permendikbudristekdikti No 53/2023).</p> <p>Formula: Jumlah Unit yang Terakreditasi</p>	Jumlah

No	Indikator Kinerja	Definisi Operasional, Kriteria, dan Formula	Satuan
IKPS 9.2	Jumlah unit yang memperoleh sertifikasi ISO	<p>Definisi Operasional: Sertifikasi ISO memberikan kredibilitas suatu Organisasi dan juga memberikan kepercayaan kepada klien potensial bahwa organisasi yang akan dijanjikan. Tujuan utama sertifikasi ISO adalah untuk mempromosikan peningkatan berkelanjutan pada sistem manajemen Organisasi Anda.</p> <p>UT mengacu pada standar ISO 21001:2018 tentang Persyaratan Sistem Manajemen Organisasi Pendidikan (Simintas 2023)"</p> <p>Kriteria:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sangat Baik : Semua unit atau departemen memperoleh sertifikasi ISO. • Baik : Lebih dari 75% unit atau departemen memperoleh sertifikasi ISO. • Cukup : 50% - 75% unit atau departemen memperoleh sertifikasi ISO. • Kurang : Kurang dari 50% unit atau departemen memperoleh sertifikasi ISO. 	Jumlah

No	Indikator Kinerja	Definisi Operasional, Kriteria, dan Formula	Satuan
		<ul style="list-style-type: none"> • Tidak Memadai: Tidak ada unit atau departemen yang memperoleh sertifikasi ISO. <p>Formula:</p> $\frac{\text{Jumlah Unit yang Memperoleh Sertifikasi ISO}}{\text{Total Jumlah Unit}} \times 100\%$	

No	Indikator Kinerja	Definisi Operasional, Kriteria, dan Formula	Satuan
IKPS 10.1	Persentase implementasi pedoman Manajemen Risiko oleh unit	<p>Definisi Operasional Manajemen Risiko adalah Pendekatan sistematis untuk menentukan tindakan terbaik dalam kondisi ketidakpastian (ISO 9001:2015).</p> <p>Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan.</p> <p>Ukuran yang digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana suatu organisasi berhasil dalam mengelola risiko secara efektif. KPI ini membantu organisasi untuk memantau dan mengukur kinerja mereka dalam menerapkan praktik manajemen risiko yang baik.</p> <p>Kriteria Unit sudah mengimplementasikan Pedoman Manajemen Risiko, dengan kriteria:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sangat Baik : Seluruh unit atau departemen telah sepenuhnya menerapkan pedoman Manajemen Risiko. • Baik : Lebih dari 75% unit atau departemen telah menerapkan pedoman Manajemen Risiko. • Cukup : 50% - 75% unit atau departemen telah menerapkan pedoman Manajemen Risiko. • Kurang : Kurang dari 50% unit atau departemen telah menerapkan pedoman Manajemen Risiko. • Tidak Memadai: Tidak ada unit atau departemen yang menerapkan pedoman Manajemen Risiko. <p>Formula:</p> $\frac{\text{Jumlah Unit yang Mengimplementasikan Pedoman Manajemen Risiko}}{\text{Total Jumlah Unit}} \times 100\%$	%

No	Indikator Kinerja	Definisi Operasional, Kriteria, dan Formula	Satuan
IKPS 11.1	Persentase pemutakhiran pedoman audit berbasis risiko	<p>Definisi Operasional: Pemutakhiran pedoman audit berbasis risiko bertujuan untuk memastikan seluruh dokumen dapat mengevaluasi peningkatan kinerja dan perbaikan proses pengelolaan risiko atas program strategis/prioritas universitas dengan sasaran menilai ketaatan terhadap ketentuan yang berlaku, menilai aspek 3E, menilai keberhasilan pencapaian program strategis, memberikan saran perbaikan pengelolaan risiko dan pengendalian intern</p> <p>Kriteria: Pedoman memuat aspek-aspek berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ketaatan terhadap ketentuan yang berlaku 2. aspek 3E 3. keberhasilan pencapaian program strategis 4. memberikan saran perbaikan pengelolaan risiko dan pengendalian intern <p>Formula</p> $\frac{\text{Pedoman yang Dimutakhirkan}}{\text{Pedoman yang Harus Dimutakhirkan}} \times 100\%$	%

No	Indikator Kinerja	Definisi Operasional, Kriteria, dan Formula	Satuan
IKPS 12.1	Persentase pengelolaan institusi melalui manajemen data terpadu	<p>Definisi Operasional: pemanfaatan data pada berbagai fungsi atau tingkatan dalam suatu organisasi dengan tujuan menciptakan ekosistem digital yang transparan dan mendukung pengambilan keputusan manajemen. Selain itu meningkatkan efisiensi dan efektifitas tatakelola secara keseluruhan.</p> <p>Kriteria: arsitektur data yang saling terintegrasi untuk bidang yang terkait</p> <p>Formula:</p> $\frac{\text{Jumlah Aplikasi yang Terintegrasi}}{\text{Jumlah Aplikasi di UT}} \times 100\%$	%

No	Indikator Kinerja	Definisi Operasional, Kriteria, dan Formula	Satuan
IKPS 13.1	Persentase implementasi <i>roadmap human capital</i> secara komperhensif	<p>Definisi Operasional: Persentase implementasi <i>roadmap human capital</i> secara komprehensif adalah ukuran yang menunjukkan sejauh mana elemen-elemen <i>roadmap human capital</i> telah diimplementasikan dalam organisasi. <i>Roadmap human capital</i> mencakup berbagai aspek seperti rekrutmen, pengembangan, manajemen kinerja, retensi, dan strategi suksesi. Implementasi yang komprehensif berarti bahwa semua aspek <i>roadmap</i> harus diintegrasikan dan dijalankan secara efektif dalam strategi keseluruhan organisasi.</p>	%

No	Indikator Kinerja	Definisi Operasional, Kriteria, dan Formula	Satuan
		<p>Kriteria: Kriteria untuk mengukur indikator ini meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kelengkapan Implementasi: Semua elemen <i>roadmap</i> harus diimplementasikan. Ini termasuk pelaksanaan rencana rekrutmen, program pengembangan, sistem manajemen kinerja, strategi retensi karyawan, dan persiapan strategi suksesi. 2. Integrasi: Sejauh mana elemen-elemen <i>roadmap</i> terintegrasi satu sama lain dan dengan strategi organisasi secara keseluruhan. 3. Efektivitas: Evaluasi terhadap efektivitas implementasi berdasarkan feedback, kinerja organisasi, dan kepuasan karyawan. <p>Formula: Formula untuk menghitung indikator ini dapat dirumuskan sebagai berikut:</p> $Y = \left(\frac{\sum_{i=0}^n X_i}{\sum_{i=0}^n Z_i} \right) \times 100\%$ <p>Keterangan: Y = Persentase Implementasi Roadmap Human Capital X = Jumlah Elemen Roadmap yang Terimplementasi Secara Efektif adalah jumlah elemen <i>roadmap</i> yang telah diimplementasikan dengan memenuhi kriteria kelengkapan, integrasi, dan efektivitas. Z = Total Elemen Roadmap adalah jumlah total elemen yang ditetapkan dalam <i>roadmap</i> human capital organisasi.</p>	

No	Indikator Kinerja	Definisi Operasional, Kriteria, dan Formula	Satuan
IKPS 14.1	Persentase terintegrasinya sistem digital untuk manajemen sarana dan prasarana dengan memanfaatkan teknologi mutakhir	<p>Definisi Operasional: Persentase integrasi sistem digital untuk manajemen sarana dan prasarana dengan memanfaatkan teknologi mutakhir agar tercapai pendayagunaan semua sarana dan prasarana secara efektif dan efisien</p> <p>Kriteria: Tersedianya sistem yang menunjang proses manajemen sarana dan prasarana yang terdiri dari beberapa tahap yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) perencanaan sarana dan prasarana; (2) pengadaan sarana dan prasarana; (3) pendistribusian sarana dan prasarana; (4) pemeliharaan sarana dan prasarana; 	%

No	Indikator Kinerja	Definisi Operasional, Kriteria, dan Formula	Satuan
		<p>(5) penginventarisasian sarana dan prasarana; (6) penghapusan sarana dan prasarana;serta (7) evaluasi sarana dan prasarana</p> <p>Formula:</p> $\frac{\text{Jumlah sistem yang sudah diintegrasikan}}{\text{Jumlah total sistem yang akan diintegrasikan}} \times 100$	

No	Indikator Kinerja	Definisi Operasional, Kriteria, dan Formula	Satuan
IKPS 14.2	Persentase implementasi roadmap sarana dan prasarana dengan utilisasi integrasi jejaring <i>cyber university</i>	<p>Definisi Operasional: Persentase implementasi roadmap sarana dan prasarana dengan utilisasi integrasi jejaring <i>cyber university</i></p> <p>Kriteria 1 Implementasi aplikasi Tata Kelola Sarana dan Prasarana PTNBH UT (e-Asset) yang terintegrasi dengan aplikasi tata kelola PTNBH UT, bidang</p> <ol style="list-style-type: none"> SDM Keuangan Auditing dan Manajemen Risiko <p>Kriteria 2 Implementasi Roadmap atau Pedoman SOP Tata Kelola Sarana dan Prasarana PTNBH UT</p> <p>Formula:</p> $a.K1 + b.K2 + c.K3 + d.K4$ <p>a = integrasi aplikasi Tata Kelola Sarpras dengan aplikasi SDM b = integrasi aplikasi Tata Kelola Sarpras dengan aplikasi Aset/BMUT c = integrasi aplikasi Tata Kelola Sarpras dengan aplikasi Layanan Akademik d = Implementasi Roadmap atau Pedoman SOP Tata Kelola Sarana dan Prasarana PTNBH UT k = konstanta bobot</p>	%

No	Indikator Kinerja	Definisi Operasional, Kriteria, dan Formula	Satuan
IKPS 15.1	Integrasi sistem tata kelola pengelolaan dana dengan prinsip akuntabilitas, transparansi serta efektif, efisien dan ekonomis (3E).	<p>Definisi Operasional: Persentase integrasi sistem tata kelola pengelolaan dana dengan prinsip akuntabilitas, transparansi serta efektif, efisien dan ekonomis (3E)</p> <p>Kriteria 1 Proses integrasi tata kelola pengelolaan dana yang sudah terintegrasi dengan aplikasi bidang</p> <ol style="list-style-type: none"> SDM Aset Layanan Akademik (myUT dan SRS) Auditing dan Manajemen Risiko 	%

No	Indikator Kinerja	Definisi Operasional, Kriteria, dan Formula	Satuan
		<p>Kriteria 2 Output laporan pengelolaan dana atau laporan keuangan dengan prinsip akuntabel, transparansi, dan 3E adalah opini dari KAP atas LK PTNBH UT adalah opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)</p> <p>Formula $a.K1 + b.K2 + c.K3 + d.K4 + e.K4$</p> <p>a = integrasi aplikasi pengelolaan dana dengan aplikasi SDM b = integrasi aplikasi pengelolaan dana dengan aplikasi Aset/BMUT c = integrasi aplikasi pengelolaan dana dengan aplikasi Layanan Akademik d = integrasi aplikasi pengelolaan dana dengan aplikasi auditing dan manajemen risiko e = opini KAP atas LK PTNBH UT k = konstanta bobot</p>	

No	Indikator Kinerja	Definisi Operasional, Kriteria, dan Formula	Satuan
IKPS 16.1	Persentase penguatan infrastruktur TIK melalui kegiatan peremajaan dan penambahan kapasitas untuk mendukung tridharma dan stakeholder perguruan tinggi dan memastikan ketersediaan layanan infratraktur TIK berdasarkan kebutuhan strategis UT	<p>Definisi Operasional: Persentase tersedianya infrastruktur jaringan TIK yang kokoh untuk memenuhi kebutuhan strategis UT</p> <p>Kriteria</p> <ol style="list-style-type: none"> Kriteria rasio jumlah komputer dan staf Kriteria umur perangkat kerja tidak melebihi 4 tahun Jumlah ideal laboratorium pada UT Daerah (Besar, Menengah, Kecil) Rasio <i>Bandwith</i> per karyawan dan per mahasiswa <p>Formula $x = \frac{a + b + c + d}{100} x 100\%$</p> <p>Keterangan pada formula</p> <ol style="list-style-type: none"> Kriteria rasio jumlah komputer dan staf Kriteria umur perangkat kerja tidak melebihi 4 tahun Jumlah ideal laboratorium pada UT Daerah (Besar, Menengah, Kecil) Rasio <i>Bandwith</i> per karyawan dan per mahasiswa 	%

No	Indikator Kinerja	Definisi Operasional, Kriteria, dan Formula	Satuan
IKPS 16.2	Persentase pengembangan dan implementasi standar tata Kelola TIK (Sistem dan Jaringan) berstandar industri TIK serta mendapat pengakuan dari	<p>Definisi Operasional Persentase pengembangan dan implementasi standar tata kelola TIK berstandar internasional</p> <p>Kriteria</p> <ol style="list-style-type: none"> Persentase dokumen proses bisnis per unit yang terdokumentasi 	%

No	Indikator Kinerja	Definisi Operasional, Kriteria, dan Formula	Satuan
	lembaga penjamin mutu internasional	<p>b. Pengakuan pengelolaan berstandar internasional</p> <p>c. Persentase pengembangan tata kelola IT dari berbagai aspek</p> <p>Formula</p> $x = \frac{a + b + c}{100} x 100\%$ <p>Keterangan pada formula</p> <p>a. Persentase dokumen proses bisnis per unit yang terdokumentasi</p> <p>b. Pengakuan pengelolaan berstandar internasional</p> <p>c. Persentase pengembangan tata kelola IT dari berbagai aspek</p>	

No	Indikator Kinerja	Definisi Operasional, Kriteria, dan Formula	Satuan
IKPS 17.1	Persentase implementasi digital sistem layanan TIK berdasarkan DLE UT yang mengutamakan integrasi antar sistem, automasi dan sistem cerdas	<p>Definisi Operasional</p> <p>Persentase implementasi digital sistem layanan TIK yang terintegrasi</p> <p>Kriteria</p> <p>a. Capaian target pengembangan sistem aplikasi berdasar DLE</p> <p>b. Persentas aplikasi yang terhubung ke SSO</p> <p>Formula</p> $x = \frac{a + b}{100} x 100\%$ <p>Keterangan pada formula</p> <p>a. Capaian target pengembangan sistem aplikasi berdasar DLE</p> <p>b. Persentase aplikasi yang terhubung ke SSO</p>	%

No	Indikator Kinerja	Definisi Operasional, Kriteria, dan Formula	Satuan
IKPS 18.1	Persentase tercapainya maturitas manajemen UT berbasis risiko pada tingkat "Risk Defined"	<p>Definisi Operasional:</p> <p>Risk Management Maturity Model adalah suatu model yang menggambarkan tahapan-tahapan perkembangan dan tingkat kemampuan organisasi dalam menerapkan manajemen risiko (ISO 31000:2018).</p> <p>Risk maturity dapat membantu organisasi dalam mengetahui tingkat maturitas dan gambaran posisi organisasinya dalam penerapan manajemen risiko.</p> <p>Kriteria:</p> <p>Tingkat implementasi pedoman Manajemen Risiko sesuai dengan standar keselamatan dan keberlanjutan yang relevan dengan konteks perguruan tinggi. Kriteria</p>	%

No	Indikator Kinerja	Definisi Operasional, Kriteria, dan Formula	Satuan
		<ul style="list-style-type: none"> • Sangat Baik : Seluruh unit atau departemen telah sepenuhnya menerapkan pedoman Manajemen Risiko. • Baik : Lebih dari 75% unit atau departemen telah menerapkan pedoman Manajemen Risiko. • Cukup : 50% - 75% unit atau departemen telah menerapkan pedoman Manajemen Risiko. • Kurang : Kurang dari 50% unit atau departemen telah menerapkan pedoman Manajemen Risiko. • Tidak Memadai : Tidak ada unit atau departemen yang menerapkan pedoman Manajemen Risiko. <p>Formula:</p> $\frac{\text{Jumlah Unit yang Memperoleh Sertifikasi ISO}}{\text{Total Jumlah Unit}} \times 100\%$	

No	Indikator Kinerja	Definisi Operasional, Kriteria, dan Formula	Satuan
IKPS 19.1	Persentase tersedianya sarana dan prasarana berbasis digital untuk mendukung UT sebagai cyber university dengan memperhatikan teknologi ramah lingkungan dan responsif gender	<p>Definisi Operasional Persentase tersedianya sarana dan prasarana berbasis digital untuk mendukung UT sebagai cyber university dengan memperhatikan teknologi ramah lingkungan dan responsif gender</p> <p>Kriteria 1 Jumlah sarana dan prasarana digital UT yang memperhatikan teknologi ramah lingkungan dan responsif gender</p> <p>Kriteria 2 Jumlah belanja sarana dan prasarana dengan konsep teknologi ramah lingkungan dan responsif gender</p> <p>Kriteria 3 Jumlah % penurunan tagihan listrik UT (tahun berjalan dibandingkan tahun sebelumnya)</p> <p>Formula:</p> $\left(\frac{N1K}{X} \times 100\%\right) + \left(\frac{N2K}{Y} \times 100\%\right) + N3$ <p>N1 = Jumlah sarana dan prasarana digital UT yang memperhatikan teknologi ramah lingkungan dan responsif gender N2 = Jumlah anggaran sarana dan prasarana dengan konsep teknologi ramah lingkungan dan responsif gender N3 = Jumlah % penurunan tagihan listrik UT (tahun berjalan dibandingkan tahun sebelumnya) K = konstanta bobot X = Jumlah unit sarana dan prasarana UT Y = Jumlah belanja sarana dan prasarana UT dalam 1 Tahun</p>	%

No	Indikator Kinerja	Definisi Operasional, Kriteria, dan Formula	Satuan
IKPS 20.1	Persentase penguatan investasi dana melalui instrumen yang profitable.	<p>Definisi Operasional Persentase penguatan investasi dana melalui instrumen yang profitable</p> <p>Kriteria 1 Jumlah Rp dana investasi yang ditempatkan pada investasi jangka pendek</p> <p>Kriteria 2 Jumlah Rp dana investasi yang ditempatkan pada investasi jangka panjang</p> <p>Formula</p>	%

No	Indikator Kinerja	Definisi Operasional, Kriteria, dan Formula	Satuan
		$\frac{(N1K1) + (N2K2)}{A} \times 100\%$ <p>N1 = Jumlah Rp dana investasi yang ditempatkan pada investasi jangka pendek N2 = Jumlah Rp dana investasi yang ditempatkan pada investasi jangka panjang k = konstanta bobot per masing-masing jenis investasi A = Jumlah aset PTNBH sesuai LK</p>	

No	Indikator Kinerja	Definisi Operasional, Kriteria, dan Formula	Satuan
IKPS 21.1	Persentase peningkatan diversifikasi pendanaan yang bersumber dari sektor usaha dan penunjang komersil lainnya	<p>Definisi Operasional: Persentase peningkatan diversifikasi pendanaan yang bersumber dari sektor usaha dan penunjang komersil lainnya</p> <p>Kriteria: Jumlah pendapatan dari diversifikasi sektor usaha dan penunjang komersil PTNBH UT tahun berjalan</p> <p>Formula:</p> $\frac{N}{X} \times 100\%$ <p>N = Jumlah pendapatan dari diversifikasi sektor usaha dan penunjang komersil PTNBH UT tahun berjalan X = Jumlah pendapatan dari diversifikasi sektor usaha dan penunjang komersil PTNBH UT tahun sebelumnya.</p>	%

No	Indikator Kinerja	Definisi Operasional, Kriteria, dan Formula	Satuan
IKPS 22.1	Persentase tersedia peta risiko di tingkat universitas dan unit	<p>Definisi Operasional:</p> <p>Peta Risiko menggambarkan tren risiko yang memperlihatkan gambaran total risiko dan distribusi posisinya dalam grafik dengan frekuensi pada sumbu horisontal (x) dan konsekuensi pada sumbu vertikal (y).</p> <p>Persentase tersedianya peta risiko di tingkat universitas dan unit mengukur sejauh mana perguruan tinggi telah menyusun dan menyediakan peta risiko yang memvisualisasikan risiko-risiko utama yang dihadapi oleh universitas secara keseluruhan dan oleh setiap unit yang terkait.</p> <p>Kriteria:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sangat Baik : Seluruh tingkat universitas dan unit memiliki peta risiko yang tersedia. • Baik : Lebih dari 75% tingkat universitas dan unit memiliki peta risiko yang tersedia. • Cukup : 50% - 75% tingkat universitas dan unit memiliki peta risiko yang tersedia. • Kurang : Kurang dari 50% tingkat universitas dan unit memiliki peta risiko yang tersedia. 	%

No	Indikator Kinerja	Definisi Operasional, Kriteria, dan Formula	Satuan
		<ul style="list-style-type: none"> • Tidak Memadai : Tidak ada tingkat universitas atau unit yang memiliki peta risiko yang tersedia. <p>Formula:</p> $\frac{\text{Jumlah Unit dengan Peta Risiko}}{\text{Total Jumlah Unit Terkait}} \times 100\%$	

No	Indikator Kinerja	Definisi Operasional, Kriteria, dan Formula	Satuan
IKPS 23.1	Persentase kenaikan jumlah mahasiswa pertahun berdasarkan target	<p>Definisi operasional: Persentase capaian jumlah mahasiswa yang melakukan registrasi dari semua program mulai program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana berdasarkan target yang ditetapkan.</p> <p>Kriteria: Jumlah mahasiswa yang melakukan registrasi pada semua program baik Diploma, Sarjana dan Pascasarjana</p> <p>Formula:</p> $\frac{n}{L} \times 100\%$ <p>n = Jumlah mahasiswa yang registrasi pada tahun berjalan L = Jumlah target mahasiswa sesuai Surat Edaran Rektor</p>	%

No	Indikator Kinerja	Definisi Operasional, Kriteria, dan Formula	Satuan
IKPS 23.2	Persentase perluasan daya jangkau layanan	<p>Definisi operasional Daya jangkau yang luas agar UT dapat memberikan layanan pendidikan bagi warga negara Indonesia yang berada di seluruh pelosok wilayah Indonesia, bahkan juga yang berada di luar negeri.</p> <p>Kriteria Jumlah SALUT yang didirikan di Kabupaten dan/Kota di seluruh Indonesia</p> <p>Formula</p> $\frac{n}{L} \times 100\%$ <p>n = jumlah SALUT L = Jumlah Kab/Ko</p>	%

No	Indikator Kinerja	Definisi Operasional, Kriteria, dan Formula	Satuan
IKPS 24.1	Persentase Peningkatan Jumlah Retensi Mahasiswa	<p>Definisi operasional: Peningkatan retensi mencerminkan kemampuan institusi pendidikan untuk mempertahankan mahasiswa dalam program studi mereka.</p> <p>Kriteria jumlah mahasiswa yang tetap terdaftar pada awal dan akhir periode yang ditetapkan.</p> <p>Formula</p>	%

No	Indikator Kinerja	Definisi Operasional, Kriteria, dan Formula	Satuan
		Tentukan persentase peningkatan dengan rumus: $retensi = \frac{\Sigma x - \Sigma y}{\Sigma y} \times 100\%$ X = Mahasiswa Awal semester Y = Mahasiswa Akhir semester	

No	Indikator Kinerja	Definisi Operasional, Kriteria, dan Formula	Satuan
IKPS 25.1	Persentase pengembangan sistem layanan terpadu yang sudah terintegrasi di wilayah Indonesia	<p>Definisi Operasional Persentase Pengembangan Sistem Layanan Terpadu yang Terintegrasi diukur sebagai persentase kemajuan dalam mengintegrasikan berbagai komponen atau layanan ke dalam sistem layanan terpadu.</p> <p>Kriteria</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sangat Baik : Seluruh layanan yang telah terintegrasi. • Baik : Lebih dari 75% layanan telah terintegrasi • Cukup : 50% - 75% layanan telah terintegrasi • Kurang : Kurang dari 50% layanan telah terintegrasi • Tidak Memadai: Tidak ada layanan yang terintegrasi <p>Formula</p> $\frac{\text{Jumlah komponen/layanan yang telah terintegrasi}}{\text{Jumlah komponen/layanan UT}} \times 100\%$	%

No	Indikator Kinerja	Definisi Operasional, Kriteria, dan Formula	Satuan
IKPS 25.2	Persentase mahasiswa yang menggunakan akses internet gratis	<p>Definisi operasional UT menyediakan internet gratis bagi mahasiswa melalui wifi.id, mahasiswa yang ingin menggunakan fasilitas harus mengaktifkan usernya di UT Daerah</p> <p>Kriteria Jumlah user mahasiswa yang mengakses wifi.id dibandingkan dengan jumlah mahasiswa registrasi</p> <p>Formula</p> $\frac{n}{t} \times 100$ <p>n = jumlah user mahasiswa yang mengakses wifi.id t = jumlah mahasiswa registrasi</p>	%

No	Indikator Kinerja	Definisi Operasional, Kriteria, dan Formula	Satuan
IKPS 25.3	Persentase kepuasan stakeholders	<p>Definisi Operasional Tingkat Kepuasan Stakeholders diukur sebagai hasil dari survei atau penilaian yang mengukur persepsi dan kepuasan stakeholders terhadap kinerja UT</p> <p>Kriteria</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sangat Baik: Skor mencapai 100% • Baik : Skor lebih dari 75% • Cukup : Skor antara 50% - 75% • Kurang : Skor kurang dari 50% <p>Formula</p> $\frac{\text{Total Skor Kepuasan}}{\text{Total Skor Maksimum yang Dapat Dicapai}} \times 100$	%

No	Indikator Kinerja	Definisi Operasional, Kriteria, dan Formula	Satuan
IKPS 26.1	Jumlah kerja sama akademik dengan institusi negeri dan swasta di dalam negeri	<p>Definisi Operasional Jumlah kerja sama akademik di bidang tridharma perguruan tinggi dengan institusi negeri dan swasta di dalam negeri</p> <p>Kriteria Perjanjian kerja sama berbentuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pengembangan kurikulum bersama (merencanakan hasil (output) pembelajaran, konten, dan metode pembelajaran); 2) menyediakan kesempatan pembelajaran berbasis project (PBL) ; 3) menyediakan program magang paling sedikit 1 (satu) semester penuh; 4) menyediakan kesempatan kerja bagi lulusan; 5) mengisi kegiatan pembelajaran dengan dosen tamu praktisi; 6) menyediakan pelatihan (upskilling dan reskilling) bagi dosen maupun instruktur; 7) menyediakan resource sharing sarana dan prasarana; 8) menyelenggarakan teaching factory (TEFA) di kampus; 9) menyelenggarakan program double degree atau joint degree; dan/atau 10) melakukan kemitraan penelitian <p>Kriteria Mitra</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) perusahaan multinasional; 2) perusahaan nasional berstandar tinggi; 3) perusahaan teknologi global; 4) perusahaan rintisan (startup company) teknologi; 5) Organisasi nirlaba kelas dunia; 6) institusi/organisasi multilateral; 7) perguruan tinggi yang masuk dalam daftar QS200 berdasarkan bidang ilmu (QS200 by subject) ; 	Jumlah Implementasi Kerja sama (IA)

No	Indikator Kinerja	Definisi Operasional, Kriteria, dan Formula	Satuan
		<p>8) perguruan tinggi, fakultas, atau program studi dalam bidang yang relevan; 9) instansi pemerintah, BUMN, dan/ atau BUMD; 10) rumah sakit; 11) UMKM; 12) lembaga riset pemerintah, swasta, nasional, maupun internasional; atau 13) lembaga kebudayaan berskala nasional/ bereputasi.</p> <p>Formula</p> $\frac{\sum_i^i n_i k_i}{t} \times 100$ <p>n = jumlah kerja sama pada program studi S1 dan D4/D3/D2/D1 yang memenuhi kriteria t = jumlah program studi S1 dan D4/D3/D2/D1.</p>	

No	Indikator Kinerja	Definisi Operasional, Kriteria, dan Formula	Satuan
IKPS 26.2	Jumlah kerja sama akademik dengan perguruan tinggi atau lembaga internasional	<p>Definisi Operasional Implementasi Kerja sama akademik yang dilakukan UT dengan mitra Internasional, baik yang ada di Indonesia maupun di luar negeri yang dilakukan oleh semua program studi yang ada di UT.</p> <p>Kriteria Perjanjian kerja sama berbentuk: 1) menyediakan kesempatan pembelajaran berbasis project (PBL) ; 2) menyediakan program magang paling sedikit 1 (satu) semester penuh; 3) menyediakan kesempatan kerja bagi lulusan; 4) mengisi kegiatan pembelajaran dengan dosen tamu praktisi; 5) menyediakan pelatihan (upskilling dan reskilling) bagi dosen maupun instruktur; 6) menyediakan resource sharing sarana dan prasarana; 7) menyelenggarakan teaching factory (TEFA) di kampus; 8) menyelenggarakan program double degree atau joint degree; dan/atau 9) melakukan kemitraan penelitian</p> <p>Kriteria Mitra 1) perusahaan multinasional; 2) perusahaan teknologi global; 3) perusahaan rintisan (startup company) teknologi; 4) organisasi nirlaba kelas dunia; 5) institusi/organisasi multilateral; 6) perguruan tinggi yang masuk dalam daftar QS200 berdasarkan bidang ilmu (QS200 by subject) ; 7) perguruan tinggi, fakultas, atau program studi dalam bidang yang relevan; 8) lembaga riset internasional;</p>	Implementasi Kerja sama (IA)

No	Indikator Kinerja	Definisi Operasional, Kriteria, dan Formula	Satuan
		<p>Formula</p> $\frac{\sum_1^i n_i k_i}{t} \times 100$ <p>n = jumlah kerja sama pada program studi S1 dan D4/D3/D2/D1 yang memenuhi kriteria t = jumlah program studi S1 dan D4/D3/D2/D1.</p>	

No	Indikator Kinerja	Definisi Operasional, Kriteria, dan Formula	Satuan
IKPS 26.3	Jumlah kerja sama pada bidang non akademik di dalam negeri	<p>Definisi Operasional: Kerja sama pada bidang non akademik dengan mitra di dalam negeri</p> <p>Kriteria: Perjanjian kerja sama berbentuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pengembangan kurikulum bersama (merencanakan hasil (output)pembelajaran, konten, dan metode pembelajaran); 2) menyediakan kesempatan pembelajaran berbasis project (PBL) ; 3) menyediakan program magang paling sedikit 1 (satu) semester penuh; 4) menyediakan kesempatan kerja bagi lulusan; 5) mengisi kegiatan pembelajaran dengan dosen tamu praktisi; 6) menyediakan pelatihan (upskilling dan reskilling) bagi dosen maupun instruktur; 7) menyediakan resource sharing sarana dan prasarana; 8) menyelenggarakan teaching factory (TEFA) di kampus; 9) menyelenggarakan program double degree atau joint degree; dan/atau 10) melakukan kemitraan penelitian <p>Kriteria Mitra:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) perusahaan multinasional; 2) perusahaan nasional berstandar tinggi; 3) perusahaan teknologi global; 4) perusahaan rintisan (startup company) teknologi; 5) organisasi nirlaba kelas dunia; 6) institusi/organisasi multilateral; 7) perguruan tinggi yang masuk dalam daftar QS200 berdasarkan bidang ilmu (QS200 by subject) ; 8) perguruan tinggi, fakultas, atau program studi dalam bidang yang relevan; 9) instansi pemerintah, BUMN, dan/ atau BUMD; 10) rumah sakit; 11) UMKM; 12) lembaga riset pemerintah, swasta, nasional, maupun internasional; atau 13) lembaga kebudayaan berskala nasional/ bereputasi. 	Implementasi Kerja sama (IA)

No	Indikator Kinerja	Definisi Operasional, Kriteria, dan Formula	Satuan
		<p>Formula:</p> $\frac{\sum_1^i n_i k_i}{t} \times 100$ <p>n = jumlah kerja sama pada program studi S1 dan D4/D3/D2/D1 yang memenuhi kriteria t = jumlah program studi S1 dan D4/D3/D2/D1. k = konstanta bobot (pembobotan mempertimbangkan reputasi mitra)</p>	

No	Indikator Kinerja	Definisi Operasional, Kriteria, dan Formula	Satuan
IKPS 26.4	Jumlah kerja sama internasional pada bidang non akademik	<p>Definisi operasional: Kerja sama pada bidang non akademik dengan mitra berskala internasional.</p> <p>Kriteria: Perjanjian kerja sama berbentuk: 1) menyediakan kesempatan kerja bagi lulusan; 2) mengisi kegiatan pembelajaran dengan dosen tamu praktisi; 3) menyediakan pelatihan (<i>upskilling</i> dan <i>reskilling</i>) bagi dosen maupun instruktur; 4) menyediakan <i>resource sharing</i> sarana dan prasarana</p> <p>Kriteria Mitra: 1) perusahaan multinasional; 2) perusahaan teknologi global; 3) perusahaan rintisan (startup company) teknologi; 4) organisasi nirlaba kelas dunia; institusi/organisasi multilateral; 5) perguruan tinggi yang masuk dalam daftar QS200 berdasarkan bidang ilmu (QS200 by subject) ; 6) lembaga riset internasional</p> <p>Formula:</p> $\frac{\sum_1^i n_i k_i}{t} \times 100$ <p>n = jumlah kerja sama pada program studi S1 dan D4/D3/D2/D1 yang memenuhi kriteria t = jumlah program studi S1 dan D4/D3/D2/D1. k = konstanta bobot (pembobotan mempertimbangkan reputasi mitra)</p>	Implementasi Kerja sama (IA)

No	Indikator Kinerja	Definisi Operasional, Kriteria, dan Formula	Satuan
IKPS 27.1	Jumlah program studi akreditasi A/Unggul Sumber: Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020	<p>Definisi Operasional: Akreditasi Program Studi adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan program studi. Akreditasi merupakan sistem penjaminan mutu eksternal sebagai bagian dari sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi berdasarkan kriteria yang mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi</p> <p>Kriteria: a. Akreditasi program studi di perguruan tinggi dilakukan oleh BAN PT atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM), yang dibentuk oleh pemerintah atau masyarakat yang diakui oleh pemerintah. LAM yang diakui oleh pemerintah antara lain LAM-PTKes, LAM-EMBA, LAM-INFOKOM, LAM-SAMA, LAM-TEKNIK, LAM-DIK b. Melakukan pengisian instrumen Akreditasi untuk Program studi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mendapatkan peringkat unggul dari hasil penilaian.</p> <p>Formula: Jumlah program studi baik diploma, sarjana, magister dan doktor yang mendapatkan nilai >361 dari hasil penilaian akreditasi A atau unggul.</p>	Jumlah

No	Indikator Kinerja	Definisi Operasional, Kriteria, dan Formula	Satuan
IKPS 27.2	Jumlah program studi baru sesuai kebutuhan masyarakat	<p>Definisi Operasional: Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam I (satu) jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/ atau pendidikan profesi (Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2022).</p> <p>Program studi dirancang dengan perencanaan yang memadai dan realistis agar dapat mengakomodasi semua kebutuhan dan persyaratan, serta selesai tepat waktu dengan seluruh kelengkapannya sebelum dapat ditawarkan ke masyarakat (SIMINTAS 2023).</p> <p>Jumlah program studi baru sesuai kebutuhan masyarakat adalah indikator kinerja yang mengukur berapa banyak program studi yang dibuka oleh perguruan tinggi sebagai respons terhadap kebutuhan dan tuntutan masyarakat. Program studi baru dianggap sesuai jika dapat memberikan kontribusi positif terhadap pengembangan sumber daya manusia dan memenuhi kebutuhan pekerjaan atau perkembangan industri.</p>	Program Studi

No	Indikator Kinerja	Definisi Operasional, Kriteria, dan Formula	Satuan
		<p>Kriteria:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sangat Baik : Semua program studi baru yang dibuka sangat relevan dengan kebutuhan masyarakat dan pasar kerja. • Baik : Lebih dari 75% program studi baru relevan dengan kebutuhan masyarakat dan pasar kerja. • Cukup : 50% - 75% program studi baru relevan dengan kebutuhan masyarakat dan pasar kerja. • Kurang : Kurang dari 50% program studi baru relevan dengan kebutuhan masyarakat dan pasar kerja. • Tidak Memadai : Tidak ada program studi baru yang dibuka yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan pasar kerja. <p>Formula:</p> $\frac{\text{Jumlah Program Studi Baru yang Terealisasi}}{\text{Jumlah Program Studi Baru yang Dirancang}} \times 100\%$	

No	Indikator Kinerja	Definisi Operasional, Kriteria, dan Formula	Satuan
IKPS 27.3	UT memperoleh predikat A (Unggul) untuk Akreditasi Perguruan Tinggi	<p>Definisi Operasional: Akreditasi Perguruan Tinggi adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan Perguruan Tinggi berdasarkan kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan menjamin mutu secara eksternal baik bidang akademik maupun nonakademik untuk melindungi kepentingan mahasiswa dan Masyarakat.</p> <p>Kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan akreditasi PT dilakukan oleh badan yang dibentuk Pemerintah untuk melakukan dan mengembangkan Akreditasi Perguruan Tinggi secara mandiri saat ini dikenal sebagai Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). 2. Melakukan pengisian instrumen Akreditasi untuk Perguruan Tinggi. 3. Memenuhi standar penilaian dalam 9 kriteria penilai mendapatkan peringkat unggul <ol style="list-style-type: none"> a. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran b. Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama c. Mahasiswa d. Sumber Daya Manusia e. Keuangan, Sarana, dan Prasarana f. Pendidikan g. Penelitian 	Predikat

No	Indikator Kinerja	Definisi Operasional, Kriteria, dan Formula	Satuan
		h. Pengabdian Kepada Masyarakat i. Luaran Dharma Pendidikan Formula: Mendapatkan status terakreditasi dengan peringkat unggul dengan memenuhi Nilai akreditasi > 361.	

No	Indikator Kinerja	Definisi Operasional, Kriteria, dan Formula	Satuan
IKPS 27.4	Jumlah Program Sertifikat yang Mendukung Kompetensi dan Daya Saing Lulusan di Tingkat Nasional dan Global	Definisi Operasional: Program sertifikat yang mendukung kompetensi dan daya saing lulusan bertujuan untuk memberikan keunggulan kompetitif kepada peserta dalam pasar kerja. Kriteria: <ul style="list-style-type: none"> • Tingkat penempatan kerja lulusan, • Tingkat kepuasan alumni program sertifikat, dan • Kesuksesan dalam sertifikasi industri. • Relevansi kurikulum: program sertifikat harus memiliki kurikulum yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja, mengintegrasikan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan di tingkat nasional dan global. • Keterlibatan pemangku kepentingan: melibatkan pemangku kepentingan industri, perusahaan, atau organisasi profesional dalam perancangan dan evaluasi program sertifikat serta memastikan bahwa program memenuhi ekspektasi pasar kerja. • Kerja sama: ada unsur kerja sama atau pertukaran dengan institusi atau organisasi. Menyelenggarakan kegiatan, seminar, atau proyek bersama dengan mitra dapat meningkatkan pengalaman peserta. • Pembaruan regular: memastikan bahwa kurikulum program sertifikat diperbarui secara berkala sesuai dengan perkembangan teknologi, dan kebutuhan pasar kerja serta perubahan kondisi. • Monitoring dan evaluasi kinerja alumni: melakukan monitoring kinerja lulusan program sertifikat dalam pasar kerja, tingkat kesuksesan dan keberlanjutan karir mereka. Formula: $\Sigma \text{Program Sertifikat} = \Sigma \text{program ditawarkan} \text{ pertahun}$	Predikat

No	Indikator Kinerja	Definisi Operasional, Kriteria, dan Formula	Satuan
IKPS 27.5	Persentase kualitas sarana dan prasarana yang layak digunakan untuk mendukung kualitas pendidikan	Definisi Operasional: Persentase kualitas sarana dan prasarana yang layak digunakan untuk mendukung kualitas pendidikan Kriteria: Jumlah status sarana dan prasarana dengan status baik (dapat digunakan)	%

No	Indikator Kinerja	Definisi Operasional, Kriteria, dan Formula	Satuan
		<p>Formula</p> $\frac{N}{X} \times 100\%$ <p>N = Jumlah status sarana dan prasarana atau BMUT dengan status baik (dapat digunakan) X = jumlah seluruh BMUT dalam status baik (dapat digunakan)</p>	

No	Indikator Kinerja	Definisi Operasional, Kriteria, dan Formula	Satuan
IKPS 28.1	Jumlah program studi yang mendapatkan peringkat akreditasi internasional	<p>Definisi Operasional: Program studi sarjana dan Program studi diploma empat atau sarjana terapan, diploma tiga, diploma dua, dan diploma satu yang mendapatkan peringkat akreditasi internasional</p> <p>Kriteria: Mendapatkan akreditasi dari daftar lembaga akreditasi internasional dan sertifikasi internasional yang diakui oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 83/P/2020 tentang Lembaga Akreditasi Internasional</p> <p>Lembaga akreditasi yang diakui dalam persetujuan Internasional:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. External Quality Assurance Results (EQAR) 2. Council for Higher Education Accreditation (CHEA) 3. US Department of Education (USDE) 4. Washington Accord 5. World Federation for Medical Education (WFME) 6. Sydney Accord 7. Dublin Accord 8. Seoul Accord 9. Canberra Accord 10. Asia Pacific Quality Register (APQR) <p>Lembaga akreditasi internasional dinyatakan sebagai lembaga akreditasi oleh kemendikbud</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hong Kong Council for Accreditation of Academic & Vocational Qualifications (HKCAAVQ) 2. Higher Education Evaluation and Accreditation Council of Taiwan (HEEACT) 3. Tertiary Education Quality and Standards Agency (TEQSA) 4. The Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB) 5. The Association of MBAs (AMBA) 6. EFMD Quality Improvement System (EQUIS) 7. International Accreditation Council for Business Education (IACBE) 8. Association of Asia-Pacific Business Schools (AAPBS) 9. Accreditation council for Business schools and Programs (ACBSP) 10. Royal Society of Chemistry (RSC) 	%

No	Indikator Kinerja	Definisi Operasional, Kriteria, dan Formula	Satuan
		<p>11. The Rehabilitation Council of India (RCI) 12. Council for Accreditation of Educator Preparation (CAEP)</p> <p>Lembaga akreditasi International Lainnya (Hibah Kemendikbud)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Foundation for International Business Administration Accreditation (FIBAA) 2. Akkreditierungsagentur für Studiengänge der Ingenieurwissenschaften, der Informatik, der Naturwissenschaften und der Mathematik (ASIIN) 3. International Accreditation Council for Business Education (IACBE) 4. Korea Architectural Accrediting Board (KAAB) 5. Indonesian Accreditation Board for Engineering Education (IABEE) 6. Agency for Quality Assurance by Accreditation of Study (AQAS) 7. The Accreditation, Certification and Quality Assurance Institute (ACQUIN) <p>Formula:</p> $\frac{n}{t} \times 100$ <p>n : jumlah program studi S1 dan D4/D3 yang memiliki akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui pemerintah. t : jumlah program studi S1 dan D4/D3 yang telah meluluskan minimal 1 (kali)</p>	

No	Indikator Kinerja	Definisi Operasional, Kriteria, dan Formula	Satuan
IKPS 29.1	Jumlah program studi yang memiliki kurikulum berbasis luaran (OBE) dan mengakomodasi layanan multi entry multi exit (MEME)	<p>Definisi Operasional: Jumlah program studi yang secara aktif menerapkan kurikulum berbasis luaran (Outcome-Based Education/OBE) dan menyediakan layanan multi entry multi exit (MEME). Program studi memiliki tujuan pembelajaran yang terukur dan terkait dengan kompetensi lulusan yang diinginkan. Setiap mata kuliah dalam kurikulum menetapkan tujuan pembelajaran yang terukur sesuai dengan prinsip OBE. Serta Program studi memberikan pilihan bagi mahasiswa untuk memasuki program studi pada berbagai titik waktu (multi entry). Memberikan opsi bagi mahasiswa untuk keluar dari program studi dengan mendapatkan sertifikat atau gelar yang sesuai pada titik tertentu (multi exit).</p> <p>Kriteria:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dokumentasi Kurikulum Berbasis Luaran (OBE): Program studi harus memiliki dokumen kurikulum yang secara jelas menunjukkan tujuan pembelajaran yang terukur dan terkait dengan kompetensi lulusan. 	Program Studi

No	Indikator Kinerja	Definisi Operasional, Kriteria, dan Formula	Satuan
		<ul style="list-style-type: none"> • Mata kuliah dalam kurikulum harus memiliki deskripsi tujuan pembelajaran yang merinci keterampilan dan pengetahuan yang diharapkan dari mahasiswa. • Penerapan Prinsip OBE dalam Proses Pengajaran dan Evaluasi: Bukti prinsip - prinsip OBE diimplementasikan dalam proses pengajaran, seperti penggunaan metode pengajaran yang mendukung pencapaian tujuan pembelajaran. • Menyediakan sistem evaluasi yang terkait dengan tujuan pembelajaran dan dapat mengukur pencapaian kompetensi mahasiswa. • Dokumentasi Layanan Multi Entry Multi Exit (MEME): Menunjukkan kebijakan dan prosedur yang jelas terkait dengan layanan multi entry, yang mencakup kebijakan penerimaan mahasiswa baru pada berbagai titik waktu. Menyediakan informasi tentang opsi keluar dari program studi pada titik tertentu dan persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan sertifikat atau gelar parsial. • Pemantauan Jumlah Mahasiswa yang Memanfaatkan MEME: Melacak dan mencatat jumlah mahasiswa yang memasuki program studi pada titik-titik waktu yang berbeda (multi entry). Melacak dan mencatat jumlah mahasiswa yang memilih untuk keluar pada titik tertentu untuk mendapatkan sertifikat atau gelar parsial (multi exit). • Umpan Balik dari Mahasiswa dan Alumni: Menganalisis umpan balik dari mahasiswa terkait dengan fleksibilitas kurikulum dan keberhasilan implementasi layanan MEME. Menerima umpan balik dari alumni terkait dengan sejauh mana pengalaman mereka dalam program studi mendukung kebutuhan dan aspirasi mereka. • Keterlibatan Pemangku Kepentingan Eksternal: Melibatkan pemangku kepentingan eksternal, seperti perwakilan industri atau profesional, dalam mengevaluasi relevansi kurikulum dan efektivitas layanan MEME. <p>Formula: Menghitung jumlah program studi yang memenuhi kriteria OBE dan MEME selama periode penilaian per tahun (minimal 5 kriteria terpenuhi)</p>	

No	Indikator Kinerja	Definisi Operasional, Kriteria, dan Formula	Satuan
IKPS 29.2	Jumlah mata kuliah bersama dan/atau bahan ajar bersama.	<p>Definisi Operasional: Mata kuliah dan/atau bahan ajar yang digunakan oleh lebih dari 1 program studi. Mata Kuliah Bersama otomatis menggunakan bahan ajar bersama, Bahan Ajar Bersama adalah bahan ajar yang digunakan oleh lebih dari 1 mata kuliah.</p> <p>Kriteria: Mata Kuliah bersama adalah Mata kuliah yang digunakan oleh lebih dari satu program studi.</p>	Jumlah Mata Kuliah Bersama

No	Indikator Kinerja	Definisi Operasional, Kriteria, dan Formula	Satuan
		<p>Bahan ajar bersama adalah bahan ajar yang digunakan oleh lebih dari satu MK</p> <p>Formula: Jumlah MK bersama dan/atau bahan ajar bersama</p>	

No	Indikator Kinerja	Definisi Operasional, Kriteria, dan Formula	Satuan
IKPS 29.3	Jumlah program studi Diploma/Sarjana dengan kurikulum yang mengakomodasi pembelajaran di luar program studi.	<p>Definisi Operasional: Jumlah program studi diploma atau sarjana yang menyediakan fleksibilitas atau pilihan bagi mahasiswa untuk mengambil mata kuliah atau terlibat dalam kegiatan pembelajaran di luar batas kurikulum inti program studi mereka. Program studi memfasilitasi mahasiswa untuk mengambil mata kuliah dari program studi lain serta program studi menyediakan kesempatan untuk mahasiswa terlibat dalam proyek, magang, atau kegiatan pembelajaran praktis yang melibatkan kolaborasi antarprogram studi atau dengan industri. Ada kebijakan atau inisiatif yang mendukung pengembangan keterampilan lintas mata kuliah atau lintas disiplin di luar kurikulum inti.</p> <p>Kriteria:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Setiap program studi harus memiliki kebijakan atau struktur kurikulum yang mendukung fleksibilitas, memungkinkan mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di luar program studi inti. adanya Adopsi kebijakan transfer kredit atau pengakuan terhadap mata kuliah dari program studi lain. • Ketersediaan Mata Kuliah Bersama Lintas Program Studi. Program studi harus menawarkan mata kuliah pilihan yang melibatkan kolaborasi lintas program studi atau memungkinkan mahasiswa untuk memilih mata kuliah di luar fokus utama mereka. Indikator jumlah mata kuliah bersama • Ketersediaan Kegiatan Pembelajaran di Luar Program Studi: Kriteria: Program studi harus menyediakan kesempatan bagi mahasiswa untuk terlibat dalam kegiatan pembelajaran di luar program studi, seperti proyek, magang, atau kegiatan praktis lintas disiplin. Indikatornya Jumlah mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan pembelajaran lintas disiplin atau di luar program studi inti. • Monitoring Partisipasi Mahasiswa: Program studi harus memiliki sistem pemantauan untuk mengukur tingkat partisipasi mahasiswa dalam pembelajaran di luar program studi. Indikator: Tingkat partisipasi mahasiswa dalam mata kuliah atau kegiatan pembelajaran lintas program studi. • Evaluasi Dampak Terhadap Pengembangan Kompetensi Mahasiswa. Program studi harus mengevaluasi dampak pembelajaran di luar program studi terhadap pengembangan keterampilan dan kompetensi mahasiswa. Mensurvey penilaian atau umpan balik mahasiswa terkait dengan keuntungan yang diperoleh dari pembelajaran di luar program studi. • Pengembangan Rencana Pengajaran dan Kurikulum: Program studi harus memiliki rencana pengembangan 	Program Studi

No	Indikator Kinerja	Definisi Operasional, Kriteria, dan Formula	Satuan
		<p>untuk terus meningkatkan fleksibilitas kurikulum dan memperluas peluang pembelajaran di luar program studi. Indikator: Penyelenggaraan pelatihan untuk dosen atau perencanaan perubahan kurikulum yang mendukung pembelajaran di luar program studi.</p> <ul style="list-style-type: none"> Keterlibatan Dosen dalam Kolaborasi Antarprogram Studi: Dosen di program studi harus mendorong dan terlibat dalam kolaborasi dengan dosen dari program studi lain untuk mendukung pengembangan mata kuliah atau kegiatan pembelajaran lintas disiplin. Indikator: Jumlah kolaborasi atau proyek yang melibatkan dosen dari berbagai program studi. <p>Formula: Jumlah program studi Diploma/Sarjana dengan kurikulum yang mengakomodasi pembelajaran di luar program studi. (minimal 5 kriteria terpenuhi)</p>	

No	Indikator Kinerja	Definisi Operasional, Kriteria, dan Formula	Satuan
IKPS 30.1	Persentase pengembangan dan implementasi bahan pembelajaran berbasis kasus (<i>case method</i>), <i>project based model</i> , dan teknologi media	<p>Definisi Operasional: Program studi sarjana dan Program studi diploma empat atau sarjana terapan, diploma tiga, diploma dua, dan diploma satu yang pengembangan dan implementasi bahan pembelajaran berbasis kasus (<i>case method</i>), <i>project based model</i>, dan teknologi media</p> <p>Kriteria: Kriteria <i>case method</i></p> <ol style="list-style-type: none"> Tutor memberikan kasus minimal pada satu sesi tutorial dan mahasiswa berperan sebagai “protagonis” yang berusaha untuk memecahkan kasus tersebut; Dari kasus yang diberikan oleh tutor, mahasiswa melakukan analisis untuk membangun rekomendasi solusi, dibantu dengan diskusi kelompok yang dilakukan dilaman elearning maupun sesi tatap muka untuk menguji dan mengembangkan rancangan solusi; dan Kelas berdiskusi secara aktif, dengan mayoritas dari percakapan dilakukan oleh mahasiswa. Tutor bertugas untuk memfasilitasi dan mengarahkan diskusi, memberikan pertanyaan, dan melakukan observasi. <p>Kriteria Team-based project</p> <ol style="list-style-type: none"> Mahasiswa kelas tutorial baik tutor maupun TTM dibagi menjadi beberapa kelompok (>1 mahasiswa) untuk mengerjakan tugas bersama selama jangka waktu tertentu; Masing-masing kelompok diberikan masalah asli atau pertanyaan kompleks, lalu diberikan ruang untuk membuat rencana kerja dan model kolaborasi; setiap kelompok mempersiapkan presentasi/karya akhir yang ditampilkan ke tutor, kelas, atau audiens lainnya yang dapat memberikan umpan balik yang konstruktif; 	%

No	Indikator Kinerja	Definisi Operasional, Kriteria, dan Formula	Satuan
		<p>d. tutor membina setiap kelompok selama periode pekerjaan proyek dan mendorong mahasiswa untuk berpikir kritis dan kreatif dalam kolaborasi;</p> <p>e. kelompok diberikan project dari dunia usaha industri.</p> <p>Kriteria evaluasi nilai akhir 50% dari bobot nilai akhir harus berdasarkan kualitas partisipasi diskusi kelas (case method) dan/atau presentasi akhir project-based learning.</p> <p>Formula:</p> $\frac{n}{t} \times 100$ <p>n: jumlah mata kuliah yang menggunakan case method atau <i>team based project</i> pembelajaran dan bagian dari bobot evaluasi t: total jumlah mata kuliah yang kelasnya diselenggarakan pada tahun berjalan</p>	

No	Indikator Kinerja	Definisi Operasional, Kriteria, dan Formula	Satuan
IKPS 31.1	Persentase peningkatan kompetensi dan kualifikasi SDM yang mendukung <i>World Class University</i>	<p>Definisi Operasional: Persentase peningkatan kompetensi dan kualifikasi SDM yang mendukung "<i>World Class University</i>" mengukur sejauh mana kualifikasi dan kompetensi sumber daya manusia (SDM) di suatu universitas telah meningkat, dengan tujuan mendukung pencapaian status <i>World Class University</i>. Ini mencakup peningkatan dalam pendidikan formal, pelatihan profesional, serta pengembangan keterampilan dan pengetahuan yang relevan dengan standar internasional dalam pendidikan tinggi.</p> <p>Kriteria: Kriteria untuk mengukur indikator ini meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan dan Pelatihan: Peningkatan dalam kualifikasi formal (seperti gelar akademik) dan partisipasi dalam pelatihan profesional yang berkualitas mendukung standar <i>World Class University</i>. 2. Pengembangan Kompetensi: Peningkatan dalam keterampilan khusus, pengetahuan, dan kompetensi yang diperlukan untuk mendukung standar <i>World Class University</i>. 3. Relevansi dengan Standar Internasional: Seberapa relevan peningkatan kompetensi dan kualifikasi tersebut dengan standar dan kebutuhan pendidikan tinggi global. <p>Formula: Formula untuk menghitung indikator ini dapat dirumuskan sebagai berikut:</p> $\frac{X}{Z} \times 100 = Y$	%

No	Indikator Kinerja	Definisi Operasional, Kriteria, dan Formula	Satuan
		<p>Keterangan:</p> <p>Y = Persentase peningkatan kompetensi dan kualifikasi SDM yang mendukung <i>World Class University</i>.</p> <p>X = Jumlah SDM yang Mengalami Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi adalah jumlah individu dalam SDM yang telah berhasil meningkatkan kualifikasi atau kompetensi mendukung standar <i>World Class University</i> dalam periode tertentu.</p> <p>Z = Total Jumlah SDM adalah jumlah total sumber daya manusia di universitas tersebut.</p>	

No	Indikator Kinerja	Definisi Operasional, Kriteria, dan Formula	Satuan
IKPS 32.1	Jumlah program PkM kolaborasi dengan mitra luar negeri	<p>Definisi operasional: Program PkM yang dilaksanakan bersama dengan mitra luar negeri</p> <p>Kriteria: Program PkM yang dilakukan berkolaborasi dengan mitra luar negeri baik yang berada di dalam maupun luar negeri</p> <p>Formula: n = jumlah program PkM kolaborasi dengan mitra luar negeri yang ditetapkan dalam tahun berjalan dalam Renstra</p>	Program

No	Indikator Kinerja	Definisi Operasional, Kriteria, dan Formula	Satuan
IKPS 32.2	Persentase program PkM yang melibatkan mahasiswa dan/atau alumni	<p>Definisi Operasional: Aktivitas PkM yang melibatkan mahasiswa dan/atau alumni yang bertujuan untuk berkontribusi positif terhadap masyarakat dalam skala kecil maupun lebih luas</p> <p>Kriteria: Dosen dan mahasiswa terlibat dalam sebuah kegiatan PkM dengan fokus menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat.</p> <p>Formula:</p> $\frac{n}{n_0} \times 100$ <p>n = jumlah Pkm dosen yang melibatkan mahasiswa n₀ = jumlah Pkm dosen</p>	%

No	Indikator Kinerja	Definisi Operasional, Kriteria, dan Formula	Satuan
IKPS 32.3	Jumlah PkM mahasiswa	<p>Definisi Operasional: Aktivitas PkM mahasiswa yang bertujuan untuk berkontribusi positif terhadap masyarakat dalam skala kecil maupun lebih luas</p>	%

No	Indikator Kinerja	Definisi Operasional, Kriteria, dan Formula	Satuan
		<p>Kriteria: Jumlah mahasiswa terlibat dalam sebuah kegiatan PkM dengan fokus menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat.</p> <p>Formula: n = jumlah program PkM yang melibatkan mahasiswa/tahun</p>	

No	Indikator Kinerja	Definisi Operasional, Kriteria, dan Formula	Satuan
IKPS 33.1	Jumlah publikasi di jurnal nasional dan internasional, baik melalui skema mandiri maupun kerja sama dengan PT ternama di dalam dan luar negeri.	<p>Definisi Operasional: Berbagi penelitian dan temuan ilmiah dengan komunitas akademis dan publik dalam jurnal nasional dan internasional</p> <p>Kriteria: Artikel jurnal terpublikasi pada jurnal nasional maupun internasional</p> <p>Formula: Jumlah publikasi artikel jurnal</p>	Artikel

No	Indikator Kinerja	Definisi Operasional, Kriteria, dan Formula	Satuan
IKPS 34.1	Jumlah penelitian kolaborasi dengan mitra di dalam negeri termasuk DUDI	<p>Definisi Operasional: Kemitraan yang menguntungkan dan menjembatani kesenjangan antara dunia akademik dan industri, sehingga mendorong inovasi, pembangunan ekonomi, dan meningkatkan kualitas penelitian dan pendidikan secara keseluruhan</p> <p>Kriteria: Memberikan solusi praktis atau mengembangkan teknologi baru yang dapat diterapkan secara langsung dan menjawab tantangan dunia usaha dan industri</p> <p>Formula: Jumlah penelitian kolaborasi dengan DUDI tahun sebelumnya</p>	Judul

No	Indikator Kinerja	Definisi Operasional, Kriteria, dan Formula	Satuan
IKPS 34.2	Jumlah kerja sama penelitian dengan perguruan tinggi atau lembaga internasional	<p>Definisi Operasional: Penelitian yang dilakukan bersama dengan peneliti dari perguruan tinggi atau lembaga internasional, baik yang berada di Indonesia maupun di luar negeri</p> <p>Kriteria Mitra:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) perusahaan multinasional; 2) perusahaan teknologi global; 3) perusahaan rintisan (startup company) teknologi; 4) organisasi nirlaba kelas dunia; 5) institusi/organisasi multilateral; 6) perguruan tinggi yang masuk dalam daftar QS200 berdasarkan bidang ilmu subject); 	Judul

No	Indikator Kinerja	Definisi Operasional, Kriteria, dan Formula	Satuan
		7) lembaga riset internasional; atau Formula: Jumlah judul yang ditetapkan per tahun	

No	Indikator Kinerja	Definisi Operasional, Kriteria, dan Formula	Satuan
IKPS 35.1	Jumlah inovasi yang digunakan oleh masyarakat dan/atau pemerintah	Definisi Operasional: Program inovasi yang dihasilkan oleh UT dan digunakan oleh masyarakat dan/atau pemerintah. Kriteria: Inovasi yang dihasilkan oleh UT dan digunakan oleh masyarakat Formula: Jumlah inovasi yang ditetapkan per tahun	Inovasi

No	Indikator Kinerja	Definisi Operasional, Kriteria, dan Formula	Satuan
IKPS 35.2	Jumlah Inovasi/rekacipta hilirisasi DUDI	Definisi Operasional: Kemitraan antara perguruan tinggi dengan pihak DUDI untuk hilirisasi/komersialisasi produk inovasi/rekacipta yang dihasilkan melalui kegiatan penelitian, atau penerapan kepakaran dari perguruan tinggi. Tujuannya untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi DUDI, atau untuk mencari solusi atas permasalahan bersama antara perguruan tinggi dan mitra DUDI. Contoh program misalnya global warming, sampah plastik, dsb Kriteria Mitra: 1) perusahaan multinasional; 2) perusahaan nasional berstandar tinggi; 3) perusahaan teknologi global; 4) perusahaan rintisan (startup company) teknologi; 5) organisasi nirlaba kelas dunia; 6) institusi/organisasi multilateral; 7) perguruan tinggi yang masuk dalam daftar QS200 berdasarkan bidang ilmu (QS200 by subject) ; 8) perguruan tinggi, fakultas, atau program studi dalam bidang yang relevan; 9) instansi pemerintah, BUMN, dan/ atau BUMD; 10) rumah sakit; 11) UMKM; 12) lembaga riset pemerintah, swasta, nasional, maupun internasional; atau 13) lembaga kebudayaan berskala nasional/ bereputasi. Formula: Jumlah inovasi/rekacipta yang ditetapkan per tahun	Jumlah inovasi/rekacipta

No	Indikator Kinerja	Definisi Operasional, Kriteria, dan Formula	Satuan
IKPS 35.3	Jumlah jurnal UT	<p>Definisi Operasional: Jurnal Ilmiah merupakan wadah untuk mempublikasikan artikel- artikel produk pemikiran ilmiah secara empiris (artikel hasil penelitian) maupun secara logis (artikel hasil pemikiran) dalam bidang ilmu tertentu kepada masyarakat akademik yang diterbitkan secara berkala oleh perguruan tinggi.</p> <p>Kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Jurnal merupakan inisiasi dari fakultas dan sesuai dengan roadmap pengembangan jurnal di lingkungan universitas terbuka 2) Jurnal diterbitkan secara berkala minimal 2 kali setahun 3) Memiliki ISSN 4) Memiliki terbitan versi online 5) Memuat karya ilmiah dari penulis yang berasal dari minimal dua institusi yang berbeda 6) Mempunyai dewan redaksi/editor yang terdiri dari para ahli dalam bidangnya dan berasal dari minimal dua institusi yang berbeda <p>Formula Jumlah jurnal yang diterbitkan oleh UT</p>	Jurnal

No	Indikator Kinerja	Definisi Operasional, Kriteria, dan Formula	Satuan
IKPS 35.4	Jumlah jurnal UT yang bereputasi nasional	<p>Definisi Operasional: Pengukuran yang mencerminkan kualitas dan pengaruh jurnal dalam tingkat nasional berdasarkan ranking SINTA (Science and Technology Index)</p> <p>Kriteria: Jurnal UT yang terindeks</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Sinta 1 2) Sinta 2 3) Sinta 3 4) Sinta 4 5) Sinta 5 6) Sinta 6 <p>Formula: Jumlah jurnal UT yang terindeks SINTA</p>	Jurnal

No	Indikator Kinerja	Definisi Operasional, Kriteria, dan Formula	Satuan
IKPS 36.1	Jumlah PkM berbasis teknologi	<p>Definisi Operasional: Kegiatan PkM yang berkontribusi terhadap masyarakat dengan pendekatan pemanfaatan teknologi, sehingga menjawab kebutuhan dan tantangan masyarakat.</p>	Program

No	Indikator Kinerja	Definisi Operasional, Kriteria, dan Formula	Satuan
		<p>Kriteria: Tersedianya sumberdaya, pendampingan, dan peluang perluasan jaringan kegiatan PkM melalui platform digital</p> <p>Formula: Jumlah Program PkM berbasis teknologi</p>	

No	Indikator Kinerja	Definisi Operasional, Kriteria, dan Formula	Satuan
IKPS 36.2	Jumlah publikasi hasil program pengabdian masyarakat.	<p>Definisi Operasional: Luaran hasil PKM dalam bentuk publikasi adalah dokumentasi dan diseminasi hasil Pkm yang terkait dengan layanan masyarakat.</p> <p>Kriteria: Penerbitan luaran hasil PKM dalam bentuk jurnal artikel sehingga dapat berkontribusi dalam dunia akademik</p> <p>Formula: Jumlah publikasi hasil PkM</p>	Artikel

No	Indikator Kinerja	Definisi Operasional, Kriteria, dan Formula	Satuan
IKPS 37.1	Jumlah program pendidikan yang berkelanjutan/Sertifikat	<p>Definisi Operasional: Pemberian pengakuan formal yang diberikan kepada seseorang yang telah menunjukkan kompetensi, pengetahuan, dan keterampilan tertentu dalam suatu bidang</p> <p>Kriteria: Pengakuan atau penghargaan oleh organisasi terkemuka Peningkatan diversifikasi program pengabdian kepada masyarakat</p> <p>Formula: Jumlah program sertifikasi</p>	Program

No	Indikator Kinerja	Definisi Operasional, Kriteria, dan Formula	Satuan
PS 37.2	Jumlah program MOOCs	<p>Definisi Operasional: Pembelajaran <i>online</i> yang dirancang untuk menyediakan akses terbuka ke berbagai konten pendidikan, memungkinkan setiap orang dari seluruh dunia untuk berpartisipasi dalam kursus yang ditawarkan oleh universitas dan lembaga pendidikan lainnya.</p> <p>Kriteria <i>Self-paced learning</i></p> <p>Formula Jumlah program MOOCs</p>	MOOCs

Rencana Strategis Antara Universitas Terbuka Tahun 2024-2025



UNIVERSITAS TERBUKA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Penerbit Universitas Terbuka
Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang,
Tangerang Selatan - 15437, Banten - Indonesia
Telp. 021-7490941, Faks. 021-7490147
Website. www.ut.ac.id